



KEMENTERIAN PENDIDIKAN,
KEBUDAYAAN, RISET DAN TEKNOLOGI



2023

Diksi



@KamiVokasi



Direktorat Jenderal
Pendidikan Vokasi

www.vokasi.kemdikbud.go.id

LAPORAN KINERJA

DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN VOKASI



KEMENTERIAN PENDIDIKAN,
KEBUDAYAAN, RISET DAN TEKNOLOGI

VOKASI
KUAT, MENGUATKAN
INDONESIA

2023

Diksi



@KamiVokasi



Direktorat Jenderal
Pendidikan Vokasi

www.vokasi.kemdikbud.go.id

LAPORAN KINERJA

DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN VOKASI



Kata Pengantar

Direktur Jenderal Pendidikan Vokasi



Puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa karena atas berkat dan rahmat-Nya, Laporan Kinerja Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi tahun 2023 dapat diselesaikan tepat waktu. Laporan Kinerja ini merupakan bentuk pertanggung-jawaban kepada publik atas pelaksanaan program dan kegiatan serta penggunaan anggaran dalam rangka mewujudkan tata kelola di

lingkungan Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi yang berkualitas, efektif, efisien, transparan, dan akuntabel.

Sesuai Rencana Strategis (Renstra) Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi Tahun 2020-2024 versi revisi, Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi menetapkan 5 Sasaran Program (SP) dengan 8 Indikator Kinerja Program (IKP) yang dilaksanakan oleh Sekretariat Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi, 5 Direktorat Teknis, 7 Balai Besar/Balai Pengembangan Penjaminan Mutu Pendidikan Vokasi, 44 Politeknik Negeri, dan 5 Akademi Komunitas Negeri, sebagaimana tertuang dalam Perjanjian Kinerja Direktur Jenderal Pendidikan Vokasi tahun 2023.

Laporan kinerja ini diharapkan dapat memberikan gambaran objektif tentang kinerja yang dihasilkan Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi tahun 2023, serta dapat digunakan sebagai acuan untuk menetapkan rencana aksi dan kebijakan di masa yang akan datang.

Akhir kata, kami ucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan Laporan Kinerja Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi tahun 2023, dan semoga laporan kinerja ini dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Jakarta, Februari 2024
Direktur Jenderal,



Kiki Yuliati



Daftar isi

Kata Pengantar	ii
Daftar isi.....	iii
Daftar Gambar	iv
Daftar Tabel.....	vii
Ikhtisar Eksekutif	viii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
Gambaran Umum.....	1
Dasar Hukum.....	2
Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi.....	3
Isu Strategis.....	6
Peran Strategis	7
BAB II PERENCANAAN KINERJA	8
Visi.....	8
Misi	8
Rencana Kinerja Jangka Menengah	9
Rencana Kinerja Renstra Revisi	9
Perjanjian Kinerja Tahun 2023.....	10
Program Prioritas.....	12
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	14
Pengukuran Kinerja.....	14
Capaian Kinerja.....	14
Realisasi Anggaran.....	77
Efisiensi Anggaran	78
<i>Cross Cutting</i> /Kolaborasi Program Ditjen Pendidikan Vokasi.....	79
Inovasi yang Dilakukan	81
Penghargaan yang Dicapai.....	85
BAB IV PENUTUP.....	89
LAMPIRAN.....	92



Daftar Gambar

Gambar 1.1	Struktur Organisasi Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi	5
Gambar 3.1	Grafik Tren Peningkatan Jumlah Mahasiswa Pendidikan Vokasi Tahun 2020-2023	16
Gambar 3.2	Trend kenaikan jumlah mahasiswa pada Perguruan Tinggi Vokasi (orang)	17
Gambar 3.3	Grafik perbandingan capaian 2022, target 2023, dan capaian 2023.	17
Gambar 3.4	Gedung Kuliah Terpadu Politeknik Negeri Banyuwangi dan Proses Pembangunan Gedung Belajar di Politeknik Maritim Negeri Indonesia sumber SBSN 2023	18
Gambar 3.5	Peralatan Pratikum Prodi Teknik Mesin di Politeknik Negeri Balikpapan sumber SBSN 2023.....	18
Gambar 3.6	PSDKU Politeknik Negeri Malang di Pamekasan	19
Gambar 3.7	Website Ditjen Pendidikan Vokasi yang mengupdate hasil dari produk vokasi.....	19
Gambar 3.8	Grafik Perbandingan capaian 2021, target 2022 dan capaian 2022 pada seluruh IKP di Sasaran Program 2	23
Gambar 3.9	GrafikTrend Capaian IKPP 2.1	26
Gambar 3.10	Grafik Trend capaian dan perbandingan target 2023, capaian 2023 dan target akhir renstra.....	26
Gambar 3.11	Kewirausahaan yang dilakukan pada salah satu SMK yang mendapatkan program SMK Produk Kreatif dan Kewirausahaan	26
Gambar 3.12	Sertifikasi Kompetensi Siswa SMK	27
Gambar 3.13	Program SMK Pusat Keunggulan sektor <i>Hospitality</i>	27
Gambar 3.14	Pengembangan Ruang Praktek Siswa dan <i>Teaching Factory</i> pada SMK berbasis industri 4.0.....	28
Gambar 3.15	Grafik Trend Capaian IKP 2.2.....	34
Gambar 3.16	Grafik Trend capaian dan perbandingan capaian 2022, target 2023, capaian 2023 dan target akhir renstra.....	34
Gambar 3.17	Bapak Presiden Jokowi mengunjungi Vokasifest	35
Gambar 3.18	Sosialisasi Program <i>Competitive Fund</i> (CF) dan Sosialisasi Program Peningkatan Kompetensi Dosen Vokasi 2023	35
Gambar 3.19	Evaluasi Kelayakan Calon Penyedia Pengadaan Barang PPPTV-PTS	36
Gambar 3.20	Program Peningkatan Kompetensi SDM PTV pada Skema Pelatihan/Magang	36
Gambar 3.21	Bimtek Penyusunan Kurikulum Berbasis Industri Tahap I dan Tahap II	37



Gambar 3.22 Pelaksanaan Sertifikasi Kompetensi Mahasiswa di Politeknik Negeri Batam	37
Gambar 3.23 Salah satu bentuk kegiatan P2MD di Desa Sidomulyo.....	37
Gambar 3.24 Trend kenaikan angka absolut lulusan kursus dan pelatihan yang bekerja dan berwirausaha dengan jumlah lulusan PKK dan PKW	43
Gambar 3.25 Grafik Trend Capaian IKP 2.3.....	45
Gambar 3.26 Grafik Trend capaian dan perbandingan capaian 2022, target 2023, capaian 2023 dan target akhir renstra.....	45
Gambar 3.27 PKK Keahlian Tata Kecantikan Rambut dan PKW Keahlian Menjahit	45
Gambar 3.28 PKK Keahlian Tata Boga dan PKW Keahlian <i>Pastry and Bakery</i>	46
Gambar 3.29 PKK Keahlian Pengelasan dan PKW Keahlian Teknik Kendaraan Ringan	46
Gambar 3.30 PKK Keahlian <i>Housekeeping</i> dan PKW Keahlian Pijat Refleksi	46
Gambar 3.31 Pelaksanaan Uji Kompetensi <i>Housekeeping</i>	47
Gambar 3.32 Grafik Trend Capaian IKP 2.4.....	52
Gambar 3.33 Grafik Trend capaian dan perbandingan capaian 2022, target 2023, capaian 2023 dan target akhir renstra.....	52
Gambar 3.34 Peluncuran Buku Praktik Baik Pendidikan Vokasi “Mendobrak Mitos: 20 Kisah Inspiratif Pendidikan Vokasi” dan Pembukaan ASEAN TVET Conference.....	52
Gambar 3.35 Penandatanganan Perjanjian Kerja Sama (PKS) antara PT. Erajaya Swasembada dengan Satuan Pendidikan Vokasi	53
Gambar 3.36 Peragaan Busana Karya Vokasi di Jakarta Muslim Fashion Week 2024	53
Gambar 3.37 Pelatihan Instruktur Kursus di BBPPMPV BBL dan BBPPMPV Bispar	54
Gambar 3.38 Pelatihan Peningkatan Kompetensi dan Manajerial Kepala Sekolah dan Pelatihan Guru Upskilling dan Reskilling di BBPPMPV BMTI	54
Gambar 3.39 Grafik Trend capaian baseline 2020, 2021, dan 2022 Trend capaian	59
Gambar 3.40 Grafik Perbandingan capaian 2022, target 2023, dan capaian 2023	61
Gambar 3.41 Seminar Hasil pada program PPM	61
Gambar 3.42 Program <i>Matching Fund</i> pada penelitian yang berjudul Pembuatan <i>Smart Lamp</i>	62
Gambar 3.43 Program Kekayaan Intelektual (KI) dan Penelitian Inovasi <i>Mobile Robot</i> di Industri Fotografi	62
Gambar 3.44 Perbandingan capaian SAKIP tahun 2022 dan 2023	65
Gambar 3.45 Grafik Perbandingan nilai SAKIP Ditjen Vokasi tahun 2022 dan 2023	66
Gambar 3.46 Asistensi SAKIP bersama Politeknik Negeri Lhokseumawe dan AKN Aceh Barat dan Asistensi SAKIP di AKN Pacitan.....	68



Gambar 3.47	Pertemuan bersama Itjen untuk Tindak Lanjut Hasil Evaluasi Sakip	68
Gambar 3.48	Pertemuan bersama Direktorat dalam penyusunan Pengukuran Kinerja dan Reviu Renstra.....	69
Gambar 3.49	Grafik Perbandingan capaian IKP antara realisasi 2022, target 2023 dan capaian 2023	72
Gambar 3.50	Grafik Trend Capaian IKP 5.1.....	74
Gambar 3.51	Grafik Trend capaian dan perbandingan capaian 2022, target 2023, capaian 2023 dan target akhir renstra.....	74
Gambar 3.52	Pendampingan menuju ZI WBK di Politeknik Negeri Tanah Laut, BPPMPV KPTK dan Politeknik Negeri Ujung Pandang	75
Gambar 3.53	Grafik Capaian Realisasi Anggaran Tahun 2023	78
Gambar 3.54	Halaman <i>Log-In</i> Aplikasi Sidakin.....	81
Gambar 3.55	Halaman Log-In Aplikasi Sikerma.....	82
Gambar 3.56	Aplikasi Sistem Penyelarasan Berbasis Web (Si-Laras).....	83
Gambar 3.57	Aplikasi Sistem Penyelarasan Berbasis Web (Si-Laras).....	83
Gambar 3.58	Aplikasi Sertifikat Kompetensi Elektronik dan contoh E-Sertifikat	84
Gambar 3.59	Penghargaan Kehumasan untuk Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi	86
Gambar 3.60	Penghargaan Nilai Kinerja Anggaran Terbaik	87
Gambar 3.61	Penghargaan dari Dewan Kerajinan Nasional (Dekranas) atas kerjasama dalam pelaksanaan program PKW dan Juara I Nasional Kontes Robot Indonesia oleh PENS.....	87
Gambar 3.62	Rekor Muri Flashmob Tari Sholawat Montro.....	88
Gambar 3.63	Unit Penyelenggara Pelayanan Publik Terbaik BBPPMPV BBL dan Penghargaan Mitra Kampus Terbaik dalam Penyelenggaraan <i>Vocational School Graduate Academy Offline</i>	88
Gambar 4.1	Grafik Realisasi Anggaran dan Capaian IKP	89



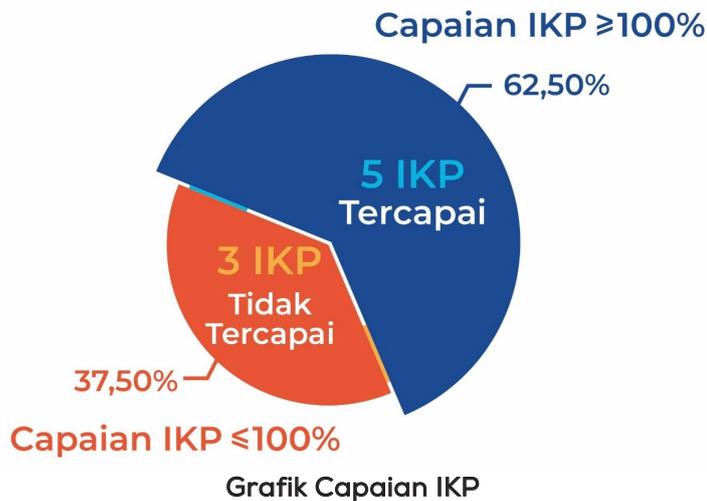
Daftar Tabel

Tabel 1.1	Jumlah Pegawai di Lingkungan Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi.....	5
Tabel 2.1	Sasaran Program/Indikator Kinerja Program.....	9
Tabel 2.2	Perjanjian Kinerja Awal	10
Tabel 2.3	Alokasi Anggaran Perjanjian Kinerja Awal.....	10
Tabel 2.4	Perjanjian Kinerja Revisi	11
Tabel 2.5	Alokasi Anggaran Perjanjian Kinerja Revisi	12
Tabel 2.6	Program Prioritas	13
Tabel 3.1	Pengukuran Kinerja	14
Tabel 3.2	Angka Partispasi Kasar Perguruan Tinggi (APK PT) berdasarkan kelompok pengeluaran	15
Tabel 3.3	Klasifikasi Predikat SAKIP	67
Tabel 3.4	Rincian nilai pada masing-masing komponen SAKIP	67
Tabel 3.5	Persyaratan penetapan Unit Kerja/Satuan Kerja menuju ZIWBK/WBBM	72
Tabel 3.6	Realisasi Anggaran per IKP.....	78
Tabel 3.7	List LKP yang siap bertransformasi menjadi Akademi Komunitas/PTV.....	85

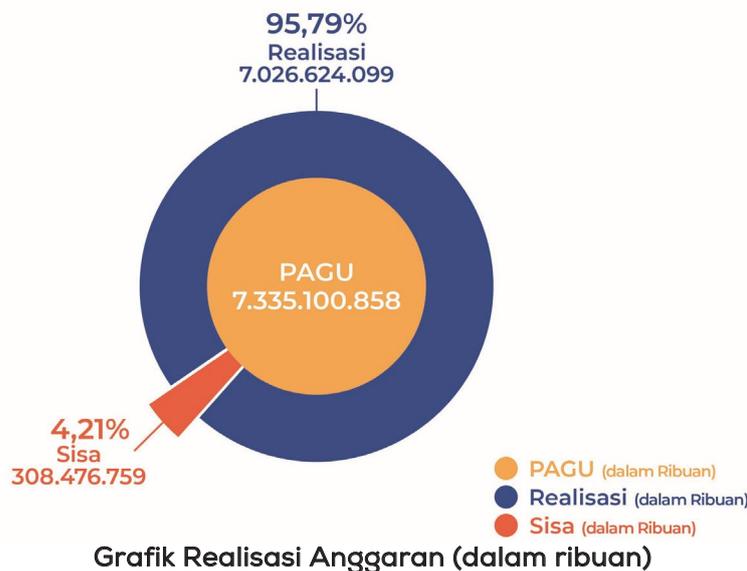


Ikhtisar Eksekutif

Laporan Kinerja Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi menyajikan tingkat capaian 5 (lima) Sasaran Program (SP) dengan 8 (delapan) Indikator Kinerja Program (IKP) yang dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi sebagaimana ditetapkan pada perjanjian kinerja tahun 2023. Pada tahun 2023, Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi telah memenuhi target 5 IKP atau 62.50% dan 3 IKP atau 37.50% tidak memenuhi target.



Dari sisi anggaran, Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi telah menyerap sebesar Rp7.026.624.098.913 atau 95,79% dari total pagu yaitu sebesar Rp7.335.100.858.000.





Sasaran Program 1

Meningkatnya partisipasi pendidikan tinggi.



Sasaran Program 2

Meningkatnya mutu dan relevansi lulusan pendidikan dan pelatihan vokasi sesuai dengan kebutuhan dunia kerja.



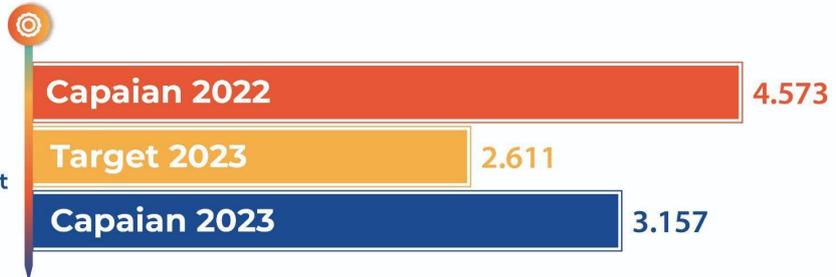


Sasaran Program 3

Meningkatnya riset, inovasi dan ilmu pengetahuan dari PT Vokasi.

Sasaran Program 3

[IKP 3.1] Jumlah Keluaran penelitian PT Vokasi yang diterapkan oleh masyarakat



Sasaran Program 4

Meningkatnya akuntabilitas layanan dan pengelolaan anggaran pendidikan, kebudayaan, riset, dan teknologi.

Sasaran Program 4



[IKP 4.1] Predikat SAKIP Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi



Sasaran Program 5

Meningkatnya pelaksanaan reformasi birokrasi Kemendikbudristek.





Kendala dan Permasalahan Umum

1

Masa transisi dari Kepmendikbud Nomor 3/M/2021 ke Kepmendikbudristek Nomor 210/M/2023 tentang Indikator Kinerja Utama Perguruan Tinggi Negeri dan Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi menyebabkan adanya keterbatasan waktu dalam penyaluran dan pelaksanaan insentif BOPTN pada Perguruan Tinggi Negeri.

2

Pada Permendikbud Nomor 25 tahun 2020 tidak terdapat ketentuan yang menyebutkan proporsi pembagian untuk kelompok mahasiswa UKT I dan II serta KIP Kuliah.

3

Jumlah kesempatan kerja yang tidak sebanding dengan jumlah lulusan yang akan memasuki pasar kerja.

4

Kebijakan blokir AA dan penambahan anggaran melalui BABUN pada pertengahan tahun 2023 berpengaruh terhadap penyesuaian target pada semester dua.

5

Kebutuhan terhadap alat/barang *import* cukup tinggi, padahal ada aturan terhadap pembatasan penggunaan barang *import*.

6

Dalam pelaksanaan program SMK PK perlu dilakukan kurasi melalui verifikasi dan validasi lebih mendetail terhadap komponen kegiatan yang akan dilaksanakan terhadap bentuk nilai padanan yang akan diberikan oleh mitra industri, sehingga dibutuhkan waktu lebih lama pada saat proses seleksi sekolah calon penerima program bantuan.

7

Laporan *Tracer Study* terkait perubahan penempatan kerja peserta didik dari lembaga penyelenggara program Pendidikan Kecakapan Kerja (PKK) pada aplikasi e-banper belum di *update* secara menyeluruh.



8

Pada program Pendidikan Kecakapan Wirausaha (PKW), pendampingan rintisan usaha yang dilakukan lembaga belum dilaksanakan secara terstruktur dan terukur, sehingga rintisan usaha peserta didik belum bisa berkembang secara optimal.

9

Pada program ekosistem kemitraan, sebagian wilayah belum bisa melakukan *kick off* karena masih menunggu pendanaan dari LPDP, selain itu ada wilayah yang belum siap melaksanakan *kick off* dikarenakan sulitnya koordinasi antar anggota konsorsium Perguruan Tinggi Vokasi.

10

Pada pelatihan *upskilling* dan *reskilling* peningkatan kompetensi belum optimal karena keterbatasan ketersediaan alat praktek pada balai penyelenggara.

11

Proses Koordinasi internal Perguruan Tinggi Negeri Vokasi (PTNV) yakni antara LPPM dan anggota peneliti belum berjalan optimal sehingga pendaftaran paten di Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) terhambat.

12

Motivasi satker untuk melaksanakan ZIWBK/WBBM masih rendah karena satker belum memahami sepenuhnya manfaat memperoleh predikat ZIWBK/WBBM bagi satker.



Langkah-langkah Antisipasi

1

Menerbitkan Peraturan Direktur Jenderal Pendidikan Vokasi nomor 62/M/2023 tentang IKU Perguruan Tinggi Negeri Vokasi serta mempercepat proses pemutakhiran data capaian IKU tahun 2023 dari berbagai aplikasi sehingga mempercepat proses penetapan SK penerima penambahan BOPTN.

2

Mendorong Perguruan Tinggi Negeri Vokasi untuk meningkatkan proporsi UKT untuk kelompok mahasiswa UKT I dan II serta KIP Kuliah dengan ketentuan minimal 10%.

3

Mendorong satuan pendidikan vokasi untuk mengembangkan jiwa kewirausahaan kepada peserta didik melalui berbagai program, misalnya melalui program SMK Produk Kreatif Kewirausahaan dan program Pendidikan Kecakapan Wirausaha (PKW).

4

Melakukan penyesuaian target sesuai dengan data blokir AA maupun penambahan anggaran BABUN.

5

Mendata satuan kerja yang membutuhkan barang *import* untuk diproses lebih lanjut mendapatkan izin penggunaan barang *import*. Jika tersedia PDN atau TKDN yang memiliki spesifikasi yang sama dengan kebutuhan maka satuan kerja didorong untuk menggunakan PDN maupun TKDN.

6

Verifikasi dan validasi terhadap komponen kegiatan yang akan dilaksanakan terhadap bentuk nilai padanan yang akan diberikan oleh mitra industri dilakukan lebih awal, sehingga proses seleksi sekolah penerima bantuan SMK dapat dilakukan tepat waktu.

7

Berkoordinasi dengan lembaga penyelenggara PKK dan PKW untuk menghimbau lulusan melaporkan setiap perubahan penempatan kerja ke lembaga penyelenggara, sehingga lembaga dapat melakukan pembaharuan data terkait perubahan informasi penempatan kerja lulusan program PKK.



8

Mengoptimalkan peran mitra UMKM, pemerintah daerah dan organisasi mitra dalam melakukan pendampingan rintisan usaha bagi lulusan program PKW.

9

Berkoordinasi secara intensif dengan PTV pengampu dan LPDP untuk mempercepat pencairan dana dan terlaksananya *kick off* di daerah, dan untuk wilayah lainnya yang belum siap melaksanakan *kick off* dan telah melakukan pendampingan secara lebih intensif kepada PTV pengampu di wilayah tersebut.

10

Melakukan desain diklat dari tingkat dasar sampai dengan tingkat lanjutan agar pemanfaatan alat praktek bisa dilakukan bergantian, serta melakukan pengadaan peralatan praktek yang dibutuhkan sehingga setiap peserta mendapat 1 alat praktek.

11

Terkait dengan kendala selama pelaksanaan bimbingan teknis penyusunan dokumen permohonan paten, Memberikan tambahan waktu selama 10 hari untuk para peserta melakukan pendaftaran patennya ke DJKI.

12

Mengusulkan penambahan Indikator terkait ZIWBK/WBBM pada Perjanjian Kinerja Direktur Politeknik Negeri/Akademi Komunitas Negeri untuk meningkatkan motivasi satker untuk menerapkan ZIWBK/WBBM.

BAB I PENDAHULUAN

Gambaran Umum

Tahun 2023 merupakan tahun keempat dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024 serta Rencana Strategis (Renstra) Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi Tahun 2020-2024 yang telah direvisi dan merujuk pada Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Permendikbudristek) Nomor 13 tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 22 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2020-2024. Salah satu prioritas nasional pada pembangunan periode tahun 2020-2024 adalah pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM) sehingga terwujud SDM Indonesia yang berkualitas dan berdaya saing.

Untuk mewujudkan hal tersebut, Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi mendapatkan mandat menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pendidikan vokasi serta pelaksanaan kebijakan di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi dalam rangka melaksanakan tridharma perguruan tinggi. Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi terus melakukan inovasi dan berupaya agar dapat menghasilkan SDM Vokasi yang memiliki kompetensi sesuai kebutuhan di masa yang akan datang, yaitu memiliki kompetensi global dan berperilaku sesuai nilai-nilai Pancasila, selaras dengan Visi dan Misi Presiden dan Wakil Presiden untuk mewujudkan Indonesia maju yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian berlandaskan gotong royong melalui terciptanya pelajar Pancasila yang beriman, bertaqwa kepada Tuhan yang Maha Esa dan berakhlak mulia, berkebhinekaan global, bergotong royong, mandiri, bernalar kritis, dan kreatif.



Dasar Hukum

Sebagai unit kerja di lingkungan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek), Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi berkewajiban menyampaikan laporan kinerja atas penyelenggaraan pendidikan vokasi sebagai pertanggungjawaban kepada masyarakat yang berlandaskan asas akuntabilitas dan dasar hukum sebagai berikut:

- 1 Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah.
- 2 Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
- 3 Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2021 tentang Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi.
- 4 Peraturan Presiden Nomor 68 tahun 2022 tentang Revitalisasi Pendidikan Vokasi dan Pelatihan Vokasi.
- 5 Peraturan Menteri Bappenas Nomor 6 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penyusunan Renstra K/L Tahun 2020-2024.
- 6 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.
- 7 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
- 8 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 26 Tahun 2020 Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
- 9 Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 28 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi.
- 10 Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 13 tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 22 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2020-2024.
- 11 Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 40 tahun 2022 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di lingkungan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi.



Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi

Sesuai Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, Nomor 28 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi, Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi mempunyai tugas dan fungsi sebagai berikut,

Tugas:

Menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pendidikan vokasi serta pelaksanaan kebijakan di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi dalam rangka melaksanakan tridharma perguruan tinggi.

Fungsi:

1. perumusan kebijakan di bidang pendidikan vokasi, pendidikan kejuruan, dan pendidikan keterampilan dan pelatihan kerja.
2. koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi di perguruan tinggi vokasi dalam rangka melaksanakan tridharma perguruan tinggi.
3. penyusunan norma, prosedur, dan kriteria di bidang peserta didik, pembelajaran, sarana prasarana, tata kelola, dan penilaian pada pendidikan kejuruan dan pendidikan keterampilan dan pelatihan kerja.
4. penyusunan norma, prosedur, dan kriteria di bidang pembinaan kompetensi vokasional guru vokasi, pendidik vokasi lainnya, dan tenaga kependidikan vokasi pada pendidikan kejuruan dan pendidikan keterampilan dan pelatihan kerja.
5. pelaksanaan kebijakan di bidang standar dan penjaminan mutu peserta didik, pembelajaran, sarana prasarana, tata kelola, dan penilaian pada pendidikan kejuruan dan pendidikan keterampilan dan pelatihan kerja.
6. pelaksanaan kebijakan di bidang pembelajaran, kemahasiswaan, kelembagaan, dan sumber daya pada pendidikan tinggi vokasi.
7. pelaksanaan kebijakan di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi di perguruan tinggi vokasi dalam rangka melaksanakan tridharma perguruan tinggi.
8. pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan kompetensi vokasional dosen vokasi, pendidik vokasi lainnya, dan tenaga kependidikan vokasi pada pendidikan tinggi vokasi.
9. pelaksanaan fasilitasi di bidang pembinaan kompetensi vokasional guru dan dosen vokasi, pendidik vokasi lainnya, dan tenaga kependidikan vokasi.



10. pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang peserta didik, pembelajaran, sarana prasarana, tata kelola, dan penilaian pendidikan kejuruan dan pendidikan keterampilan dan pelatihan kerja.
11. pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pembinaan kompetensi vokasional guru vokasi, pendidik vokasi lainnya, dan tenaga kependidikan vokasi pada pendidikan kejuruan dan pendidikan keterampilan dan pelatihan kerja.
12. pelaksanaan kemitraan dan penyelarasan pendidikan vokasi dengan dunia usaha dan dunia industri.
13. perumusan pemberian izin penyelenggaraan satuan pendidikan kejuruan dan pendidikan keterampilan dan pelatihan kerja yang diselenggarakan perwakilan negara asing atau lembaga asing serta perguruan tinggi vokasi yang diselenggarakan oleh masyarakat dan perwakilan negara asing atau lembaga asing.
14. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pendidikan vokasi, pendidikan kejuruan, dan pendidikan keterampilan dan pelatihan kerja.
15. pelaksanaan administrasi Direktorat Jenderal.
16. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri.

Sebagai penjabaran Peraturan Presiden tersebut, dan untuk memastikan seluruh tugas dan fungsi terdistribusikan dengan baik, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi menetapkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 45 Tahun 2019 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Permendikbudristek) Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi.

Sesuai Permendikbudristek Nomor 28 Tahun 2021 tersebut, Struktur Organisasi Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi adalah sebagai berikut:



**STRUKTUR ORGANISASI
DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN VOKASI**
(Permendikbudristek Nomor 28 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kemendikbudristek)



Gambar 1.1 Struktur Organisasi Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi

Jumlah pegawai di Lingkungan Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi adalah sebanyak 13.605 orang, yang terbagi atas:

Tabel 1.1 Jumlah Pegawai di Lingkungan Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi

No	Unit Kerja	Jumlah
1	Sekretariat Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi	109
2	Direktorat Sekolah Menengah Kejuruan	98
3	Direktorat Kursus dan Pelatihan	72
4	Direktorat Kemitraan dan Penyelarasan Dunia Usaha dan Dunia Industri	49
5	Direktorat Akademik Pendidikan Tinggi Vokasi	43
6	Direktorat Kelembagaan dan Sumber Daya Pendidikan Tinggi Vokasi	66
7	BBPPMPV/BPPMPV	1.041
8	Politeknik/AKN	12.127
Jumlah		13.605



Isu Strategis

1

Pembangunan ZI WBK/WBBM belum terlaksana di seluruh satker di lingkungan Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi.

2

Target Indikator Kinerja Utama (IKU) Perguruan Tinggi Negeri Vokasi sesuai dengan nomenklatur terbaru yang telah ditetapkan belum sepenuhnya tercapai.

3

Secara absolut, peningkatan mahasiswa pendidikan tinggi vokasi belum terlalu terlihat, namun secara proporsi terdapat peningkatan dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

4

Kebekerjaan lulusan Pendidikan Tinggi Vokasi masih terkendala dengan upah, dimana proporsi lulusan pendidikan vokasi yang memiliki penghasilan di atas 1,2 UMP masih rendah.

5

Pendampingan rintisan usaha pada lulusan kursus dan pelatihan belum dilaksanakan secara terukur dan terencana.

6

Industri 4.0 yang akan dijadikan mitra bagi SMK belum tersebar secara merata di setiap daerah.

7

Kualitas pendidik pada Pendidikan Vokasi belum seimbang dan merata sebarannya, terutama jika dilihat dari sisi latar belakang akademik.

8

Kegiatan penelitian yang mendukung pengembangan teknologi dan inovasi industri belum optimal, serta belum terintegrasinya hasil riset ke dalam kurikulum untuk meningkatkan pemahaman mahasiswa tentang perkembangan terkini.



Peran Strategis

1

Berperan penting dalam mendorong keterlibatan dunia kerja untuk meningkatkan kompetensi peserta didik pendidikan vokasi.

2

Berperan penting dalam menyusun kurikulum dan pelatihan pada pendidikan vokasi yang berdampak pada pengembangan serta peningkatan technical skills, soft skills, budaya kerja dan karakter lulusannya.

3

Berperan penting dalam mendorong pengembangan teaching factory dan teaching industry untuk mendukung pembelajaran berbasis project, riset terapan dan inovasi, serta untuk mengoptimalkan kualitas pembelajaran kewirausahaan pada pendidikan vokasi serta meningkatkan kemitraan satuan pendidikan dengan dunia usaha dan dunia industri.

4

Berperan penting dalam memfasilitasi praktik kerja lapangan dan/atau project work peserta didik pada pendidikan vokasi.

5

Berperan penting dalam pengembangan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan pada pendidikan vokasi dalam rangka meningkatkan kualitas lulusan.

6

Berperan penting dalam menggerakkan dukungan dunia kerja terhadap pendidikan dan pelatihan vokasi melalui koordinasi antar kementerian/lembaga terkait, pemerintah daerah dan asosiasi industri.

7

Berperan penting dalam mengoptimalkan pemanfaatan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) sebagai acuan dalam pengembangan kompetensi dan pelaksanaan Rekognisi Pembelajaran Lampau (RPL) dalam pendidikan dan pelatihan vokasi.

8

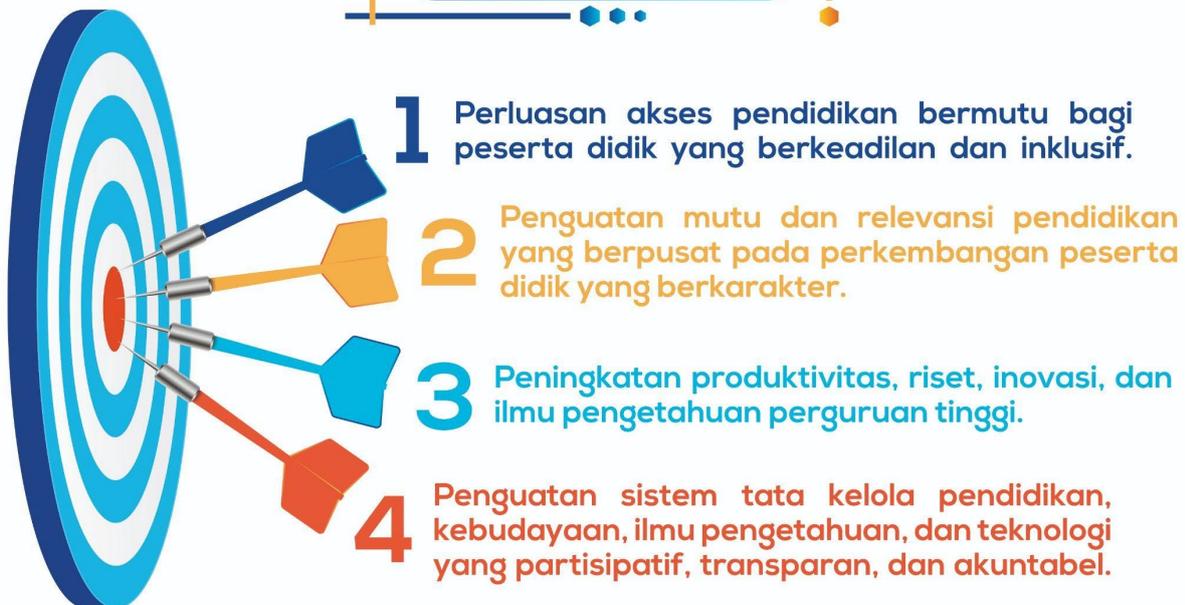
Berperan penting meningkatkan Kompetensi Pendidik pada Pendidikan Tinggi Vokasi melalui pelatihan dan sertifikasi kompetensi dosen.



BAB II PERENCANAAN KINERJA



Tujuan Strategis





Rencana Kinerja Jangka Menengah

Pada tahun 2023, Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi melakukan penyusunan revisi renstra 2020-2024 yang merujuk pada Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 22 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2020-2024. Tujuan penyusunan revisi Renstra Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi adalah sebagai acuan dalam mengoperasionalkan rencana kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi. Melalui revisi renstra 2020-2024, Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi melakukan penyesuaian Rencana Kinerja sebagai berikut:

Rencana Kinerja Renstra Revisi

Tabel 2.1 Sasaran Program/Indikator Kinerja Program

Sasaran Program/Indikator Kinerja Program		Satuan	Baseline 2020	Target		
				2022	2023	2024
SP 1 Meningkatkan partisipasi pendidikan tinggi						
IKP 1.1	Persentase peningkatan mahasiswa perguruan tinggi vokasi	%	7,93	12,95	15,47	17,98
SP 2 Meningkatkan mutu dan relevansi lulusan pendidikan dan pelatihan vokasi sesuai dengan kebutuhan dunia kerja						
IKP 2.1	Persentase lulusan SMK yang bekerja/berwirausaha dalam satu tahun setelah kelulusan dengan gaji/pendapatan minimum sebesar 1x UMP	%	33,57	39,18	42,18	46,18
IKP 2.2	Persentase lulusan Perguruan Tinggi Penyelenggara Pendidikan Vokasi yang bekerja/berwirausaha dalam satu tahun setelah kelulusan dengan gaji/pendapatan minimum sebesar 1,2x UMP	%	31,15	44,37	47,37	50,37
IKP 2.3	Persentase lulusan kursus dan pelatihan yang memiliki pekerjaan atau berwirausaha	%	46,74	53,37	56,69	60
IKP 2.4	Persentase satuan pendidikan yang menerapkan pembelajaran berkualitas, penjaminan mutu, dan kerja sama dengan Dunia Kerja	%	12,31	50	55	60
SP 3 Meningkatkan riset, inovasi dan ilmu pengetahuan dari PT Vokasi						
IKP 3.1	Jumlah keluaran penelitian PT Vokasi yang diterapkan oleh masyarakat	Karya	2.270	2.506	2.611	2.722
SP 4 Meningkatkan akuntabilitas layanan dan pengelolaan anggaran pendidikan, kebudayaan, riset, dan teknologi						
IKP 4.1	Predikat SAKIP Ditjen Pendidikan Vokasi	Predikat	A	A	A	A
SP 5 Meningkatnya pelaksanaan reformasi birokrasi Kemendikbudristek						
IKP 5.1	Jumlah Satker di Ditjen Pendidikan vokasi mendapatkan predikat ZI-WBK/WBBM)	Satker	7	16	26	46



Perjanjian Kinerja Tahun 2023

Perjanjian Kinerja Awal

Tabel 2.2 Perjanjian Kinerja Awal

No	Sasaran Program	Indikator Kinerja Program	Satuan	Target Perjanjian Kinerja Tahun 2023
1	Meningkatnya partisipasi pendidikan tinggi	1 Persentase peningkatan mahasiswa perguruan tinggi vokasi	%	15,47
2	Meningkatnya mutu dan relevansi lulusan pendidikan dan pelatihan vokasi sesuai dengan kebutuhan dunia kerja	1 Persentase lulusan SMK yang bekerja / berwirausaha dalam satu tahun setelah kelulusan dengan gaji/pendapatan minimum sebesar 1x UMP	%	42,18
		2 Persentase lulusan Perguruan Tinggi Penyelenggara Pendidikan Vokasi yang bekerja/berwirausaha dalam satu tahun setelah kelulusan dengan gaji/pendapatan minimum sebesar 1,2x UMP	%	47,37
		3 Persentase lulusan kursus dan pelatihan yang memiliki pekerjaan atau berwirausaha	%	56,69
		4 Persentase satuan pendidikan yang menerapkan pembelajaran berkualitas, penjaminan mutu, dan kerja sama dengan Dunia Kerja	%	55
3	Meningkatnya riset, inovasi dan ilmu pengetahuan dari PT Vokasi	1 Jumlah keluaran penelitian PT Vokasi yang diterapkan oleh masyarakat	Karya	2.611
4	Meningkatnya akuntabilitas layanan dan pengelolaan anggaran pendidikan, kebudayaan, riset, dan teknologi	1 Predikat SAKIP Ditjen Pendidikan Vokasi	Predikat	A
5	Meningkatnya pelaksanaan reformasi birokrasi Kemendikbudristek	1 Jumlah Satker di Ditjen Pendidikan vokasi mendapatkann predikat ZI-WBK/WBBM)	Satker	26

Alokasi Anggaran Perjanjian Kinerja Awal

Tabel 2.3 Alokasi Anggaran Perjanjian Kinerja Awal

No	Kode	Nama Kegiatan	Alokasi (Rp)
1	4261	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen Pendidikan Vokasi	2.600.978.155.000
2	4262	Pembinaan Sekolah Menengah Kejuruan	899.078.355.000
3	4264	Pembinaan Kemitraan dan Penyelarasan Dunia Usaha dan Dunia Industri	30.924.750.000
4	4278	Pembinaan Kursus dan Pelatihan	127.996.698.000
5	4466	Penyediaan Dana Bantuan Operasional Perguruan Tinggi Negeri Vokasi	353.758.676.000
6	4467	Peningkatan Kualitas dan Kapasitas Perguruan Tinggi Vokasi	2.016.366.133.000
7	4468	Pendidikan dan Pelatihan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Vokasi	291.109.877.000
8	6700	Pembinaan Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Pendidikan Tinggi Vokasi	218.840.552.000
9	6701	Pengembangan Kelembagaan dan Peningkatan Kualitas Sumber Daya Pendidikan Tinggi Vokasi	107.956.616.000
TOTAL			6.647.009.812.000



Perjanjian Kinerja Direktur Jenderal Pendidikan Vokasi tahun 2023 disusun pada awal tahun dengan alokasi anggaran sebesar Rp6.647.009.812.000. Namun pada akhir tahun dilakukan revisi perjanjian kinerja yang disebabkan adanya pergeseran alokasi anggaran menjadi Rp7.333.950.199.000. Pergeseran anggaran tersebut bersumber dari penambahan BA BUN dan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP), serta pengurangan anggaran karena dikeluarkannya blokir AA dari perhitungan pagu anggaran pada akhir tahun 2023. Penambahan anggaran tersebut digunakan untuk mendukung program prioritas nasional, antara lain pembinaan Sekolah Menengah Kejuruan pada program SMK yang dikembangkan menjadi SMK Pusat Keunggulan, pembinaan Kursus dan Pelatihan pada program PKK dan PKW, peningkatan kualitas dan kapasitas Perguruan Tinggi Vokasi pada program penelitian, pengabdian masyarakat, layanan pembelajaran, layanan pendidikan, sarana dan prasarana, termasuk pendidikan dan pelatihan pendidik dan tenaga kependidikan vokasi pada program *upskilling* dan *reskilling* untuk guru kejuruan, kepala sekolah, dosen dan instruktur kursus.

Terdapat perbedaan pagu anggaran pada perjanjian kinerja revisi tahun 2023 dengan pagu definitif pada akhir masa pelaporan 2023 karena beberapa politeknik dan AKN yang menerima hibah dari pemerintah daerah. Penambahan anggaran ini sebesar Rp686.940.387.000, baru masuk ke pagu Ditjen Pendidikan Vokasi pada bulan Desember 2023.

Perjanjian Kinerja Revisi

Tabel 2.4 Perjanjian Kinerja Revisi

No	Sasaran Program	Indikator Kinerja Program	Satuan	Target Perjanjian Kinerja Tahun 2023
1	Meningkatnya partisipasi pendidikan tinggi	1 Persentase peningkatan mahasiswa perguruan tinggi vokasi	%	15.47
2	Meningkatnya mutu dan relevansi lulusan pendidikan dan pelatihan vokasi sesuai dengan kebutuhan dunia kerja	1 Persentase lulusan SMK yang bekerja / berwirausaha dalam satu tahun setelah kelulusan dengan gaji/pendapatan minimum sebesar 1x UMP	%	42.18
		2 Persentase lulusan Perguruan Tinggi Penyelenggara Pendidikan Vokasi yang bekerja/berwirausaha dalam satu tahun setelah kelulusan dengan gaji/pendapatan minimum sebesar 1,2x UMP	%	47.37
		3 Persentase lulusan kursus dan pelatihan yang memiliki pekerjaan atau berwirausaha	%	56.69
		4 Persentase satuan pendidikan yang menerapkan pembelajaran berkualitas, penjaminan mutu, dan kerja sama dengan Dunia Kerja	%	55
3	Meningkatnya riset, inovasi dan ilmu pengetahuan dari PT Vokasi	1 Jumlah keluaran penelitian PT Vokasi yang diterapkan oleh masyarakat	Karya	2.611
4	Meningkatnya akuntabilitas layanan dan pengelolaan anggaran pendidikan, kebudayaan, riset, dan teknologi	1 Predikat SAKIP Ditjen Pendidikan Vokasi	Predikat	A
5	Meningkatnya pelaksanaan reformasi birokrasi Kemendikbudristek	1 Jumlah Satker di Ditjen Pendidikan vokasi mendapatkann predikat ZI-WBK/WBBM)	Satker	26



Alokasi Anggaran Perjanjian Kinerja Revisi

Tabel 2.5 Alokasi Anggaran Perjanjian Kinerja Revisi

No	Kode	Nama Kegiatan	Alokasi (Rp)
1	4261	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen Pendidikan Vokasi	2.615.698.192.000
2	4262	Pembinaan Sekolah Menengah Kejuruan	1.202.906.976.000
3	4264	Pembinaan Kemitraan dan Penyelarasan Dunia Usaha dan Dunia Industri	24.683.642.000
4	4278	Pembinaan Kursus dan Pelatihan	317.093.268.000
5	4466	Penyediaan Dana Bantuan Operasional Perguruan Tinggi Negeri Vokasi	353.758.676.000
6	4467	Peningkatan Kualitas dan Kapasitas Perguruan Tinggi Vokasi	2.242.375.288.000
7	4468	Pendidikan dan Pelatihan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Vokasi	290.160.076.000
8	6700	Pembinaan Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Pendidikan Tinggi Vokasi	172.075.416.000
9	6701	Pengembangan Kelembagaan dan Peningkatan Kualitas Sumber Daya Pendidikan Tinggi Vokasi	115.252.665.000
TOTAL			7.333.950.199.000

Program Prioritas

Pada tahun 2023 terdapat 21 Program Prioritas Nasional yang didukung oleh Ditjen Pendidikan Vokasi. Program Prioritas Nasional ini dilaksanakan di semua Direktorat, BBPPMPV/BPPMPV, serta Politeknik dan Akademi Komunitas Negeri. Adapun target dan realisasi dari masing-masing program prioritas adalah sebagai berikut:



Tabel 2.6 Program Prioritas

No	Nama Kegiatan	Satuan	Target	Realisasi	%
1	Siswa SMK yang Tersertifikasi Terhadap Kompetensi yang Relevan dengan Kebutuhan Dunia Kerja	Orang	46.960	46.960	100,00
2	SMK yang Dikembangkan Menjadi Pusat Keunggulan	Lembaga	1.851	1.851	100,00
3	SMK yang Melaksanakan Program UKS	Lembaga	34	34	100,00
4	SMK yang Mengembangkan Proyek Kreatif dan Kewirausahaan	Lembaga	240	240	100,00
5	SMK yang Dikembangkan Berbasis Industri 4.0	Lembaga	31	80	258,06
6	Dunia Usaha/Dunia Industri yang menerapkan kerjasama dengan Satuan Pendidikan Vokasi	Kesepakatan	200	293	146,5
7	Lembaga Kursus dan Pelatihan Berstandar Industri	Lembaga	1.020	1.261	123,63
8	Anak Usia Sekolah tidak Sekolah memperoleh Pendidikan Kecakapan Kerja	Orang	31.790	43.337	136,32
9	Anak Usia Sekolah tidak Sekolah memperoleh Pendidikan Kecakapan Wirausaha	Orang	23.630	26.135	110,60
10	Sarana Perguruan Tinggi Vokasi yang Direvitalisasi (SBSN)	Paket	29	53	182,76
11	Gedung Perguruan Tinggi Vokasi yang Direvitalisasi (SBSN)	unit	8	19	237,50
12	Inovasi model pembelajaran vokasi mengacu pada dunia kerja	Kajian	14	25	178,57
13	Satuan pendidikan vokasi yang bermitra dengan Dunia kerja	Kesepakatan	105	157	149,52
14	Penjaminan Mutu Satuan Pendidikan Vokasi	Lembaga	3.048	6.794	222,90
15	Guru kejuruan yang mendapatkan pelatihan kurikulum yang diselaraskan dengan kebutuhan dunia kerja	Orang	3.144	5.735	182,41
16	Guru Kejuruan dan Kepala Sekolah yang mengikuti Up-skilling dan Reskilling Berstandar Industri	Orang	9.684	14.639	151,17
17	Instruktur kursus yang mendapatkan pelatihan kompetensi industri bidang keahlian teknologi terapan	Orang	270	388	143,70
18	Program Studi Vokasi yang Menerapkan Kurikulum Link and Match dengan Dunia Kerja	Lembaga	12	35	291,67
19	Mahasiswa Pendidikan Tinggi Vokasi Yang Mengikuti Uji Kompetensi Profesi	Orang	7.500	4.570	60,93
20	Pendidikan Tinggi Vokasi yang menerapkan Penguatan Mutu Berstandar Industri	Lembaga	141	256	181,56
21	SDM Pendidikan Tinggi Vokasi yang mengikuti Peningkatan Kompetensi	Orang	380	784	206,32

Sumber: molk.kemdikbud.go.id, 30 Januari 2024



BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

Pengukuran Kinerja

Sesuai Perjanjian Kinerja Tahun 2023, Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi telah melakukan pengukuran kinerja dengan capaian sebagai berikut,

Tabel 3.1 Pengukuran Kinerja

No	Sasaran Program	Indikator Kinerja Program	Satuan	Target Perjanjian Kinerja Tahun 2023	Realisasi 2023	%
1	Meningkatnya partisipasi pendidikan tinggi	1.1 Persentase peningkatan mahasiswa perguruan tinggi vokasi	%	15,47	14,46	93,47
2	Meningkatnya mutu dan relevansi lulusan pendidikan dan pelatihan vokasi sesuai dengan kebutuhan dunia kerja	2.1 Persentase lulusan SMK yang bekerja / berwirausaha dalam satu tahun setelah kelulusan dengan gaji/pendapatan minimum sebesar 1x UMP	%	42,18	46,28	109,72
		2.2 Persentase lulusan Perguruan Tinggi Penyelenggara Pendidikan Vokasi yang bekerja/berwirausaha dalam satu tahun setelah kelulusan dengan gaji/pendapatan minimum sebesar 1,2x UMP	%	47,37	42,63	89,99
		2.3 Persentase lulusan kursus dan pelatihan yang memiliki pekerjaan atau berwirausaha	%	56,69	66,61	117,50
		2.4 Persentase satuan pendidikan yang menerapkan pembelajaran berkualitas, penjaminan mutu, dan kerja sama dengan Dunia Kerja	%	55	62,34	113,34
3	Meningkatnya riset, inovasi dan ilmu pengetahuan dari PT Vokasi	3.1 Jumlah keluaran penelitian PT Vokasi yang diterapkan oleh masyarakat	Karya	2.611	3.157	120,9
4	Meningkatnya akuntabilitas layanan dan pengelolaan anggaran pendidikan, kebudayaan, riset, dan teknologi	4.1 Predikat SAKIP Ditjen Pendidikan Vokasi	Predikat	A	A	100
5	Meningkatnya pelaksanaan reformasi birokrasi Kemendikbudristek	5.1 Jumlah Satker di Ditjen Pendidikan vokasi mendapatkann predikat ZI-WBK/WBBM)	Satker	26	10	38,46

Capaian Kinerja

Pada Perjanjian Kinerja Tahun 2023, Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi menetapkan 5 (lima) Sasaran Program (SP) dengan 8 (delapan) Indikator Kinerja Program (IKP). Berikut ketercapaian SP dan IKP tersebut selama tahun 2023.

Sasaran Program 1. Meningkatnya partisipasi pendidikan tinggi

Berdasarkan hasil Susenas tahun 2023, APK Perguruan Tinggi (19-23 tahun) adalah 31,45%, terdapat peningkatan 0,29 poin dibandingkan dengan capaian APK tahun 2022 yaitu 31,16. Angka tersebut masih rendah jika dibandingkan dengan target renstra Kemendikbudristek pada tahun 2023 yaitu 36,64%.

Keterbatasan ekonomi masih menjadi isu dalam dunia pendidikan tinggi. Berdasarkan hasil susenas dari tahun 2021 hingga 2023, capaian APK



PT dari tahun ke tahun paling rendah pada kuintil 1. Pada tahun 2023 capaian APK PT pada rumah tangga kelompok pengeluaran terendah (kuintil 1) hanya sebesar 17,51 persen. Capaian tersebut sangat rendah jika dibandingkan dengan kelompok dengan pengeluaran tertinggi (kuintil 5), dimana pada kelompok ini lebih dari separuh penduduk berusia 19-23 tahun sedang bersekolah di pendidikan tinggi (52,66 persen). Angka ini menunjukkan adanya disparitas yang cukup tinggi antara rumah tangga berpendapatan sangat tinggi dan berpendapatan sangat rendah dalam mengakses pendidikan tinggi.

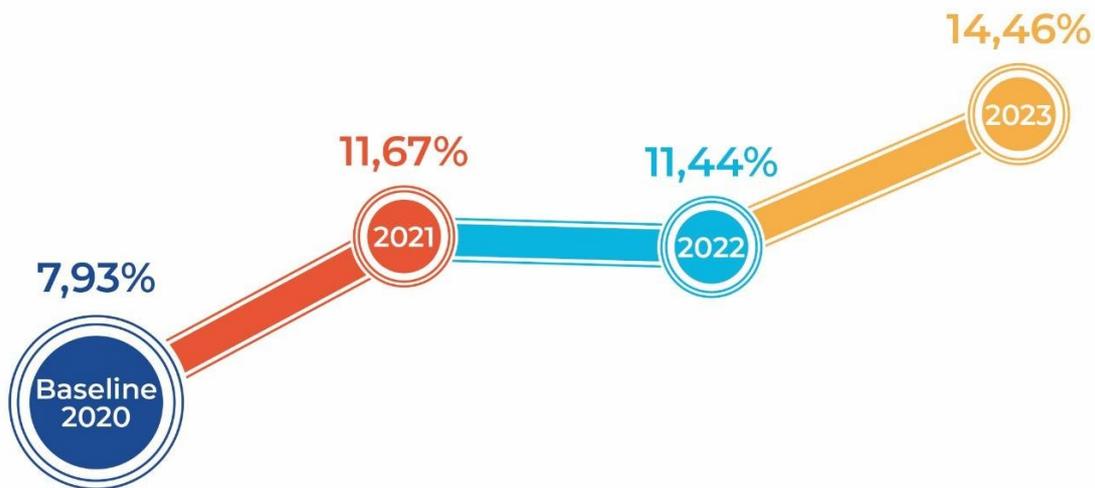
Tabel 3.2 Angka Partisipasi Kasar Perguruan Tinggi (APK PT) berdasarkan kelompok pengeluaran

Kelompok Pengeluaran	2021	2022	2023
Kuintil 1	15,96	19,46	17,51
Kuintil 2	19,86	23,17	22,84
Kuintil 3	24,98	27,18	26,95
Kuintil 4	32,27	32,68	33,62
Kuintil 5	55,67	51,33	52,66

Sumber : www.bps.go.id, Susenas maret 2023

Selain itu, juga terdapat disparitas APK PT berdasarkan tempat tinggal, dimana APK PT (19-23 tahun) untuk masyarakat yang tinggal dipertanian lebih tinggi dibandingkan dengan masyarakat yang tinggal di perdesaan. APK PT pertanian adalah 37,44%, sedangkan APK PT perdesaan hanya 22,04%. Kondisi tersebut tentunya juga akan berpengaruh terhadap partisipasi masyarakat pada perguruan tinggi vokasi.

Gambar di bawah ini menunjukkan proporsi mahasiswa perguruan tinggi vokasi dari tahun ke tahun jika dibandingkan dengan jumlah mahasiswa keseluruhan. Secara keseluruhan proporsi mahasiswa perguruan tinggi vokasi mengalami peningkatan dimana pada tahun 2020 proporsi mahasiswa pendidikan tinggi vokasi adalah 7,93% dan meningkat menjadi 14,46% pada tahun 2023.



Gambar 3.1 Grafik Tren Peningkatan Jumlah Mahasiswa Pendidikan Vokasi Tahun 2020-2023

IKP 1.1 Persentase peningkatan mahasiswa perguruan tinggi vokasi

Peningkatan mahasiswa perguruan tinggi vokasi menunjukkan upaya serius dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia sebagai pelaku utama dalam pembangunan. Semakin banyak mahasiswa pendidikan tinggi vokasi memberikan dampak semakin meningkatnya kualitas kehidupan bangsa dan masyarakat dimasa yang akan datang seiring laju pertumbuhan penduduk usia produktif yang mendominasi peta demografi Indonesia, disamping tuntutan pasar kerja dan kebutuhan industri.

Mahasiswa perguruan tinggi vokasi adalah peserta didik pada jenjang Pendidikan Tinggi Vokasi D1 sampai dengan S3 Terapan baik yang berasal dari Politeknik, Akademi Komunitas dan Universitas/Institut/Sekolah Tinggi/Akademi (UNISTA).

Formula perhitungan untuk IKP 1.1 adalah menghitung jumlah total mahasiswa perguruan tinggi vokasi dibagi jumlah total mahasiswa perguruan tinggi kemudian dikalikan 100%. Satuan yang digunakan adalah % (persen) dengan metode perhitungan kumulatif.

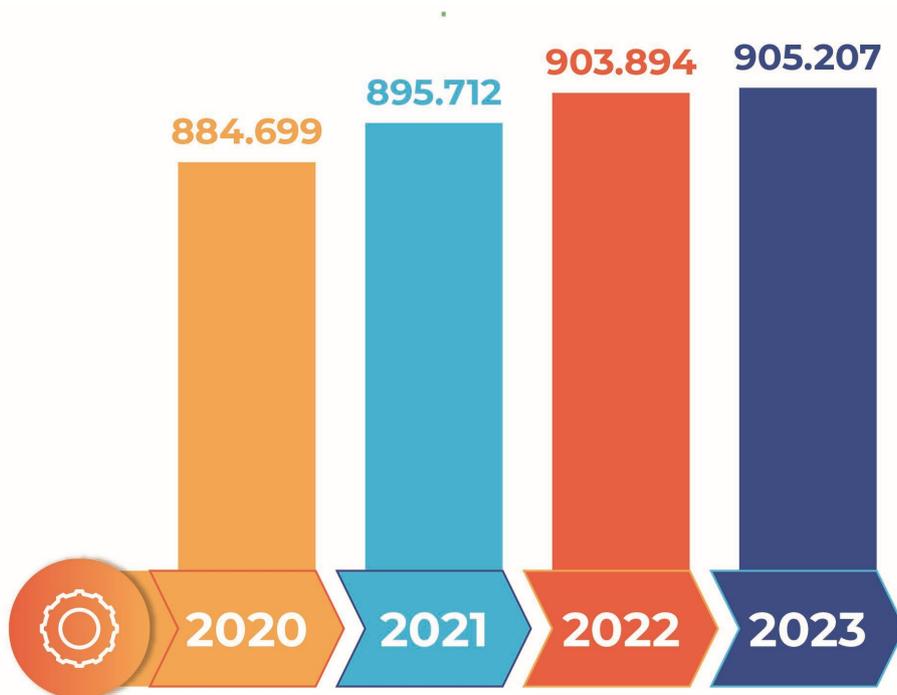
$$\text{Realisasi IKP} = \frac{\text{jumlah total mahasiswa pendidikan tinggi vokasi}}{\text{jumlah total mahasiswa pendidikan tinggi}} \times 100\%$$

Indikator Kinerja Program	Capaian 2022	Tahun 2023			Target Akhir Renstra 2024	% Realisasi terhadap Target Akhir Renstra 2024
		Target	Realisasi	%		
Persentase peningkatan mahasiswa perguruan tinggi vokasi	11,44	15,47	14,46	93,47	17,98	80,42



Capaian IKP 1.1 pada tahun 2023 diperoleh dari perhitungan jumlah total mahasiswa perguruan tinggi vokasi, yaitu sebanyak 905.207 orang dibagi dengan jumlah total mahasiswa perguruan tinggi sebanyak 6.620.076 orang, dan dikalikan 100% sehingga mendapatkan capaian sebesar 14,46%. Jika dibandingkan dengan capaian tahun 2022 yaitu sebesar 11,44%, capaian ini mengalami peningkatan sebesar 3,02%. Capaian ini belum memenuhi target yang ditetapkan pada tahun 2023 yaitu sebesar 15,47%, atau baru mencapai persentase sebesar 93,47%.

Adapun target akhir renstra tahun 2024 sebesar 17,98%, sehingga jika dibandingkan dengan target akhir renstra maka persentase capaian tahun 2023 sebesar 80,42%. Dengan demikian tentunya diperlukan inovasi dan strategi untuk menuntaskan kekurangan yang belum tercapai pada tahun 2023, maupun untuk mencapai target akhir renstra pada tahun 2024.



Gambar 3.2 Trend kenaikan jumlah mahasiswa pada Perguruan Tinggi Vokasi (orang)



Gambar 3.3 Grafik perbandingan capaian 2022, target 2023, dan capaian 2023.

Dokumentasi Kegiatan



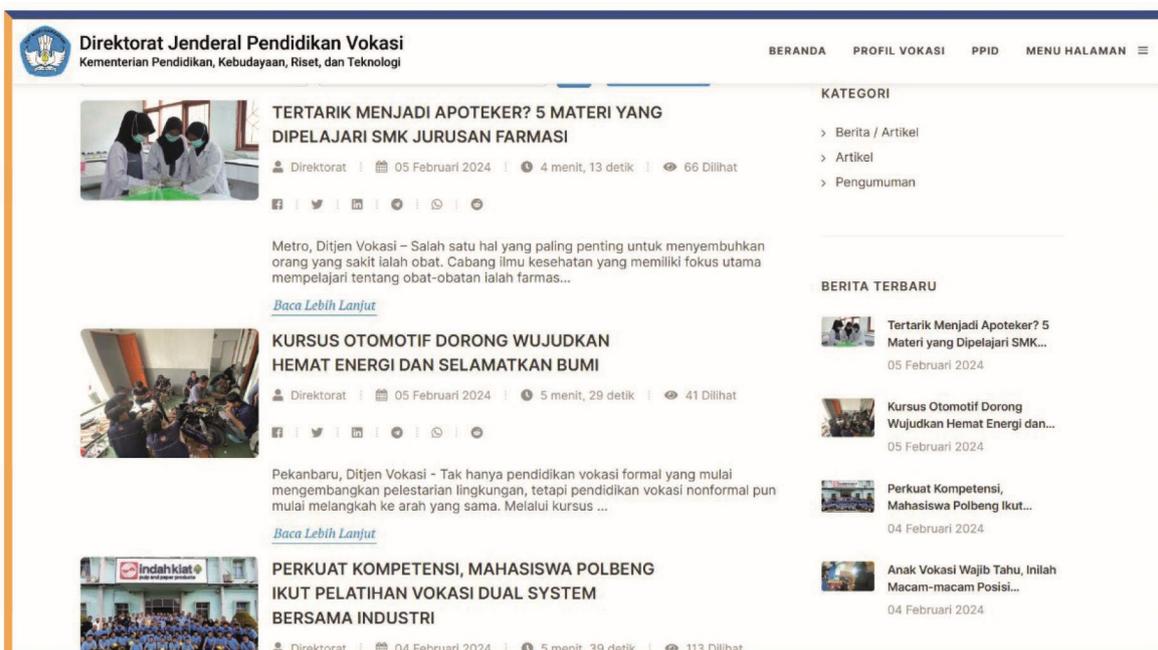
Gambar 3.4 Gedung Kuliah Terpadu Politeknik Negeri Banyuwangi dan Proses Pembangunan Gedung Belajar di Politeknik Maritim Negeri Indonesia sumber SBSN 2023



Gambar 3.5 Peralatan Pratikum Prodi Teknik Mesin di Politeknik Negeri Balikpapan sumber SBSN 2023



Gambar 3.6 PSDKU Politeknik Negeri Malang di Pamekasan



Gambar 3.7 Website Ditjen Pendidikan Vokasi yang mengupdate hasil dari produk vokasi

Program/kegiatan yang dilaksanakan dalam upaya pencapaian target indikator kinerja yang ditetapkan antara lain:

1. Program Biaya Operasional Perguruan Tinggi Negeri (BOPTN) diberikan kepada Politeknik dan Akademi Komunitas Negeri merupakan bantuan pemerintah yang bersumber dari APBN dan diberikan kepada Perguruan Tinggi Negeri untuk membiayai kekurangan biaya



operasional sebagai akibat pembatasan sumbangan pendidikan pada perguruan tinggi. Sesuai Permenristekdikti No 12 Tahun 2019 tentang BOPTN pasal 2 dimana penggunaan anggaran BOPTN untuk penelitian dan Program Kreativitas Mahasiswa (PKM) minimal sebesar 30% dari anggaran BOPTN dan untuk non penelitian maksimal 70% dari anggaran BOPTN.

2. Penambahan BOPTN kepada 23 Perguruan Tinggi Negeri Vokasi yang mencapai target IKU minimal sesuai dengan Perdirjen 62 tahun 2023 tentang Indikator Kinerja Utama Perguruan Tinggi Vokasi.
3. Dalam rangka mendukung peningkatan sarana dan prasarana Perguruan Tinggi Negeri Vokasi diberikan bantuan SBSN di tahun 2023 kepada 8 Perguruan Tinggi Negeri Vokasi, yaitu Politeknik Negeri Semarang, Politeknik Negeri Banyuwangi, Politeknik Elektronika Negeri Surabaya, Politeknik Manufaktur Negeri Bangka Belitung, Politeknik Negeri Ujung Pandang, Politeknik Negeri Samarinda, Politeknik Maritim Negeri Indonesia, dan Politeknik Negeri Balikpapan.
4. Pendirian program studi baru di tahun 2023 sebanyak 129 program studi di Politeknik dan Akademi baik negeri maupun swasta di seluruh Indonesia. Beberapa diantaranya yaitu pendirian program studi D4 Teknologi Rekayasa Konstruksi Jalan dan Jembatan dan D4 Destinasi Pariwisata di Politeknik Negeri Banyuwangi, D4 Pengelolaan Usaha Rekreasi dan Pengolahan dan Penyimpanan Hasil Perikanan pada Politeknik Negeri Pontianak.
5. Prodi Diluar Domisili (PDD) atau Program Studi Diluar Kampus Utama (PSDKU) pada beberapa politeknik negeri, seperti Politeknik Negeri Malang yang memiliki PSDKU yang terdapat di Lumajang, Kediri, dan Pamekasan.
6. Melakukan analisis terhadap kelompok UKT mahasiswa yang didapat kelompok UKT I dan II sebesar 7,15%, dan pemberian KIP kepada mahasiswa vokasi sebesar 21,16%.
7. Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi mempublikasikan hasil produk dan prestasi yang diraih oleh insan vokasi pada laman resmi dan media sosial untuk menarik perhatian peserta didik agar memilih melanjutkan pendidikannya ke vokasi.
8. Memberikan hibah untuk akreditasi kepada Perguruan Tinggi Swasta Vokasi.

Faktor penyebab kegagalan dalam pencapaian target indikator kinerja antara lain:

1. Berdasarkan hasil Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) yang dilakukan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) tingkat partisipasi



masyarakat pada Pendidikan Tinggi masih rendah untuk kelompok masyarakat pengeluaran terendah (kuintil 1, 2 dan 3), hal ini tentu saja sangat berpengaruh terhadap tingkat partisipasi masyarakat pada pendidikan tinggi vokasi.

2. Pendidikan Vokasi belum menjadi pilihan utama karena masih minimnya informasi terkait pendidikan vokasi pada masyarakat, terutama pada kalangan insan pendidikan tingkat menengah.
3. Adanya asumsi masyarakat bahwa Pendidikan Tinggi adalah barang mewah, sehingga tidak semua orang bisa menjangkaunya dan sebagian besar masyarakat memilih untuk langsung masuk dunia kerja setelah lulus pendidikan menengah.
4. Masih terbatasnya pemberian beasiswa bagi mahasiswa Perguruan Tinggi Vokasi.

Hambatan/kendala yang dihadapi dalam upaya pencapaian target antara lain:

1. Adanya blokir anggaran pada beberapa kegiatan sehingga menyebabkan keterlambatan pelaksanaan program.
2. Masa transisi dari Kepmendikbud Nomor 3 tahun 2021 ke Kepmendikbudristek Nomor 210 tahun 2023 tentang Indikator Kinerja Utama Perguruan Tinggi Negeri dan Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi menyebabkan adanya keterbatasan waktu dalam penyaluran dan pelaksanaan insentif BOPTN pada Perguruan Tinggi Negeri.
3. Pada pelaksanaan SBSN, perencanaan dan pengajuan untuk proses tender membutuhkan waktu yang cukup panjang sehingga memperlambat proses lelang.
4. Adanya peraturan terkait penggunaan TKDN, sehingga membutuhkan waktu untuk melakukan identifikasi Produk Dalam Negeri (PDN) dan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) sesuai dengan spesifikasi yang sudah ditetapkan, dan dibutuhkan waktu untuk memproses kembali.
5. Pada Permendikbud Nomor 25 tahun 2020 tidak terdapat ketentuan yang menyebutkan proporsi pembagian untuk kelompok mahasiswa UKT I dan II serta KIP Kuliah.
6. Sarana dan prasarana belum memadai pada PSDKU baik kelengkapan gedung belajar maupun sarana pembelajaran.

Langkah antisipasi yang diambil untuk mengatasi permasalahan/hambatan yang dihadapi agar target indikator kinerja dapat tercapai antara lain:

1. Mengupayakan untuk proses buka blokir dengan melengkapi dokumen pendukung seperti juknis dan dokumen lainnya.



2. Menerbitkan Perdirjen Vokasi terkait IKU Perguruan Tinggi Negeri Vokasi sehingga mempercepat proses penetapan SK penerima penambahan BOPTN.
3. Mengembangkan *Dashboard* SIDAKIN untuk menghitung capaian IKU perguruan tinggi vokasi sesuai dengan Kepmendikbudristek Nomor 210 Tahun 2023 dan Perdirjen Nomor 62 Tahun 2023.
4. Mempercepat perencanaan dan pengajuan proses tender agar proses lelang tepat waktu.
5. Mendata satuan kerja yang membutuhkan barang import untuk diproses lebih lanjut mendapatkan izin penggunaan barang import. Jika tersedia PDN atau TKDN yang memiliki spesifikasi yang sama dengan kebutuhan maka satuan kerja didorong untuk menggunakan PDN maupun TKDN.
6. Mendorong Perguruan Tinggi Negeri Vokasi untuk meningkatkan proporsi UKT I dan UKT II dengan ketentuan minimal 10%.
7. Mengupayakan penambahan biaya operasional khusus untuk PSDKU.

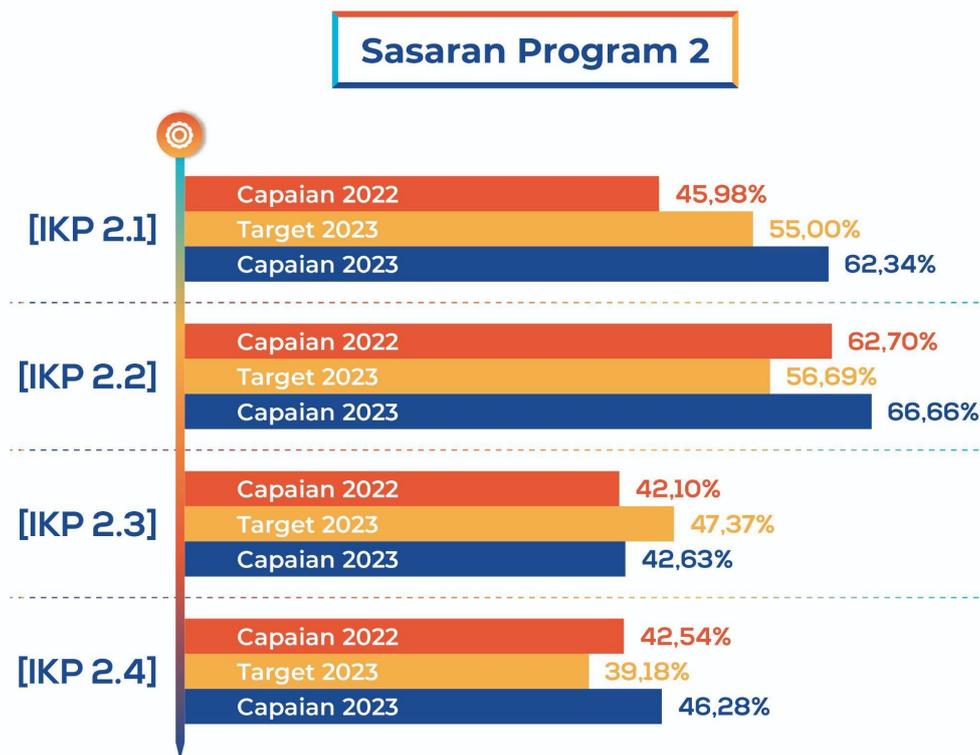
Strategi yang dilakukan agar target indikator kinerja dapat tercapai antara lain:

1. Meningkatkan sarana dan prasarana serta aktivitas pada perguruan tinggi vokasi, dengan penyediaan dana Bantuan Operasional Perguruan Tinggi Negeri (BOPTN) Vokasi.
2. Meningkatkan pemerataan kesempatan belajar pada perguruan tinggi vokasi, dengan meningkatkan jumlah mahasiswa DI-DIV/Sarjana Terapan di PTN Vokasi pada kelompok UKT I dan II.
3. Memberikan anggaran tambahan kepada Perguruan Tinggi Negeri Vokasi berupa insentif penyediaan dana Bantuan Operasional Perguruan Tinggi Negeri Vokasi bagi Politeknik dan Akademi Komunitas Negeri yang mencapai minimal 2 IKU.
4. Mengoptimalkan pemanfaatan gedung kuliah yang dibangun melalui proyek SBSN untuk meningkatkan jumlah mahasiswa.
5. Memperluas informasi/melakukan sosialisasi terkait pendidikan tinggi vokasi kepada masyarakat terutama pada kalangan insan pendidikan tingkat menengah, untuk meningkatkan minat terhadap pendidikan tinggi vokasi.
6. Menambah kuota pemberian beasiswa untuk mahasiswa Perguruan Tinggi Vokasi.
7. Mengusulkan dan memetakan anggaran khusus PSDKU terutama untuk penyediaan sarana dan prasarana.



Sasaran Program 2. Meningkatnya mutu dan relevansi lulusan pendidikan dan pelatihan vokasi sesuai dengan kebutuhan dunia kerja

Sampai dengan tahun 2023, peningkatan mutu dan relevansi lulusan pendidikan dan pelatihan vokasi sesuai dengan kebutuhan kerja ada yang mengalami penurunan dan ada yang mengalami peningkatan dibandingkan dengan capaian tahun 2022, sebagaimana terlihat pada grafik berikut,



Gambar 3.8 Grafik Perbandingan capaian 2021, target 2022 dan capaian 2022 pada seluruh IKP di Sasaran Program 2

Peningkatan capaian ini dipengaruhi oleh strategi yang dilakukan diantaranya: 1) Pelaksanaan SMK pusat keunggulan yang didorong untuk memberikan imbas praktik baiknya kepada SMK di sekitarnya; 2) Sertifikasi kompetensi kepada siswa SMK; 3) SMK yang mendukung industri 4.0 dengan tujuan untuk menciptakan lulusan dengan kompetensi keahlian sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan teknologi terkini; 4) SMK mendukung produk kreatif dan kewirausahaan yang bertujuan untuk menciptakan lulusan SMK dengan kemampuan *entrepreneurship*; 5) Pendidikan Tinggi Vokasi yang menerapkan Penguatan Mutu Berstandar Industri (*Competitive Fund*) dan Program Penguatan Perguruan Tinggi Vokasi Perguruan Tinggi Swasta (P3TV-PTS); 6) Pelaksanaan sertifikasi kompetensi dan profesi kepada SDM pendidikan tinggi vokasi; 7) Penyusunan kurikulum pendidikan tinggi vokasi berbasis industri dan Melaksanakan sistem penjaminan mutu internal (SPMI); 8) Program Pendidikan Kecakapan Kerja (PKK) dan Pendidikan Kecakapan Wirausaha (PKW); 9) Pelatihan dan peningkatan kompetensi untuk guru,



kepala sekolah, dan instruktur kursus berupa *upskilling* dan *reskilling*; 10) *Matching Fund* yang bertujuan untuk mendorong kerjasama/kolaborasi yang saling menguntungkan antara perguruan tinggi dan mitra berbasis riset dan/atau kepakaran perguruan tinggi untuk menyelesaikan masalah DUDI atau pemberdayaan masyarakat.

IKP 2.1 Persentase lulusan SMK yang bekerja/berwirausaha dalam satu tahun setelah kelulusan dengan gaji/ pendapatan minimum sebesar 1xUMP

Capaian IKP 2.1 pada tahun 2023 diperoleh dari data Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) periode Agustus tahun 2023 yang dilakukan oleh Badan Pusat Statistik (BPS). Mengingat data yang digunakan untuk mengukur ketercapaian IKP ini merupakan data survei, dimana pengumpulan data dilakukan melalui pencacahan sampel dari populasi pada blok sensus, maka data yang ditampilkan adalah data relatif, bukan angka absolut.

Keberhasilan pendidikan vokasi salah satunya diukur dari lulusan yang dapat diterima di dunia kerja atau berwirausaha. Lulusan pendidikan vokasi yang dimaksud pada Indikator Kinerja Program ini berasal dari lulusan SMK.

Adapun kriteria bekerja menurut Badan Pusat Statistik (BPS) adalah :

1. Bekerja adalah kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh seseorang dengan maksud memperoleh atau membantu memperoleh pendapatan atau keuntungan, paling sedikit 1 jam (tidak terputus) dalam seminggu yang lalu. Kegiatan tersebut termasuk pola kegiatan pekerja tak dibayar yang membantu dalam suatu usaha/kegiatan ekonomi.
2. Lulusan yang bekerja pada indikator ini adalah lulusan yang bekerja sebagai Buruh/Karyawan/Pegawai, Pekerja bebas di pertanian, dan Pekerja bebas di nonpertanian.
3. Berwirausaha adalah aktivitas dalam menciptakan dan/atau mengembangkan suatu usaha yang inovatif. Berwirausaha yang dimaksud pada indikator ini adalah berusaha sendiri.
4. Berusaha sendiri adalah bekerja atau berusaha dengan menanggung resiko secara ekonomis, diantaranya dengan tidak kembalinya ongkos produksi yang telah dikeluarkan dalam rangka usahanya tersebut, serta tidak menggunakan pekerja dibayar maupun pekerja tak dibayar. Termasuk yang sifatnya memerlukan teknologi atau keahlian khusus.
5. Upah/gaji pokok dan tunjangan yang merupakan imbalan/balas jasa yang diterima oleh buruh/karyawan/pegawai selama sebulan terakhir dari pekerjaan utama, baik berupa uang maupun barang yang dibayarkan oleh perusahaan/kantor/majikan.



6. Upah/gaji pokok adalah imbalan dalam bentuk uang dan atau barang yang diterima oleh buruh/karyawan/pegawai yang ditetapkan dan dibayarkan menurut suatu perjanjian kerja, kesepakatan, atau peraturan perundang-undangan.
7. Tunjangan yang dimaksud adalah penerimaan buruh/karyawan/pegawai yang berhubungan dengan pekerjaannya seperti tunjangan kinerja, tunjangan jabatan, dan tunjangan biaya hidup/tunjangan kemahalan yang diberikan dalam bentuk uang atau barang.
8. Pendapatan pekerja bebas adalah segala bentuk pembayaran dan manfaat yang diperoleh dalam bentuk uang, barang dan jasa yang diterima dalam periode tertentu oleh seseorang untuk diri sendiri dan keluarganya sebagai imbalan atas pekerjaan yang dilakukan. Pembayaran dan manfaat bisa berasal dari pemberi kerja, profit, manfaat jaminan sosial terkait pekerjaan (misalnya program bantuan pemerintah), atau asuransi wajib pemerintah.

UMP (Upah Minimum Propinsi) atau Upah Minimum adalah upah bulanan terendah berupa upah tanpa tunjangan atau upah pokok termasuk tunjangan tetap yang ditetapkan oleh Gubernur, berdasarkan Permenaker Nomor 15 Tahun 2018.

Formula perhitungan untuk IKP 2.1 adalah dengan menghitung jumlah lulusan SMK yang dalam 1 tahun setelah kelulusan, bekerja atau berwirausaha dengan upah/gaji/pendapatan minimum 1x UMP dibagi dengan jumlah lulusan SMK dalam 1 tahun setelah kelulusan kemudian dikalikan 100%. Satuan yang digunakan adalah % (persen) dengan metode perhitungan nonkumulatif.

$$\text{Realisasi IKP} = \frac{\text{jumlah lulusan SMK yang dalam 1 tahun setelah kelulusan, bekerja atau berwirausaha dengan upah/gaji/pendapatan minimum 1x UMP}}{\text{jumlah lulusan SMK dalam 1 tahun setelah kelulusan}} \times 100\%$$

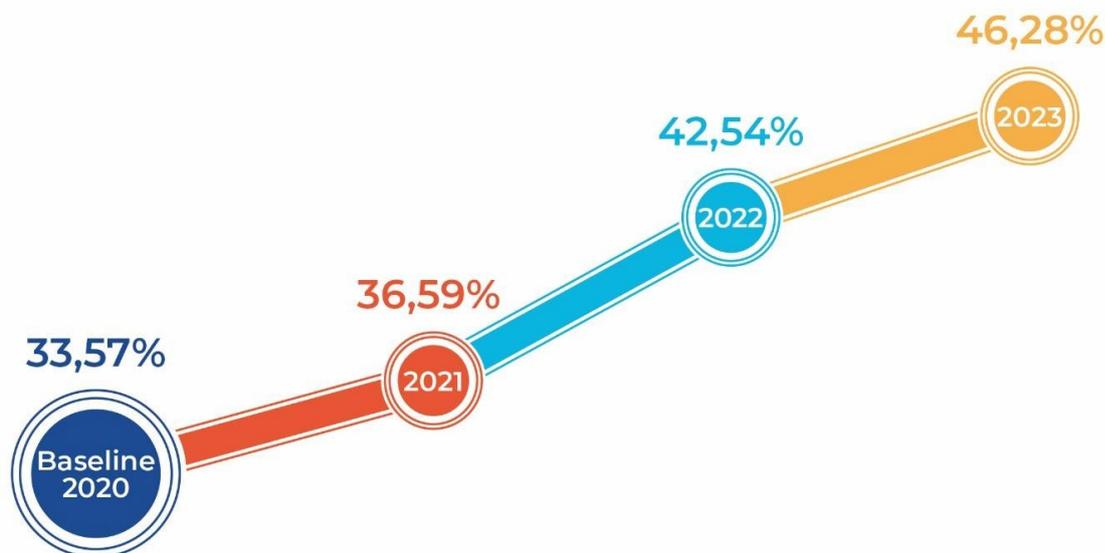
Indikator Kinerja Program	Capaian 2022	Tahun 2023			Target Akhir Renstra 2024	% Realisasi terhadap Target Akhir Renstra 2024
		Target	Realisasi	%		
Persentase lulusan SMK yang bekerja/berwirausaha dalam satu tahun setelah kelulusan dengan gaji/pendapatan minimum sebesar 1xUMP	42,54	42,18	46,28	109,72	46,18	100,21

Berdasarkan data sakernas bulan Agustus yang dirilis di bulan Desember, capaian IKP ini adalah sebesar 46,28%. Jika dibandingkan dengan capaian tahun 2022 yaitu sebesar 42,54%, capaian ini mengalami

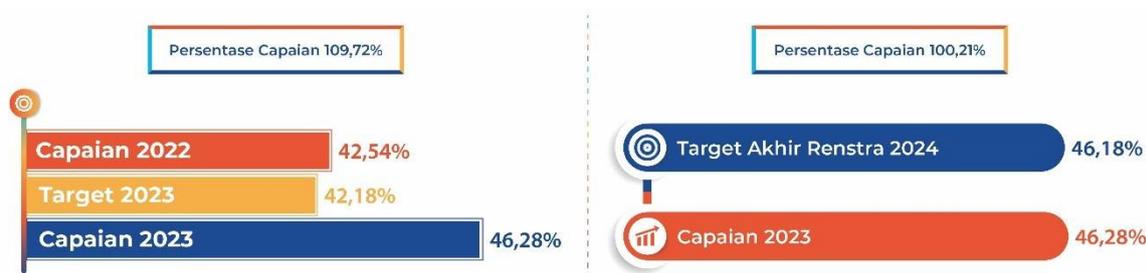


peningkatan sebesar 3,74%. Capaian ini telah mencapai target yang ditetapkan pada tahun 2023 sebesar 42,18%, atau mencapai 109,72%.

Kemudian jika dibandingkan dengan target akhir renstra tahun 2024 sebesar 46,18%, IKP ini telah mencapai 100,21%. Tentunya masih diperlukan inovasi dan strategi untuk mempertahankan dan meningkatkan capaian di tahun berikutnya.

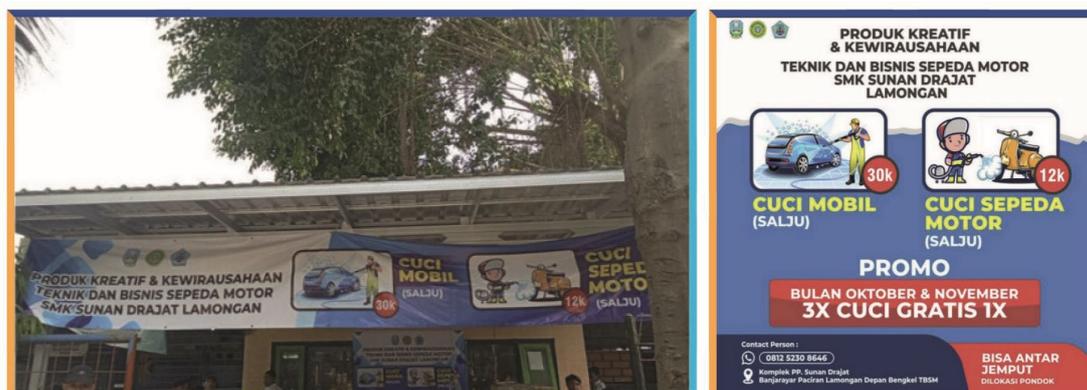


Gambar 3.9 GrafikTrend Capaian IKPP 2.1



Gambar 3.10 Grafik Trend capaian dan perbandingan target 2023, capaian 2023 dan target akhir renstra

Dokumentasi Kegiatan



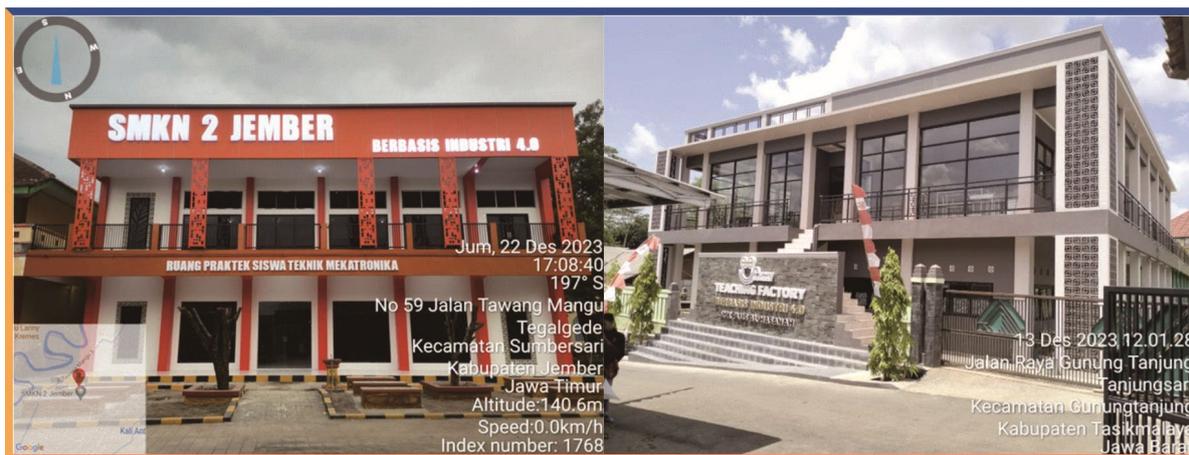
Gambar 3.11 Kewirausahaan yang dilakukan pada salah satu SMK yang mendapatkan program SMK Produk Kreatif dan Kewirausahaan



Gambar 3.12 Sertifikasi Kompetensi Siswa SMK



Gambar 3.13 Program SMK Pusat Keunggulan sektor *Hospitality*



Gambar 3.14 Pengembangan Ruang Praktek Siswa dan *Teaching Factory* pada SMK berbasis industri 4.0

Program/kegiatan yang dilaksanakan dalam upaya pencapaian target indikator kinerja yang ditetapkan antara lain:

1. Program SMK Pusat Keunggulan, dimana telah dilakukan penetapan dan penyaluran bantuan kepada 1.851 SMK penerima. Sekolah yang telah berturut-turut selama 3 tahun diberikan intervensi lanjutan didorong untuk memberikan imbas praktik baiknya kepada SMK di sekitarnya. Dengan adanya pengimbasan praktik baik ini diharapkan SMK lainnya mampu menerapkannya ekosistem tata kelola institusinya. SMK yang memberikan pengimbasan yaitu sebanyak 1.401 SMK PK lanjutan. Terdapat juga SMK Pusat Keunggulan dengan skema pepadanan dukungan dari industri mitra, dimana harapannya mampu memberikan intervensi yang komprehensif dari sisi fisik maupun non fisik sehingga pendidikan SMK akan mampu mencetak lulusan yang sesuai dengan kebutuhan dunia kerja.
2. Pelaksanaan sertifikasi kepada peserta didik SMK, telah dilakukan kepada 46.960 siswa, dengan rincian yang mengikuti sertifikasi kompetensi keahlian dalam pelaksanaannya sebanyak 30.000 siswa, dan bahasa asing sebanyak 16.960 siswa. Program ini diharapkan mampu memberikan jaminan terstandar kepada lulusan SMK sehingga mampu mendapatkan kepercayaan dari dunia kerja.
3. Program pengembangan SMK dalam mendukung industri 4.0 bertujuan untuk menciptakan lulusan dengan kompetensi keahlian sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan teknologi terkini. Pada tahun 2023 program pengembangan SMK dalam mendukung industri 4.0 diberikan kepada 80 SMK (31 SMK Baru dan 49 SMK lanjutan). Bantuan digunakan untuk workshop peningkatan pembelajaran, penguatan SDM, penyelarasan kompetensi serta beberapa peningkatan kualitas standar sarpras agar menjadi SMK yang dapat



mendukung industri 4.0. Semua kegiatan sudah terlaksana dengan baik di 80 SMK tersebut.

4. Program SMK mendukung produk kreatif dan kewirausahaan. Program ini dilaksanakan untuk menciptakan lulusan SMK dengan kemampuan *entrepreneurship*. Lulusan ditargetkan untuk memiliki peluang mendapatkan penghasilan sesuai dengan standar upah minimal yang ditentukan. Pada tahun 2023 sebanyak 240 sekolah diberikan bantuan untuk mengembangkan Proyek Kreatif dan Kewirausahaan dimana 52 sekolah diantaranya diberikan bantuan untuk melaksanakan pembelajaran *teaching factory*. Program ini bertujuan untuk meningkatkan lulusan SMK yang bekerja/berwirausaha.

Faktor keberhasilan dalam pencapaian target indikator kinerja antara lain:

1. Penyusunan perencanaan yang tepat, efektif, efisien, tepat sasaran sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan pada juknis serta memastikan penerima bantuan melaksanakan kegiatan sesuai dengan lini masa dan prosedur yang telah ditetapkan.
2. Melakukan pendampingan pelaksanaan program secara intensif kepada satuan pendidikan penerima bantuan baik luring maupun daring.
3. Memastikan satuan pendidikan melakukan pelaporan 50% dan 100% tepat waktu, sebagai alat ukur keterlaksanaan program.
4. Melakukan supervisi kepada satuan pendidikan penerima bantuan sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan.

Hambatan/kendala/permasalahan/faktor penghambat yang dihadapi dalam upaya pencapaian target antara lain:

1. Industri yang masuk dalam kategori industri 4.0 belum tersebar secara merata sehingga sebagian besar SMK yang didorong untuk melakukan penyesuaian dengan industri kategori 4.0 mengalami kesulitan dalam mencari mitranya.
2. Kurangnya partisipasi masyarakat untuk menumbuhkan jiwa wirausaha kepada anak sehingga kurangnya dukungan dari pihak keluarga bagi siswa untuk berwirausaha.
3. Tidak semua SMK mendapatkan mitra industri dengan skala besar, beberapa melakukan kerjasama dengan industri UMKM sebagai mitra yang sebagian besar mempunyai keterbatasan SDM dalam pelaksanaan programnya.
4. Pengolahan dan analisis data *tracer study* secara menyeluruh terkait pendapatan lulusan SMK belum dilakukan secara optimal sehingga belum ada informasi detail terkait pendapatan lulusan SMK.



5. Dalam pelaksanaan program SMK PK perlu dilakukan kurasi melalui verifikasi dan validasi lebih mendetail terhadap komponen kegiatan yang akan dilaksanakan terhadap bentuk nilai padanan yang akan diberikan oleh mitra industri, sehingga dibutuhkan waktu lebih lama pada saat proses seleksi sekolah calon penerima program bantuan.
6. Pelaksanaan sertifikasi kompetensi diharapkan dapat diberikan kepada peserta didik SMK yang lulus pada tahun ajaran 2022/2023, namun pelaksanaannya tidak memungkinkan dikarenakan anggaran yang belum tersedia. Oleh karena itu sekolah diarahkan untuk mengusulkan ulang siswa kelas XI sebagai sasaran baru yang akan diberikan sertifikasi kompetensi di tahun 2023.
7. Belum optimalnya koordinasi dan sinkronisasi SMK yang mendukung industri 4.0 dengan mitra dunia industri yang sudah diberikan apresiasi oleh Kementerian Perindustrian sebagai industri yang sudah melaksanakan industri 4.0.

Langkah antisipasi yang diambil untuk mengatasi permasalahan/hambatan yang dihadapi agar target indikator kinerja dapat tercapai antara lain:

1. Mendorong SMK untuk berkolaborasi dengan dunia kerja baik dalam pembelajaran maupun pengembangan unit usaha dengan membentuk inkubator bisnis sehingga peserta didik dapat merasakan atmosfer budaya kerja. Disamping itu, inkubator bisnis yang dibentuk bersama diharapkan akan mendorong lulusan SMK agar lebih kreatif untuk berwirausaha.
2. Sekolah diarahkan untuk melakukan pembinaan kepada peserta didik yang telah mempunyai usaha/ berwirausaha untuk dikembangkan menjadi lebih baik.
3. Bentuk kerjasama dengan mitra industri skala UMKM disesuaikan melalui pengembangan kewirausahaan dengan harapan mampu memberikan pembelajaran bagi peserta didik dengan potensi untuk usaha mandiri.
4. Mengoptimalkan pemanfaatan *tracer study* bagi lulusan SMK sehingga satuan pendidikan dapat melakukan evaluasi terhadap hasil *tracer study* masing-masing.
5. Melakukan koordinasi dengan pihak BPS terkait pengembangan sistem informasi berkaitan dengan pelaksanaan *tracer study* kepada lulusan SMK, sehingga sekolah dapat menjadi kepanjangan tangan untuk membantu melakukan penelusuran terhadap lulusannya. Disamping itu, capaian ini menjadi indikator keberhasilan sekolah pada Rapor Pendidikan satuan pendidikan SMK.



6. Pelibatan berbagai pihak (praktisi dan akademisi) untuk membantu pelaksanaan kurasi kegiatan padanan dari mitra industri untuk mendapatkan hasil yang maksimal.
7. Sertifikasi diberikan kepada peserta didik SMK pada kelas XI dalam bentuk *skill passport* untuk 1 klaster sampai dengan akhir kelulusan sehingga sertifikasi kompetensi diberikan secara utuh 1 skema.
8. Berkoordinasi dengan dinas serta Kementerian Perindustrian terkait pelaksanaan program SMK pendukung industri 4.0 sehingga kegiatan dapat terlaksana sesuai dengan target yang diharapkan.

Strategi yang dilakukan agar target indikator kinerja dapat tercapai antara lain:

1. Memfasilitasi SMK untuk menjalin kerjasama saling menguntungkan dengan dunia usaha, dunia industri dan dunia kerja, harapan adanya investasi untuk memberi intervensi dalam meningkatkan kualitas pembelajaran yang nantinya akan berdampak pada kompetensi lulusan SMK yang siap terjun ke pasar kerja dengan standar pendapatan sesuai dengan UMP yang ditetapkan.
2. Penguatan pembelajaran yang berbasis pada pengembangan minat *entrepreneurship* pada peserta didik, salah satunya dengan model *teaching factory*. Satuan pendidikan diarahkan untuk menerapkan model pembelajaran ini dengan harapan siswa dapat berperan aktif mempelajari proses dan alur bisnis secara utuh dalam dunia usaha dan dunia industri dalam lingkungan sekolah. Disamping itu, dengan adanya pendampingan dari industri maka produk yang dihasilkan dari hasil pembelajaran dapat bernilai ekonomis yang mampu dijual untuk kemudian keuntungan yang didapatkan dapat dimanfaatkan kembali ke sekolah.
3. Pemberdayaan dan pendampingan kepada peserta didik yang berkomitmen untuk mencoba membuka peluang usaha melalui pengembangan produk kreatif dan kewirausahaan. Siswa yang diberikan modal bergulir dengan didampingi oleh sekolah. Strategi ini akan ditingkatkan dengan harapan mampu menarik modal dari lembaga lainnya sehingga usaha peserta didik di sekolah dapat mendapatkan berkembang lebih baik.



IKP 2.2 Persentase lulusan Perguruan Tinggi Penyelenggara Pendidikan Vokasi yang bekerja/berwirausaha dalam satu tahun setelah kelulusan dengan gaji/pendapatan minimum sebesar 1,2x UMP

Capaian IKP 2.1 pada tahun 2023 diperoleh dari data Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) periode Agustus tahun 2023 yang dilakukan oleh Badan Pusat Statistik (BPS). Mengingat data yang digunakan untuk mengukur ketercapaian IKP ini merupakan data survei, dimana pengumpulan data dilakukan melalui pencacahan sampel dari populasi pada blok sensus, maka data yang ditampilkan adalah data relatif, bukan angka absolut.

Keberhasilan pendidikan vokasi salah satunya diukur dari lulusan yang dapat diterima di dunia kerja atau berwirausaha. Lulusan Pendidikan vokasi yang dimaksud pada Indikator Kinerja Program ini berasal dari lulusan Perguruan Tinggi Penyelenggara Pendidikan Vokasi (Program Diploma I, II, III, dan IV/Sarjana Terapan).

Adapun kriteria bekerja menurut Badan Pusat Statistik (BPS) adalah :

1. Bekerja adalah kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh seseorang dengan maksud memperoleh atau membantu memperoleh pendapatan atau keuntungan, paling sedikit 1 jam (tidak terputus) dalam seminggu yang lalu. Kegiatan tersebut termasuk pola kegiatan pekerja tak dibayar yang membantu dalam suatu usaha/kegiatan ekonomi.
2. Lulusan yang bekerja pada indikator ini adalah lulusan yang bekerja sebagai Buruh/Karyawan/Pegawai, Pekerja bebas di pertanian, dan Pekerja bebas di nonpertanian;
3. Berwirausaha adalah aktivitas dalam menciptakan dan/atau mengembangkan suatu usaha yang inovatif. Berwirausaha yang dimaksud pada indikator ini adalah berusaha sendiri.
4. Berusaha sendiri adalah bekerja atau berusaha dengan menanggung resiko secara ekonomis, diantaranya dengan tidak kembalinya ongkos produksi yang telah dikeluarkan dalam rangka usahanya tersebut, serta tidak menggunakan pekerja dibayar maupun pekerja tak dibayar. Termasuk yang sifatnya memerlukan teknologi atau keahlian khusus.
5. Upah/gaji pokok dan tunjangan yang merupakan imbalan/balas jasa yang diterima oleh buruh/karyawan/pegawai selama sebulan terakhir dari pekerjaan utama, baik berupa uang maupun barang yang dibayarkan oleh perusahaan/kantor/majikan.
6. Upah/gaji pokok adalah imbalan dalam bentuk uang dan atau barang yang diterima oleh buruh/karyawan/pegawai yang ditetapkan dan dibayarkan menurut suatu perjanjian kerja, kesepakatan, atau peraturan perundang-undangan.
7. Tunjangan yang dimaksud adalah penerimaan buruh/karyawan/pegawai yang berhubungan dengan pekerjaannya seperti tunjangan kinerja,



tunjangan jabatan, dan tunjangan biaya hidup/tunjangan kemahalan yang diberikan dalam bentuk uang atau barang.

8. Pendapatan pekerja bebas adalah segala bentuk pembayaran dan manfaat yang diperoleh dalam bentuk uang, barang dan jasa yang diterima dalam periode tertentu oleh seseorang untuk diri sendiri dan keluarganya sebagai imbalan atas pekerjaan yang dilakukan. Pembayaran dan manfaat bisa berasal dari pemberi kerja, profit, manfaat jaminan sosial terkait pekerjaan (misalnya program bantuan pemerintah), atau asuransi wajib pemerintah.

UMP (Upah Minimum Propinsi) atau Upah Minimum adalah upah bulanan terendah berupa upah tanpa tunjangan atau upah pokok termasuk tunjangan tetap yang ditetapkan oleh Gubernur, berdasarkan Permenaker Nomor 15 Tahun 2018.

Formula perhitungan untuk IKP 2.2 adalah dengan menghitung Jumlah lulusan pendidikan tinggi vokasi yang dalam 1 tahun setelah kelulusan, bekerja atau berwirausaha dengan upah/gaji/pendapatan minimum 1,2x UMP dibagi dengan Jumlah lulusan pendidikan tinggi vokasi dalam 1 tahun setelah kelulusan dikalikan 100%.

$$\text{Realisasi IKP} = \frac{\text{Persentase lulusan pendidikan tinggi vokasi yang dalam 1 tahun setelah kelulusan, bekerja atau berwirausaha dengan upah/gaji/pendapatan minimum 1,2x UMP}}{\text{jumlah lulusan Pendidikan Tinggi Vokasi dalam 1 tahun setelah kelulusan}} \times 100\%$$

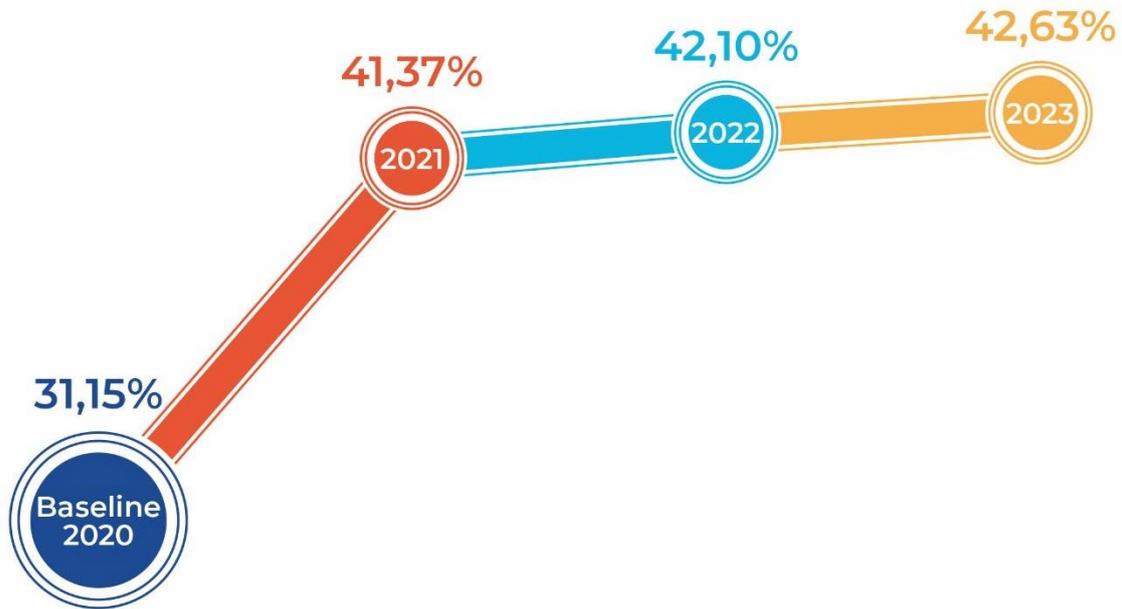
Indikator Kinerja Program	Capaian 2022	Tahun 2023			Target Akhir Renstra 2024	% Realisasi terhadap Target Akhir Renstra 2024
		Target	Realisasi	%		
Persentase lulusan Perguruan Tinggi Penyelenggara Pendidikan Vokasi yang bekerja/berwirausaha dalam satu tahun setelah kelulusan dengan gaji/pendapatan minimum sebesar 1,2x UMP	42,10	47,37	42,63	89,99	50,37	84,63

Berdasarkan data sakernas bulan Agustus yang dirilis di bulan Desember, capaian IKP ini adalah sebesar 42,63%. Jika dibandingkan dengan capaian tahun 2022 sebesar 42,10%, capaian ini mengalami peningkatan sebesar 0,53%. Namun, capaian ini belum memenuhi target yang ditetapkan pada tahun 2023 sebesar 47,37%, atau baru mencapai 89,99%.

Kemudian jika dibandingkan dengan target akhir renstra tahun 2024 sebesar 50,37%, capaian ini baru mencapai 84,63%. Tentunya diperlukan inovasi dan strategi untuk menuntaskan kekurangan yang tidak tercapai



pada tahun 2023, maupun untuk mencapai target akhir renstra pada tahun 2024.



Gambar 3.15 Grafik Trend Capaian IKP 2.2



Gambar 3.16 Grafik Trend capaian dan perbandingan capaian 2022, target 2023, capaian 2023 dan target akhir renstra

Dokumentasi Kegiatan



Gambar 3.17 Bapak Presiden Jokowi mengunjungi Vokasifest



Gambar 3.18 Sosialisasi Program *Competitive Fund* (CF) dan Sosialisasi Program Peningkatan Kompetensi Dosen Vokasi 2023



Gambar 3.19 Evaluasi Kelayakan Calon Penyedia Pengadaan Barang PPPTV-PTS



Gambar 3.20 Program Peningkatan Kompetensi SDM PTV pada Skema Pelatihan/Magang



Gambar 3.21 Bimtek Penyusunan Kurikulum Berbasis Industri Tahap I dan Tahap II



Gambar 3.22 Pelaksanaan Sertifikasi Kompetensi Mahasiswa di Politeknik Negeri Batam



Gambar 3.23 Salah satu bentuk kegiatan P2MD di Desa Sidomulyo

Program/kegiatan yang dilaksanakan dalam upaya pencapaian target indikator kinerja yang ditetapkan antara lain:

1. Program Pendidikan Tinggi Vokasi yang menerapkan Penguatan Mutu Berstandar Industri (*Competitive Fund*), dengan total 119 Program Studi telah menerima bantuan program dan seluruh dana bantuan



yang diterima ditujukan untuk proses penguatan mutu berstandar industri.

2. Program P3TV-PTS tahun 2023 telah ditetapkan sebanyak 52 Perguruan Tinggi Swasta yang lolos verifikasi administrasi dan evaluasi kelayakan sebagai penerima bantuan. Bantuan yang diberikan berupa barang yang relevan dengan pembelajaran pada prodi yang akan ditingkatkan mutunya dan bukan untuk mendukung penelitian dosen.
3. Program Peningkatan Kompetensi SDM Pendidikan Tinggi Vokasi diberikan kepada 784 dosen Perguruan Tinggi Vokasi sesuai dengan bidang yang dimiliki melalui 3 skema, yaitu:
 - a. Pelatihan (magang), yaitu proses peningkatan kompetensi yang dilakukan secara sistematis di bawah pengawasan dan berada pada lingkungan bekerja yang nyata, baik di industri atau perguruan tinggi luar negeri, untuk dapat menguasai keterampilan atau keahlian tertentu. Skema ini merupakan salah satu hal dalam rangka meningkatkan relevansi dan keunggulan pendidikan tinggi vokasi. Skema ini diikuti oleh 106 orang.
 - b. Sertifikasi Kompetensi, yaitu proses pemberian sertifikat kompetensi yang dilakukan secara sistematis dan objektif melalui uji kompetensi yang mengacu kepada standar kompetensi. Sertifikat merupakan bukti bahwa seseorang memiliki keterampilan tertentu sehingga memiliki daya saing yang baik untuk mendapatkan pekerjaan sesuai bidang. Skema ini diikuti oleh 447 orang.
 - c. Sertifikasi Profesi, yaitu merupakan proses pemberian sertifikat untuk profesi/keahlian tertentu yang dilakukan secara sistematis dan objektif melalui uji kompetensi terkait profesi tersebut yang mengacu kepada standar kompetensi kerja nasional, standar internasional dan standar khusus lainnya. Sertifikasi profesi biasanya diselenggarakan oleh asosiasi profesi terkait atau badan maupun lembaga yang dibentuk oleh asosiasi. Skema ini diikuti oleh 231 orang.
4. Pelaksanaan Kurikulum Berbasis Industri yang dilaksanakan untuk perancangan Rekognisi Pembelajaran Lampau (RPL), penerapan kurikulum *link and match*, serta pembahasan terkait pelaksanaan RPL D2 *fast track* dan transformasi D3 ke D4. Bimtek penyusunan kurikulum PTV dilaksanakan dalam 2 tahap, tahap 1 dilakukan ke sebanyak 276 peserta pada 164 perguruan tinggi, dan tahap 2 dilakukan ke sebanyak 118 peserta pada 81 perguruan tinggi.
5. Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi Vokasi merupakan kegiatan sistemik untuk meningkatkan mutu pendidikan tinggi secara berencana dan berkelanjutan. Peningkatan mutu pendidikan tinggi harus terus



menerus dilakukan secara berkesinambungan demi terwujudnya budaya mutu di perguruan tinggi serta menghasilkan lulusan yang dapat memiliki daya saing dikancah nasional maupun internasional. Dalam rangka mendukung peningkatan kualitas Pendidikan Tinggi Vokasi sehingga dapat meningkatkan budaya mutu yang berkelanjutan di perguruan tinggi, berbagai upaya telah dilakukan Direktorat APTV pada bidang penjaminan mutu antara lain, penguatan SPMI Perguruan Tinggi melalui Pedoman Implementasi SPMI PTV dan Pedoman Verifikasi Pelaporan SPMI pada PDDikti, serta penguatan SDM untuk Audit Mutu Internal (AMI). Seluruh program tersebut bertujuan untuk mengimplementasikan tridharma perguruan tinggi. Adapun bentuk kegiatan dan capaian pada program-program tersebut yaitu; 1) Lokakarya Audit Mutu Internal diselenggarakan dalam 5 batch dengan jumlah peserta 162 orang dari 92 perguruan tinggi negeri dan swasta; 2) Verifikasi Pelaporan SPMI Periode 1 Tahun 2023 didapatkan 506 PT telah melaporkan kegiatan SPMI ke Aplikasi Pelaporan SPMI PDDikti dengan 179 PT terverifikasi lengkap 4 dokumen wajib yaitu Kebijakan SPMI, Manual SPMI, Standar SPMI dan Formulir SPMI; 3) Pendampingan 3 Program Studi *Pilot Project Akreditasi Internasional Sydney Accord* (Program Studi Teknik Keselamatan dan Kesehatan Kerja, Politeknik Elektronika Negeri Surabaya, Program Studi Teknik Elektronika Politeknik Perkapalan Negeri Surabaya, 4) Penyusunan Pedoman Implementasi SPMI sesuai Permendikbustek Nomor 53 tahun 2023; 5) Penyusunan Usulan Instrumen Akreditasi untuk Program Vokasi.

6. Mahasiswa Pendidikan Tinggi Vokasi yang mengikuti sertifikasi dan uji kompetensi profesi ke sebanyak 4.589 orang mahasiswa, dari 40 Perguruan Tinggi Vokasi.
7. Program Kreatifitas Mahasiswa (PKM), bertujuan untuk mempersiapkan sumber daya mahasiswa yang berorientasi ke masa depan dan ditempa dengan transformasi Pendidikan Tinggi sehingga menjadi lulusan yang unggul, kompetitif, adaptif, fleksibel, produktif, berdaya saing. Pada pelaksanaannya PKM dilaksanakan dalam 2 skema, yaitu; 1) Skema Pendanaan yang diberikan kepada 1.612 mahasiswa, dan 2) Skema Insentif yang diberikan kepada 430 mahasiswa.
8. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa (P2MD) merupakan kegiatan pemberdayaan masyarakat yang dilaksanakan oleh mahasiswa melalui ORMAWA yang ada di perguruan tinggi, misalnya Unit kegiatan Mahasiswa (UKM), Himpunan mahasiswa Prodi (HIMAPRODI), Badan Eksekutif Mahasiswa, atau bentuk organisasi



kemahasiswaan intra kampus lainnya. P2MD diharapkan mampu menumbuhkan kepedulian dan mengundang kontribusi mahasiswa dalam pembangunan dan pemberdayaan masyarakat kepada masyarakat di desa (*help people to help themselves*) serta belajar hal-hal yang bermanfaat dari masyarakat bersama masyarakat. Melalui P2MD masyarakat desa diharapkan mampu menemukan dan mengembangkan potensi yang dimilikinya untuk lebih berkembang dan bermanfaat sehingga dapat mewujudkan Indonesia yang adil makmur. Bantuan P2MD ini diberikan kepada 2.310 mahasiswa pendidikan tinggi vokasi.

Faktor penyebab kegagalan dalam pencapaian target indikator kinerja antara lain:

1. Data yang digunakan untuk menghitung capaian ini bersumber dari Sakernas, dimana sampel yang digunakan adalah rumah tangga yang berada di blok sensus. Sangat dimungkinkan lulusan pendidikan vokasi yang menjadi sampel masih minim, sehingga diperlukan data survei internal Kemendikbudristek sebagai perbandingan.
2. Adanya variabel dengan gaji minimal 1,2 kali UMP sedikit memberatkan pencapaian karena lulusan PTV rata-rata adalah lulusan D2 dan D3 dengan pertimbangan gaji di perusahaan hanya 1 kali UMP bahkan di bawah UMP.
3. Adanya kenaikan upah minimal regional setiap tahun sesuai dengan Permenaker terbaru yang tidak diiringi dengan peningkatan upah tenaga kerja baru.
4. Lulusan perguruan tinggi vokasi yang digunakan untuk perhitungan capaian IKP ini adalah dalam periode satu tahun setelah kelulusan, dimana lulusan tersebut belum memiliki pengalaman di dunia kerja, sehingga upah yang ditawarkan oleh perusahaan jarang yang mencapai 1,2 UMP.

Hambatan/kendala/permasalahan/faktor penghambat yang dihadapi dalam upaya pencapaian target antara lain:

1. Proses realokasi dana bantuan *competitive fund* bagi Politeknik Negeri dan Akademi Komunitas Negeri membutuhkan waktu hingga 3 bulan sehingga pelaksanaan program terlambat.
2. Pada program sertifikasi di luar negeri, mayoritas peserta tidak memiliki nomor paspor yang masih berlaku sehingga menyebabkan terlambatnya penerbitan LoA oleh penyelenggara.
3. Mayoritas penyelenggara meminta nomor paspor peserta yang masih berlaku.



4. Untuk Sertifikasi Kompetensi, progres pencairan dana bantuan di LPDP pada tahun 2023 baru 167 mahasiswa dari 4.570 mahasiswa. Keterlambatan pencairan dana tersebut menghambat proses pemantauan dan evaluasi.
5. Keterbatasan skema program untuk peningkatan kompetensi dosen dan tenaga kependidikan.
6. Banyak peserta bimtek kurikulum berbasis industri belum bisa merumuskan capaian pembelajaran sesuai program studi berdasarkan Panduan Penyusunan Kurikulum PTV dan Permendikbudristek Nomor 53 Tahun 2023.
7. Berdasarkan data pelaporan pada sistem PDDikti masih banyak PTPPV yang belum melaporkan data pelaksanaan model pembelajaran PBL secara riil karena terkendala pada format baku yang ada pada sistem PDDikti yang tidak dapat mengakomodir semua kebutuhan data model pembelajaran PBL sesuai Perdirjen Nomor 27 Tahun 2022.
8. Mayoritas Perguruan Tinggi Swasta di LLDIKTI VIII sudah melaporkan implementasi SPMI ke aplikasi namun dokumen belum lengkap dikarenakan kurangnya pemahaman terkait penyusunan dokumen SPMI dan teknis pelaporan SPMI ke aplikasi.
9. Perpindahan sumber pendanaan dari DIPA ke LPDP, sehingga harus menyesuaikan dengan ketentuan cara pencairan yang telah ditetapkan oleh LPDP.

Langkah antisipasi yang diambil untuk mengatasi permasalahan/hambatan yang dihadapi agar target indikator kinerja dapat tercapai antara lain:

1. Proses seleksi tahun 2024 dimulai lebih awal (T-1) untuk mengantisipasi proses realokasi dana bantuan yang kemungkinan masih akan memakan waktu lama.
2. Meminta seluruh peserta sertifikasi luar negeri untuk segera memiliki paspor yang masih berlaku.
3. Berkoordinasi dengan LPDP serta melakukan penyusunan juknis pelaksanaan monitoring dan evaluasi program peningkatan kompetensi sumber daya pada awal tahun.
4. Penambahan skema untuk peningkatan kompetensi dosen dan penambahan kuota untuk tenaga kependidikan.
5. Melakukan reviu dan perbaikan capaian pembelajaran untuk menjadi acuan minimal bagi program studi vokasi.
6. Penyesuaian konten dan format pelaporan data pelaksanaan model pembelajaran PBL pada sistem PDDikti untuk mengakomodir kebutuhan yang sesuai Perdirjen Nomor 27 Tahun 2022, dan



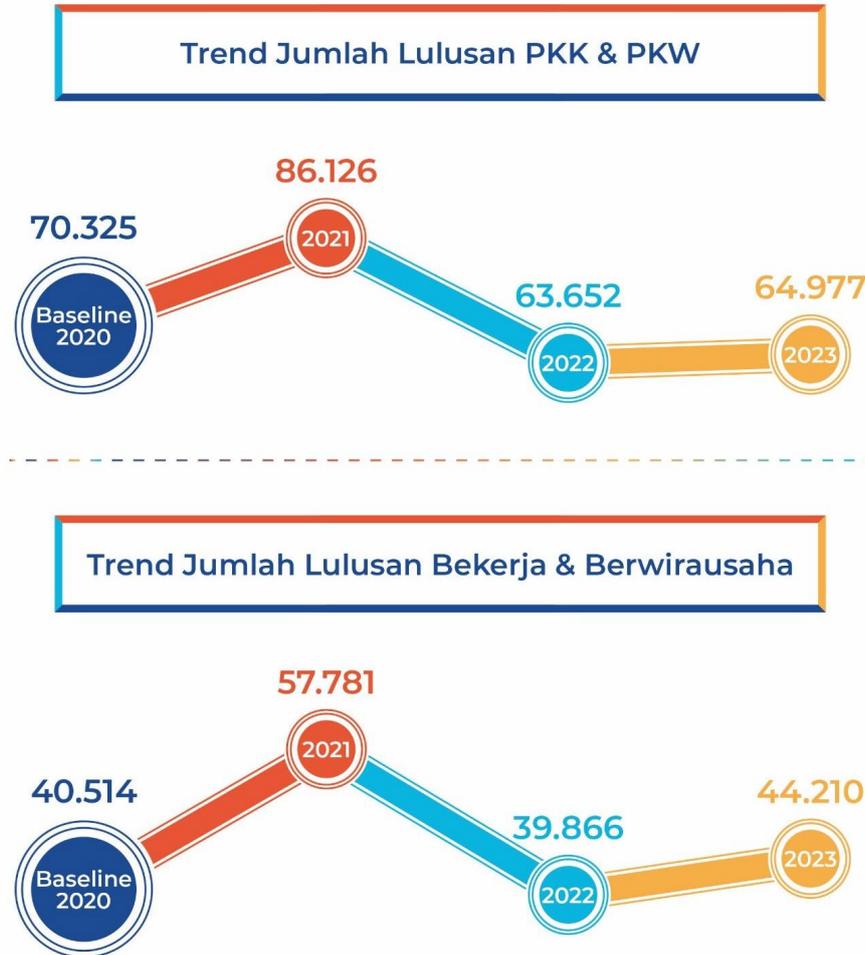
diperlukan strategi penghitungan data pelaksanaan model pembelajaran PBL oleh bagian akademik di masing-masing perguruan tinggi.

7. Bimtek Penyusunan Dokumen SPMI bagi Pengelola SPMI LLDIKTI.
8. Pertemuan daring dan komunikasi secara intens dengan LPDP untuk berkoordinasi terkait teknis tata cara (teknis) dalam pencairan pendanaan sertikom tahun 2023 dengan didampingi oleh tim reviewer.

Strategi yang dilakukan agar target indikator kinerja dapat tercapai antara lain:

1. Melakukan proses sosialisasi dan pendaftaran program *Competitive Fund* (CF) Vokasi tahun 2024 pada T-1 yang sudah dimulai pada akhir November 2023. Pengumuman penerima bantuan *Competitive Fund* (CF) Vokasi akan diumumkan pada triwulan I 2024 sehingga proses realokasi anggaran bantuan kepada satker penerima program dapat direalisasikan lebih awal mengingat proses pembahasan realokasi anggaran memerlukan waktu yang tidak sebentar.
2. Pelaksanaan Program Penguatan Pendidikan Tinggi Vokasi Perguruan Tinggi Swasta (PPPTV-PTS) akan dilaksanakan lebih awal pada semester 1 tahun 2024 sehingga proses pengiriman barang bantuan kepada PTS penerima bantuan dapat terealisasi lebih awal.
3. Untuk dapat mengakomodir keterbatasan penerima manfaat program peningkatan kompetensi dosen vokasi, pada pelaksanaan program tahun selanjutnya akan ditambahkan skema bagi dosen dan kuota untuk tenaga kependidikan.
4. Melakukan penyusunan instrumen untuk akreditasi khusus untuk program Pendidikan Tinggi Vokasi.
5. Menyesuaikan konten dan format pelaporan data pelaksanaan model pembelajaran *Project Based Learning* (PBL) pada sistem PDDikti untuk mengakomodir kebutuhan yang sesuai Perdirjen Nomor 27 Tahun 2022, dan diperlukan strategi penghitungan data pelaksanaan model pembelajaran PBL.
6. Penyusunan Peta Jalan Implementasi Permendikbudristek Nomor 53 Tahun 2023 agar mendukung penyelarasan Kurikulum Pendidikan Tinggi Vokasi.
7. Melakukan pemantauan, evaluasi, dan monitoring pelaksanaan model pembelajaran *Project Based Learning* (PBL) di Perguruan Tinggi Vokasi.
8. Melakukan koordinasi lanjutan dengan LLDIKTI perihal verifikasi Sistem Penjamin Mutu Internal (SPMI).

IKP 2.3 Persentase lulusan kursus dan pelatihan yang memiliki pekerjaan atau berwirausaha



Gambar 3.24 Trend kenaikan angka absolut lulusan kursus dan pelatihan yang bekerja dan berwirausaha dengan jumlah lulusan PKK dan PKW

Kursus dan pelatihan diselenggarakan bagi masyarakat yang memerlukan bekal pengetahuan, keterampilan, kecakapan hidup, dan sikap untuk mengembangkan diri, mengembangkan profesi, bekerja, usaha mandiri, dan/atau melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi. Program pendidikan vokasi yang mendukung capaian ini diantaranya Pendidikan Kecakapan Kerja (PKK) dan Pendidikan Kecakapan Wirausaha (PKW).

PKK merupakan layanan pendidikan dan pelatihan yang berorientasi pada pengembangan keterampilan kerja yang sesuai dengan kebutuhan dunia kerja yang diberikan kepada peserta didik agar memiliki kompetensi di bidang keterampilan tertentu yang dibuktikan dengan sertifikasi kompetensi untuk bekerja dan terserap di dunia kerja. PKW merupakan suatu layanan pendidikan dalam bentuk kursus dan pelatihan untuk memberikan bekal pengetahuan, keterampilan dan menumbuhkan sikap mental wirausaha dalam mengelola potensi diri dan lingkungan yang menjadikan bekal untuk



berwirausaha dan merintis berdirinya usaha mandiri yang dibimbing oleh mitra usaha.

Lulusan kursus dan pelatihan yang memiliki pekerjaan atau berwirausaha adalah lulusan PKK atau PKW yang bekerja atau berwirausaha dalam waktu 1 tahun setelah mengikuti program dari satuan kursus dan pelatihan yang memiliki NPSN yang diselenggarakan minimal 100 jam pelajaran. Kursus dan pelatihan dimaksud adalah jenis keterampilan vokasi yang berbasis dunia kerja.

Bekerja adalah kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh seseorang dengan maksud memperoleh atau membantu memperoleh pendapatan atau keuntungan, paling sedikit 1 jam (tidak terputus) dalam seminggu yang lalu. Sedangkan berwirausaha adalah aktivitas dalam menciptakan dan/atau mengembangkan suatu usaha yang inovatif. Berwirausaha yang dimaksud dalam indikator ini adalah berusaha sendiri, berusaha dibantu pekerja tidak tetap/pekerja keluarga/tidak dibayar, dan berusaha dibantu buruh tetap/buruh dibayar.

Formula perhitungan untuk IKP 2.3 adalah dengan menghitung jumlah lulusan PKK atau PKW yang memiliki pekerjaan atau berwirausaha dibagi dengan jumlah lulusan PKK dan PKW kemudian dikalikan 100%.

$$\text{Realisasi IKP} = \frac{\text{Jumlah lulusan PKK dan PKW yang memiliki pekerjaan atau berwirausaha}}{\text{jumlah lulusan PKK dan PKW}} \times 100\%$$

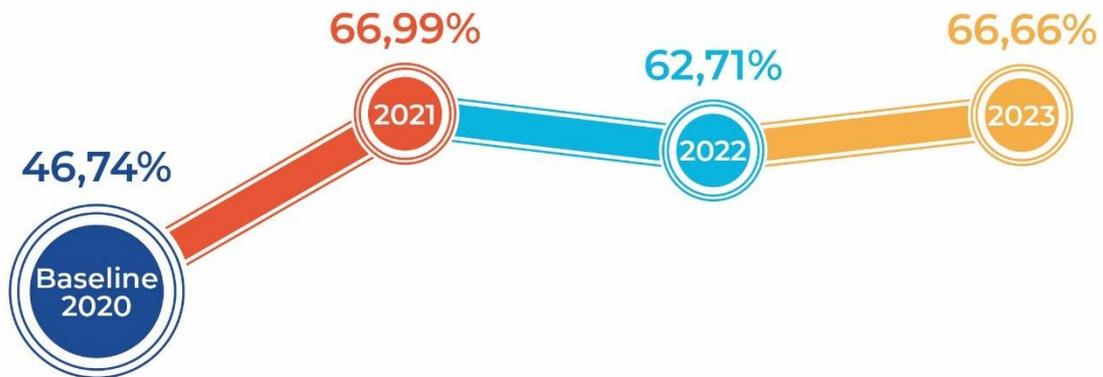
Indikator Kinerja Program	Capaian 2022	Tahun 2023			Target Akhir Renstra 2024	% Realisasi terhadap Target Akhir Renstra 2024
		Target	Realisasi	%		
Persentase lulusan kursus dan pelatihan yang memiliki pekerjaan atau berwirausaha	62,71	56,69	66,66	117,59	60,00	111,02

Capaian IKP 2.3 pada tahun 2023 diperoleh dari perhitungan jumlah lulusan PKK dan PKW yang memiliki pekerjaan atau berwirausaha yaitu sebanyak 43.314 orang dibagi dengan jumlah lulusan PKK dan PKW sebanyak 65.157 orang, sehingga mendapatkan capaian sebesar 66,66%. Jika dibandingkan dengan capaian tahun 2022 sebesar 62,71%, capaian ini mengalami peningkatan sebesar 3,9%. Capaian ini sudah melebihi target yang ditetapkan pada tahun 2023 sebesar 56,69%, atau mencapai 117,59%.

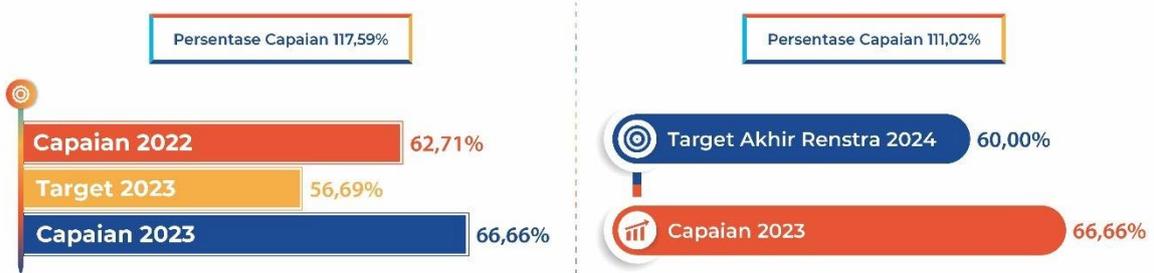
Kemudian jika dibandingkan dengan target akhir renstra tahun 2024 sebesar 60%, capaian ini juga sudah melampaui target sebesar 6,66% atau sudah mencapai 111,02%. Capaian ini tentunya harus dipertahankan, karena IKP ini dihitung secara tahunan dan bukan akumulasi dari tahun-tahun



sebelumnya, dengan kata lain capaian pada tahun berikutnya bisa saja lebih rendah dibandingkan capaian tahun ini.



Gambar 3.25 Grafik Trend Capaian IKP 2.3



Gambar 3.26 Grafik Trend capaian dan perbandingan capaian 2022, target 2023, capaian 2023 dan target akhir renstra

$$\text{Realisasi IKP} = \frac{\text{Jumlah lulusan PKK dan PKW yang memiliki pekerjaan atau berusaha}}{\text{Jumlah lulusan PKK dan PKW}} \times 100\%$$

Dokumentasi Kegiatan



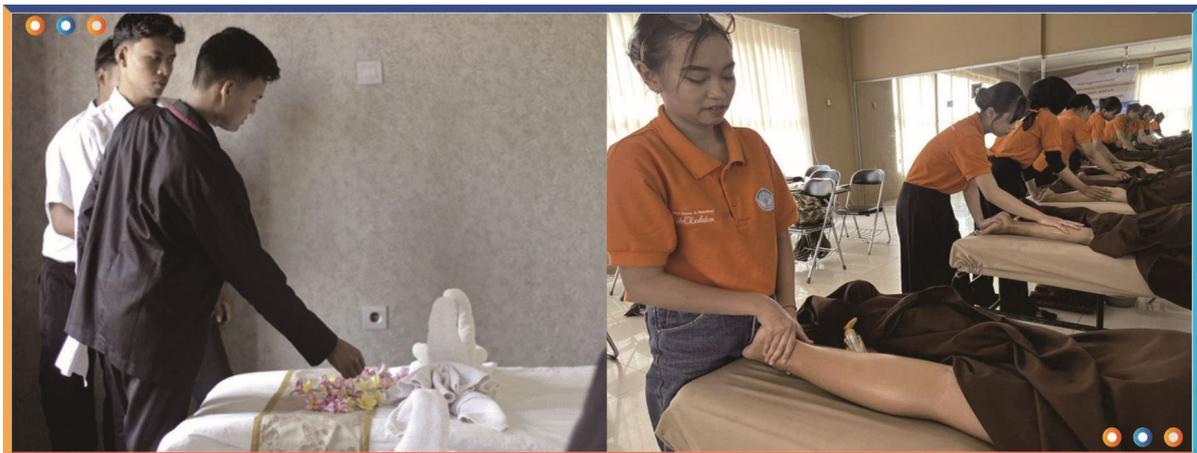
Gambar 3.27 PKK Keahlian Tata Kecantikan Rambut dan PKW Keahlian Menjahit



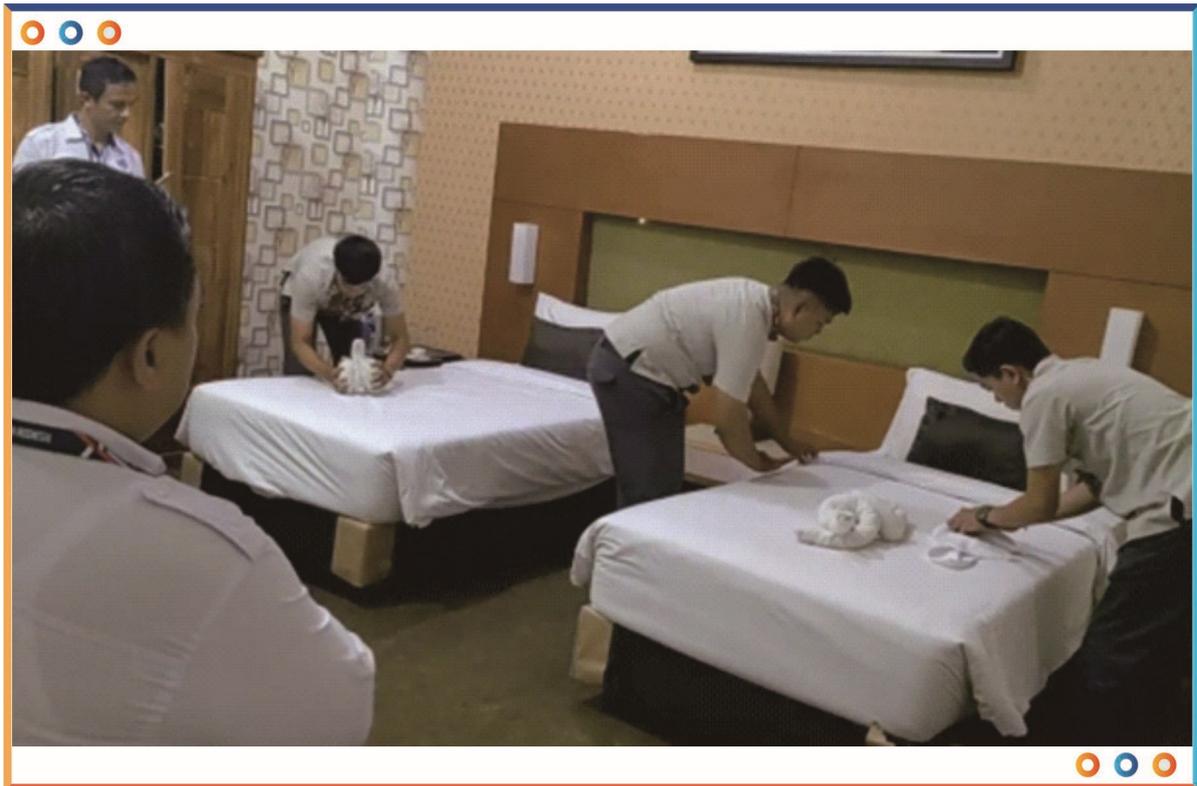
Gambar 3.28 PKK Keahlian Tata Boga dan PKW Keahlian *Pastry and Bakery*



Gambar 3.29 PKK Keahlian Pengelasan dan PKW Keahlian Teknik Kendaraan Ringan



Gambar 3.30 PKK Keahlian *Housekeeping* dan PKW Keahlian Pijat Refleksi



Gambar 3.31 Pelaksanaan Uji Kompetensi *Housekeeping*

Program/kegiatan yang dilaksanakan dalam upaya pencapaian target indikator kinerja yang ditetapkan antara lain:

1. Program Pendidikan Kecakapan Kerja (PKK) adalah salah satu program prioritas nasional yang bertujuan untuk memberikan bekal dan keterampilan kepada anak usia sekolah yang tidak bersekolah di usia 17-25 tahun agar memiliki kompetensi sesuai dengan kebutuhan industri dunia usaha dan dunia kerja. Pada tahun 2023 menargetkan pemberian bantuan kepada 11.790 peserta didik. Total peserta didik yang telah menerima bantuan PKK sebanyak 38.842 orang peserta didik, dan dari jumlah tersebut peserta didik yang telah bekerja sebanyak 21.859 orang. Jumlah presentase serapan lulusan PKK ini terus berkembang seiring dengan terserapnya lulusan program PKK di DUDIKA.
2. Program Pendidikan Kecakapan Wirausaha (PKW) adalah salah satu program prioritas nasional yang juga merupakan Major Program (MP) yang bertujuan untuk memberikan bekal dan keterampilan kepada anak usia sekolah yang tidak bersekolah di usia 15-25 tahun agar memiliki kompetensi wirausaha dan bisa memulai rintisan usaha sesuai dengan dunia usaha dan dunia industri. Pada tahun 2023 menargetkan pemberian bantuan kepada 7.910 peserta didik. Total peserta didik yang telah menerima bantuan PKW sebanyak 26.135 orang peserta didik, dari jumlah tersebut peserta didik yang telah



merintis usaha sebanyak 21.728 orang. Jumlah presentase lulusan PKW yang telah berwirausaha ini akan terus bertambah seiring dengan waktu selesainya pelatihan dan penginputan data pada *tracer study*.

3. Penyelenggaraan Uji Kompetensi yang merupakan bantuan yang diberikan kepada peserta didik kursus dan pelatihan atau warga masyarakat yang belajar mandiri untuk mengikuti uji kompetensi yang dikelola oleh Lembaga Sertifikasi. Dana bantuan penyelenggaraan uji kompetensi seluruhnya dipergunakan untuk membiayai penyelenggaraan uji kompetensi sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan. Sasaran program ini adalah peserta didik kursus dan pelatihan dan warga masyarakat yang belajar mandiri dengan kriteria berusia 17 sampai dengan 30 tahun. Pada tahun 2023, sebanyak 6.436 orang telah menerima bantuan uji kompetensi.

Faktor keberhasilan dalam pencapaian target indikator kinerja yaitu:

1. Memperkuat pola padanan anggaran baik dengan pemerintah daerah maupun dengan dunia industri dan dunia kerja.
2. Adanya perbedaan biaya kursus pada masing-masing jenis keterampilan sehingga mampu menjangkau lebih banyak sasaran.
3. Melakukan penambahan anggaran pada progam PKK dan PKW melalui BABUN untuk mencapai target renstra.
4. Adanya persyaratan dalam petunjuk teknis yang mewajibkan lembaga penyelenggara program PKK dan PKW untuk memiliki perjanjian kerjasama dengan mitra DUDIKA untuk penyaluran tenaga kerja lulusan program PKK dan mitra UMKM, permodalan, dan pemasaran untuk pendampingan rintisan usaha bagi para lulusan program PKW.
5. Adanya mekanisme uji kompetensi bagi para lulusan program PKK yang menjamin kualitas kompetensi para peserta didik program PKK, serta adanya pengajar/instruktur yang berasal dari praktisi wirausaha yang membantu peserta didik dalam menyusun rencana usaha (*business plan*) untuk inkubator rintisan usahanya.
6. Instruktur dan pengelola lembaga kursus dan pelatihan diberikan update pengetahuan tentang teknologi terbaru dengan mekanisme magang di industri.
7. Berkoordinasi dengan pemerintah daerah dan organisasi mitra untuk melakukan pembimbingan dan pembinaan kepada lembaga kursus dan pelatihan.



Hambatan/kendala/permasalahan/faktor penghambat yang dihadapi dalam upaya pencapaian target antara lain:

1. Sistem aplikasi pada program PKK untuk pelaporan pelaksanaan pembelajaran yang terintegrasi dengan perencanaan masih dalam proses pengembangan.
2. Pada program PKK adanya ketidakseimbangan antara persentase pelaksanaan proses pembelajaran dengan pertanggungjawaban keuangan dan terdapat beberapa lembaga yang pelaksanaan pembelajarannya kurang sesuai dengan jadwal yang direncanakan.
3. Adanya perubahan penempatan kerja peserta didik pada program PKK sehubungan dengan kebutuhan tenaga kerja pada DUDIKA.
4. Pada program PKW, pendampingan rintisan usaha belum dilakukan secara optimal karena tidak adanya anggaran untuk pendampingan rintisan usaha.
5. Masih terdapat lembaga kursus dan pelatihan yang menyelenggarakan program PKK tapi belum melaporkan jumlah peserta didik yang sudah bekerja, dan program PKW belum melaporkan jumlah peserta didik yang sudah merintis usaha pada aplikasi *tracer study*.

Langkah antisipasi yang diambil untuk mengatasi permasalahan/hambatan yang dihadapi agar target indikator kinerja dapat tercapai antara lain:

1. Melakukan koordinasi secara intensif dengan tim pengembang aplikasi program PKK untuk mempercepat kesiapan penggunaan aplikasi.
2. Melakukan pendampingan melalui pertemuan daring untuk penyusunan pertanggungjawaban keuangan, dan menegur lembaga penyelenggara yang belum melaksanakan pembelajaran sesuai dengan jadwal yang direncanakan.
3. Melakukan pembaharuan data penempatan kerja sehingga peserta didik dapat bekerja sesuai dengan kebutuhan DUDIKA.
4. Mempersiapkan format pendampingan rintisan usaha agar proses pendampingan dapat dilakukan secara terukur dan terencana dengan memanfaatkan *best practice* penyelenggaraan program PKW serta hasil evaluasi dampak program PKW.
5. Melakukan monitoring secara berkala untuk pelaporan data peserta didik yang telah bekerja atau berwirausaha di aplikasi *tracer study*.

Strategi yang dilakukan agar target indikator kinerja dapat tercapai antara lain:

1. Penyusunan kurikulum dan bahan ajar bersama dengan industri, serta *sharing resources* peralatan praktek dengan industri.



2. Memperkuat kemitraan dengan industri dan UMKM baik itu melalui program magang, perekrutan, mendatangkan dan melibatkan instruktur dari industri.
3. Memperkuat pola padanan anggaran baik dengan pemda maupun industri.
4. Melakukan koordinasi dengan pihak dinas pendidikan kabupaten kota melalui skema padanan anggaran, agar dapat memberikan perhatian lebih kepada lembaga kursus dan pelatihan di wilayah kerjanya untuk pengembangan potensi lembaga-lembaga tersebut di level kabupaten kota melalui program PKK dan PKW.
5. Mendorong lembaga kursus dan pelatihan untuk dapat lebih meningkatkan kualitas lembaga sebagai *training provider* agar dapat memberikan hasil yang maksimal yakni lulusan program PKK dan PKW yang sesuai dengan kebutuhan DUDIKA melalui peningkatan pengelolaan *teaching factory* yang lebih terukur dan peningkatan kualitas pelaksanaan uji kompetensi di TUK melalui program-program pengimbasan bimbingan teknis dan peningkatan kompetensi bagi para penguji dan instruktur.
6. Meningkatkan kerjasama dengan perguruan tinggi melalui program MSIB yakni memberikan kesempatan kepada para mahasiswa untuk melaksanakan magang di lembaga kursus dan pelatihan.

IKP 2.4 Persentase satuan pendidikan yang menerapkan pembelajaran berkualitas, penjaminan mutu, dan kerja sama dengan Dunia Kerja

Satuan Pendidikan berdasarkan pasal 1 PP Nomor 57 Tahun 2021 adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur formal, nonformal, dan informal pada setiap jenjang dan jenis pendidikan. Lingkup satuan pendidikan vokasi adalah SMK, Perguruan Tinggi Penyelenggara Pendidikan Vokasi, dan LKP bidang vokasional.

Pembelajaran dikatakan berkualitas apabila pembelajaran melibatkan seluruh komponen utama proses belajar mengajar, yaitu guru, siswa dan interaksi antara keduanya, serta didukung oleh berbagai unsur-unsur pembelajaran, meliputi kurikulum yang sudah diselaraskan dengan dunia kerja, metode pembelajaran (PBL, Tefa, CBL, CML), dan sarana prasarana yang menunjang, termasuk platform digital. Penjaminan Mutu Pendidikan adalah suatu mekanisme yang sistematis, terintegrasi, dan berkelanjutan untuk memastikan bahwa seluruh proses penyelenggaraan pendidikan telah sesuai dengan standar mutu. Kerja sama Satuan Pendidikan Vokasi dengan dunia kerja meliputi:



1. Satuan Pendidikan Vokasi yang belum pernah melakukan kerja sama dengan dunia kerja.
2. Satuan Pendidikan Vokasi yang sudah bermitra dengan dunia kerja, tetapi perlu diperluas jumlah mitranya.
3. Satuan Pendidikan Vokasi yang sudah melaksanakan kerja sama, dan perlu ditindak lanjuti dengan pola kemitraan berkelanjutan dalam bentuk program kegiatan nyata, yang dapat mendorong terwujudnya link and match.

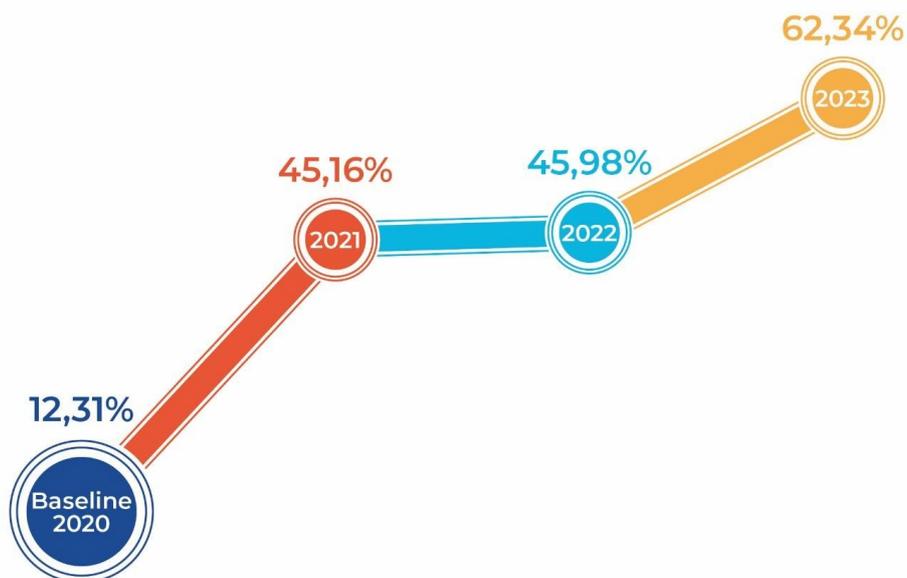
Formula perhitungan untuk IKP 2.4 adalah dengan menjumlahkan jumlah satuan pendidikan vokasi dengan pembelajaran berkualitas dengan jumlah satuan pendidikan vokasi yang mengimplementasikan standar mutu pendidikan vokasi (8 + i) serta jumlah satuan pendidikan vokasi yang memiliki kerja sama dengan dunia kerja kemudian dibagi dengan jumlah satuan pendidikan vokasi dan dikalikan 100%.

$$\text{Realisasi IKP} = \frac{\text{Jumlah satuan pendidikan vokasi dengan pembelajaran berkualitas + yang mengimplementasikan 8+i + yang memiliki kerja sama dengan dunia kerja}}{\text{Jumlah Satuan Pendidikan Vokasi}} \times 100\%$$

Indikator Kinerja Program	Capaian 2022	Tahun 2023			Target Akhir Renstra 2024	% Realisasi terhadap Target Akhir Renstra 2024
		Target	Realisasi	%		
Persentase satuan pendidikan yang menerapkan pembelajaran berkualitas, penjaminan mutu, dan kerja sama dengan Dunia Kerja	45,98	55	62,34	113,34	60	103,9

Capaian IKP 2.4 pada tahun 2023 diperoleh dari perhitungan penjumlahan satuan pendidikan vokasi dengan pembelajaran berkualitas, jumlah satuan pendidikan yang mengimplementasikan 8+1, dan jumlah satuan pendidikan yang memiliki kerjasama dengan dunia kerja, diperoleh hasil sebanyak 16.591 satuan pendidikan, kemudian dibagi dengan jumlah satuan pendidikan sebanyak 26.612 satuan pendidikan, sehingga mendapatkan capaian sebesar 62,34%. Jika dibandingkan dengan capaian tahun 2022 sebesar 45,98%, capaian ini mengalami peningkatan sebesar 16,36%, dan capaian ini sudah memenuhi target yang ditetapkan pada tahun 2023 sebesar 55%, atau mencapai 113,34%.

Jika dibandingkan dengan target akhir renstra tahun 2024 sebesar 60%, capaian ini telah mencapai 103,9%. Capaian ini harus dipertahankan, karena IKP ini dihitung secara tahunan dan bukan akumulasi dari tahun-tahun sebelumnya. Tentunya masih diperlukan inovasi dan strategi untuk mempertahankan dan meningkatkan capaian di tahun berikutnya.



Gambar 3.32 Grafik Trend Capaian IKP 2.4



Gambar 3.33 Grafik Trend capaian dan perbandingan capaian 2022, target 2023, capaian 2023 dan target akhir renstra

Dokumentasi kegiatan



Gambar 3.34 Peluncuran Buku Praktik Baik Pendidikan Vokasi "Mendobrak Mitos: 20 Kisah Inspiratif Pendidikan Vokasi" dan Pembukaan ASEAN TVET Conference



Gambar 3.35 Penandatanganan Perjanjian Kerja Sama (PKS) antara PT. Erajaya Swasembada dengan Satuan Pendidikan Vokasi



Gambar 3.36 Peragaan Busana Karya Vokasi di Jakarta Muslim Fashion Week 2024



Gambar 3.37 Pelatihan Instruktur Kursus di BBPPMPV BBL dan BBPPMPV Bispar



Gambar 3.38 Pelatihan Peningkatan Kompetensi dan Manajerial Kepala Sekolah dan Pelatihan Guru Upskilling dan Reskilling di BBPPMPV BMTI

Program/kegiatan yang dilaksanakan dalam upaya pencapaian target indikator kinerja yang ditetapkan antara lain:

1. Penandatanganan 293 kesepakatan yang terbentuk diberbagai daerah pada tahun 2023 yaitu berasal dari program rintisan kemitraan dan ekosistem kemitraan. Rintisan Kemitraan merupakan upaya yang dilakukan dalam mewujudkan pendidikan vokasi yang selaras dengan kebutuhan Dunia Usaha dan Dunia Industri (DUDI) melalui Akuisisi Kemitraan Baru antara Satuan Pendidikan Vokasi (SPV) dengan DUDI. Sedangkan strategi pada Ekosistem Kemitraan adalah melakukan terobosan pendekatan baru dalam menjalin kemitraan, yang semula dilakukan melalui pendampingan secara *head to head* antara SPV dan industri, kemudian dilakukan secara masif melalui pembentukan ekosistem kemitraan berbasis potensi daerah. Program ini diselenggarakan dengan dukungan pendanaan dari Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP).
2. Mahakarya Vokasi Adibusana di Jakarta *Muslim Fashion Week* pada 21 Oktober 2023 dan *Trade Expo Indonesia (TEI)* selama lima hari pada



18-22 Oktober 2023. Pada kegiatan JMFV, 12 Satuan Pendidikan Vokasi berkontribusi menampilkan 72 karya busana. Sedangkan pada kegiatan TEI sebanyak 6 Satuan Pendidikan Vokasi memamerkan hasil karya inovasi dari masing-masing SPV.

3. Konferensi Pelatihan dan Pendidikan Vokasi skala ASEAN (ASEAN TVET) dalam bentuk FGD pada bulan Juli 2023 di Batam, dengan tajuk "*Collaborative Framework on TVET Reformation in Encouraging Innovation through Collaboration Between TVET and Business Entity/Industry*" dan menghasilkan *Batam Recommendation on TVET* yang akan diserahkan kepada ASEAN *Secretariat* dan kemudian disampaikan kepada negara anggota untuk diimplementasikan pada pengembangan pendidikan vokasi di negara masing-masing. Konferensi ini dihadiri oleh perwakilan dari 10 negara ASEAN dan Timor Leste, dimana masing-masing negara mengirimkan empat delegasi yang terdiri dari pihak pemerintah, pihak industri, politeknik dan organisasi non pemerintahan.
4. Melaksanakan peluncuran / *launching* buku praktik baik pendidikan vokasi, berjudul "Mendobrak Mitos Vokasi" dengan mengundang perwakilan dari DUDI, Kementerian/Lembaga, Kedutaan Besar, Asosiasi, serta Satuan Pendidikan Vokasi. Buku ini merupakan hasil kolaborasi antara Tempo Institute dengan Direktorat Kemitraan dan Penyelarasan DUDI yang berisi 20 Kisah Inspiratif Pendidikan Vokasi dari berbagai daerah di Tanah Air, yang pada akhir peluncuran didistribusikan kepada para peserta yang hadir.
5. Guru kejuruan dan kepala sekolah yang mendapatkan *upskilling* dan *reskilling* berstandar industri yang dilaksanakan oleh BBPPMPV/BPPMPV sebanyak 14.639 orang, dengan rincian:
 - Bidang Bangunan dan Listrik sebanyak 2.028 orang
 - Bisnis dan Pariwisata sebanyak 3.334 orang
 - Bidang Mesin dan Teknologi Industri sebanyak 2.328 orang
 - Bidang Otomotif dan Elektronika sebanyak 3.316 orang
 - Bidang Seni dan Budaya sebanyak 1.373 orang
 - Kelautan, Perikanan dan TIK sebanyak 1.156 orang
 - Pertanian sebanyak 1.104 orang
6. Instruktur kursus yang mendapatkan kompetensi industri bidang keahlian teknologi terapan yang dilaksanakan oleh BBPPMPV/BPPMPV sebanyak 388 orang, dengan rincian:
 - Bidang Bangunan dan Listrik sebanyak 104 orang
 - Bisnis dan Pariwisata sebanyak 43 orang
 - Bidang Mesin dan Teknologi Industri sebanyak 40 orang
 - Bidang Otomotif dan Elektronika sebanyak 39 orang



- Bidang Seni dan Budaya sebanyak 38 orang
- Kelautan, Perikanan dan TIK sebanyak 69 orang
- Pertanian sebanyak 55 orang

Faktor keberhasilan dalam pencapaian target indikator kinerja antara lain:

1. Adanya terobosan pendekatan baru dalam menjalin kemitraan, yang semula dilakukan melalui pendampingan secara *head to head* antara satuan pendidikan vokasi dan industri, kemudian dilakukan secara masif melalui pembentukan Ekosistem Kemitraan berbasis potensi daerah dalam rangka meningkatkan program kerjasama.
2. Pemanfaatan aplikasi Sikerma memberikan kemudahan kepada semua pemangku kepentingan dalam melakukan pendataan kerja sama dengan mitra industri, sehingga semua kerja sama dapat tercatat dan terdokumentasi dengan baik.
3. Penerapan metode pembelajaran *blended* (daring dan luring) untuk efektifitas waktu dan anggaran.
4. Pemberian bantuan modal usaha kepada peserta didik Program Kecakapan Wirausaha dan Program SMK Kewirausahaan.

Hambatan/kendala/permasalahan/faktor penghambat yang dihadapi dalam upaya pencapaian target antara lain:

1. Sebagian wilayah belum bisa melakukan *kick off* karena masih menunggu pendanaan dari LPDP, selain itu ada wilayah yang belum siap melaksanakan *kick off* dikarenakan sulitnya koordinasi antar anggota konsorsium PTV.
2. Penyeragaman Skema Sertifikasi pada LSP P1 SMK, dimana terdapat perbedaan versi penerjemahan dari tim pusat pengembangan dan pembinaan bahasa (Pustanda) dan asesor, yaitu tim Pustanda berdasarkan tekstual, sedangkan dari sisi asesor menerjemahkan secara kontekstual di lapangan, sehingga penyeragaman skema sertifikasi pada LSP P1 SMK lebih lama dari waktu yang ditentukan.
3. Belum adanya saluran komunikasi yang efektif untuk mengerahkan industri dalam jumlah yang cukup banyak agar mengikuti sosialisasi program pepadanan dukungan pada Ditjen Pendidikan Vokasi tahun 2024.
4. Koordinasi lintas instansi dan *stakeholder* pada pelaksanaan program-program di bidang kemitraan terkadang membutuhkan proses dan waktu yang panjang, seperti dalam hal penyamaan persepsi, penyesuaian jadwal pertemuan, dan pembagian peran dalam pelaksanaan program/kegiatan.



5. Pada saat pelatihan berlangsung sering ada keluhan-keluhan dari peserta kegiatan terkait kondisi fisik maupun kondisi fasilitas lokasi pelatihan.
6. Peningkatan kompetensi penggunaan peralatan praktik pada pelatihan *upskilling* dan *reskilling* terkendala dengan terbatasnya peralatan praktek, dimana seharusnya untuk 1 peserta menggunakan 1 alat dan dilakukan diklat yang berjenjang mulai dari tingkat dasar sampai dengan tingkat lanjutan.
7. Keterbatasan biaya/anggaran (khususnya untuk mendampingi SMK PK di wilayah Papua, Papua Tengah, Papua Selatan, Papua Pegunungan), dan ada satu SMK PK yang sulit dijangkau secara geografis (SMK Kemaam) sehingga tidak dilakukan pendampingan.
8. Satuan Pendidikan yang didampingi secara luring masih perlu pendampingan berkelanjutan mengenai PBD.
9. Distribusi untuk materi tambahan terlalu banyak dibandingkan dengan materi inti, serta terjadi di beberapa pelatihan tidak adanya keselarasan antara materi dengan skema sertifikasi.

Langkah antisipasi yang diambil untuk mengatasi permasalahan/hambatan yang dihadapi agar target indikator kinerja dapat tercapai antara lain:

1. Berkoordinasi secara intensif dengan PTV pengampu dan LPDP untuk mempercepat pencairan dana dan terlaksananya *kick off* di daerah serta untuk wilayah lainnya yang belum siap melaksanakan *kick off*, dan telah melakukan pendampingan secara lebih intensif kepada PTV pengampu di wilayah tersebut.
2. Penyeragaman Skema Sertifikasi pada LSP P1 SMK dilakukan penyepakatan antara tim asesor dengan tim Pustanda. Kesepakatannya telah tertuang dalam Berita Acara yang ditandatangani oleh seluruh peserta.
3. Membuat grup whatsApp komunitas industri mitra pendidikan vokasi untuk mempermudah penyampaian informasi terkait program.
4. Dalam hal koordinasi, berupaya mengevaluasi dan menyesuaikan jadwal pelaksanaan program agar berjalan sesuai linimasa yang ditentukan serta melakukan koordinasi lebih intensif dengan instansi atau *stakeholder* terkait.
5. Perbaikan dan evaluasi bagi pelaksana pelatihan terkait fasilitas, sarana dan prasarana.
6. Pengadaan peralatan praktek yang dibutuhkan sehingga setiap peserta *upskilling* dan *reskilling* mendapat 1 alat praktek dan melakukan desain diklat dimulai dari tingkat dasar sampai dengan tingkat advance.



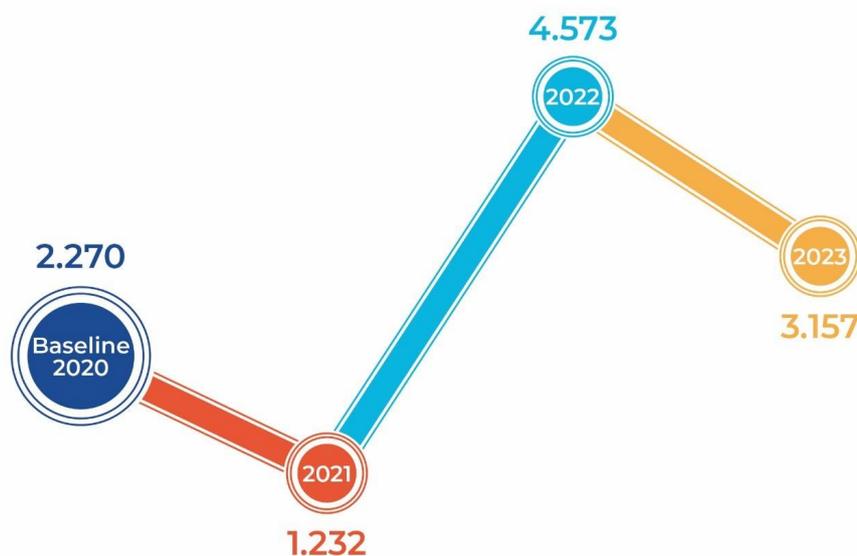
7. Memberikan penawaran ke pihak SMK Kemaam untuk dilakukan pendampingan di Merauke, akan tetapi pihak satuan pendidikan pun terkendala biaya transportasi dan akomodasi dari Kemaam ke Merauke.
8. Perlu adanya pendampingan luring yang berkelanjutan, tidak hanya sekali pertemuan saja.
9. Melakukan proses penjadwalan kegiatan sehingga peserta diklat tidak terganggu dengan proses pelatihan, serta melakukan analisis terkait durasi pelatihan untuk *upskilling* dan *reskilling*.
10. Melakukan pengkajian ulang terhadap materi pelatihan.

Strategi yang dilakukan agar target indikator kinerja dapat tercapai antara lain:

1. Meningkatkan kompetensi dan kapabilitas bermitra satuan pendidikan vokasi melalui pendampingan dan detasering/pengimbasan kemitraan dengan harapan kedepannya satuan pendidikan vokasi akan lebih mandiri dalam bermitra dengan industri.
2. Meningkatkan akuisisi keahlian melalui pemenuhan skema sertifikasi untuk program studi pendidikan vokasi serta mengimplementasikan ke dalam proses pembelajaran.
3. Membedalam peta *demand-supply* pendidikan vokasi, serta mengimplementasikan penyelarasan pendidikan vokasi dengan dunia kerja.
4. Melibatkan pemangku kepentingan dari sejak awal penyusunan program sehingga ketika program akan diluncurkan seluruh pihak yang terlibat sudah sepakat.
5. Program Penguatan Ekosistem Kemitraan untuk Pengembangan Inovasi Berbasis Potensi Daerah pada tahun 2024 fokus pada implementasi *innovation planning* melalui jejaring kemitraan daerah.
6. Pelaksanaan pelatihan *upskilling* dan *reskilling* yang dilakukan secara daring dan luring, SMK PK yang dijadikan sebagai pusat belajar, membentuk e-klinik pembelajaran, melakukan magang di industri, dan pelaksanaan uji kompetensi keahlian oleh LSP/Dudika.
7. Pelaksanaan pelatihan *upskilling* dan *reskilling* segera dilaksanakan setelah juknis terbit, dengan sebelumnya dilakukan pemetaan pengajar dan panitia yang terlibat.

Sasaran Program 3. Meningkatnya riset, inovasi dan ilmu pengetahuan dari PT Vokasi

Sampai dengan tahun 2023, peningkatan riset, inovasi dan ilmu pengetahuan dari PT Vokasi mengalami peningkatan dibandingkan dengan capaian 2022, sebagaimana terlihat pada tabel berikut,



Gambar 3.39 Grafik Trend capaian baseline 2020, 2021, dan 2022 Trend capaian

Strategi yang dilakukan untuk mencapai sasaran program ini diantaranya dengan memberikan intensif kepada dosen/peneliti serta pemberian bantuan pemerintah untuk pelaksanaan riset melalui program *matching fund*.

IKP 3.1 Jumlah keluaran penelitian PT Vokasi yang diterapkan oleh masyarakat

Luaran penelitian yang dimaksudkan dalam indikator ini meliputi karya tulis ilmiah, karya terapan, dan karya seni. Kriteria penerapan di masyarakat yaitu:

1. Karya Ilmiah

Jurnal ilmiah, buku akademik, dan bab (*chapter*) dalam buku akademik dipakai oleh pemerintah, perusahaan, atau organisasi luar dan diterapkan dalam sebuah proyek atau kegiatan; hasil penelitian dipakai sebagai bahan mengajar oleh dosen lain; atau buku berhasil diterbitkan dengan skala distribusi tingkat nasional.

2. Karya Terapan

Produk fisik, digital, dan algoritma (termasuk *prototipe*) mendapat paten nasional, mendapat pengakuan asosiasi, dipakai oleh industri/perusahaan atau lembaga pemerintah/non pemerintah; atau terdapat kemitraan antara investor dan perusahaan atau organisasi



pemerintah/non pemerintah berskala nasional; dan pengembangan invensi dengan mitra didanai oleh, dikembangkan bersama dengan, atau digunakan oleh industri di dalam negeri.

3. Karya Seni

Karya Visual, Audio, Audio-visual, atau pertunjukan merupakan karya asli, dipublikasikan dalam pameran atau pertunjukan resmi nasional, dan diakuisisi oleh industri atau pemerintah; Desain konsep, desain produk, desain komunikasi visual, desain arsitektur, desain kriya merupakan karya asli, dipublikasikan dalam pameran atau pertunjukan resmi di daerah maupun nasional, dan diakuisisi oleh industri atau pemerintah;

Karya tulis novel, sajak, puisi, notasi musik merupakan karya asli, karya dipublikasikan/didiskusikan di festival atau acara pertunjukan berskala nasional, karya diterbitkan, baik oleh penerbit akademik maupun penerbit komersial yang bereputasi; atau karya dibiayai oleh industri atau pemerintah; dan

Karya preservasi mendapat *sponsorship*/pendanaan dari organisasi nonpemerintah, dipublikasikan dalam pameran atau pertunjukan resmi nasional, atau karya diakuisisi atau dibiayai oleh sektor privat atau industri atau pemerintah.

Formula perhitungan untuk IKP 3.1 adalah dengan menghitung jumlah penelitian PT Vokasi yang diterapkan oleh masyarakat. Satuan yang digunakan adalah karya dengan metode perhitungan non kumulatif.

Indikator Kinerja Program	Capaian 2022	Tahun 2023			Realisasi s.d Tahun 2023 (Akumulasi)	Target Akhir Renstra 2024 (Akumulasi)	% Realisasi terhadap Target Akhir Renstra 2024
		Target	Realisasi	%			
Jumlah keluaran penelitian PT Vokasi yang diterapkan oleh masyarakat	4.573	2.611	3.157	120,91	11.232	11.341	99,04

Capaian IKP 3.1 pada tahun 2023 yaitu sebanyak 3.157 karya, sedangkan capaian tahun 2022 sebanyak 4.573 karya, maka capaian mengalami penurunan yaitu sebanyak 1.416 karya. Penurunan pencapaian dikarenakan belum terhitung semua karya di tahun 2023, karya yang belum terhitung karena belum terupload semua keluaran di aplikasi dan baru akan terhitung di bulan April tahun berikutnya. Namun capaian tersebut melebihi target yang ditetapkan pada tahun 2023 sebanyak 2.611 karya, dengan persentase sebesar 120,91%. Ketercapaian target tidak lepas dari dukungan Perguruan Tinggi Vokasi yang mendaftarkan Kekayaan Intelektual yang didanai oleh perguruan tinggi (mandiri), tidak hanya mengandalkan dana insentif dari Direktorat Teknis.

Kemudian untuk membandingkan capaian terhadap target akhir renstra tahun 2024, perlu menjumlahkan capaian dari awal tahun renstra



sampai dengan tahun berjalan. Maka, capaian pada IKP 3.1 sampai dengan tahun 2023 adalah sebanyak 11.232 karya, dengan rincian, baseline di tahun 2020 sebanyak 2.270 karya, capaian di tahun 2021 sebanyak 1.232 karya, capaian 2022 sebanyak 4.573 karya, dan capaian tahun 2023 sebanyak 3.157 karya. Jika dibandingkan dengan target akhir renstra tahun 2024 sebanyak 11.341 karya, IKP ini telah mencapai sebesar 99,04%. Tentunya diperlukan inovasi untuk mencapai target tersebut.

Sasaran Program 3

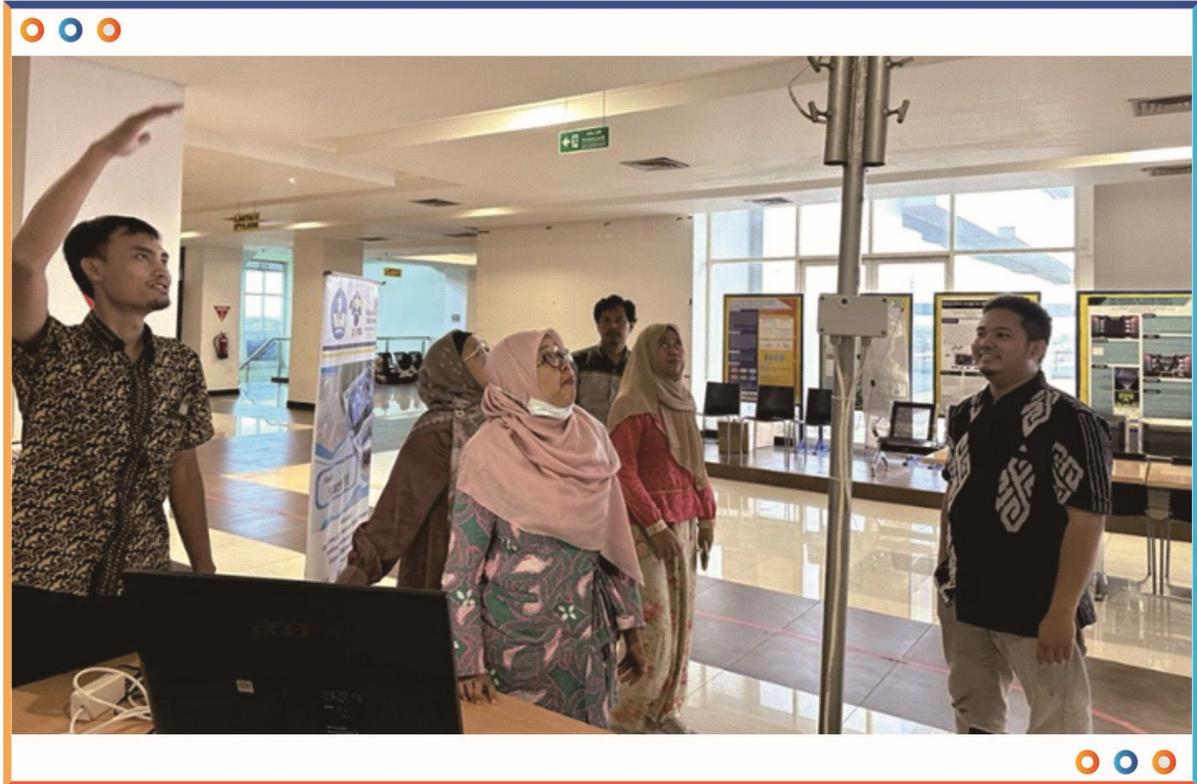


Gambar 3.40 Grafik Perbandingan capaian 2022, target 2023, dan capaian 2023

Dokumentasi kegiatan



Gambar 3.41 Seminar Hasil pada program PPM



Gambar 3.42 Program *Matching Fund* pada penelitian yang berjudul Pembuatan *Smart Lamp*



Gambar 3.43 Program Kekayaan Intelektual (KI) dan Penelitian Inovasi *Mobile Robot* di Industri Fotografi

Program/kegiatan yang dilaksanakan dalam upaya pencapaian target indikator kinerja yang ditetapkan antara lain:

1. *Matching Fund*, merupakan program yang memberikan bantuan untuk mendorong kerjasama/kolaborasi yang saling menguntungkan antara perguruan tinggi dan mitra berbasis riset dan/atau kepakaran perguruan tinggi untuk menyelesaikan masalah DUDI atau pemberdayaan masyarakat. *Maching Fund* yang didanai dari hasil seleksi PT Vokasi adalah sebanyak 297 proposal dari 100 lembaga yang dilaksanakan oleh Direktorat Akademik PTV. *Matching Fund* pun



dilaksanakan di masing-masing politeknik dan AKN dengan realisasi 117 lembaga.

2. Pemberian insentif kepada dosen/peneliti untuk mendaftarkan Kekayaan Intelektual (KI) pada program Insentif Sentra Kekayaan Intelektual yang menghasilkan 162 judul.
3. Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (PPM) yang dipublikasikan pada aplikasi BIMA dan SINTA/SCOPUS/SCIMAGO baik yang berasal dari insentif yang diberikan maupun melalui anggaran mandiri perguruan tinggi adalah sebanyak 2.702 artikel.

Faktor keberhasilan dalam pencapaian target indikator kinerja antara lain:

1. Jumlah keluaran penelitian dan pengabdian masyarakat bisa melebihi target karena banyak artikel yang terdaftar di Sinta dengan dana mandiri dari perguruan tinggi.
2. Pembentukan dan penguatan sentra Kekayaan Intelektual (KI) di setiap perguruan tinggi negeri vokasi.
3. Pada program *matching fund* memberikan kesempatan kepada industri untuk berkontribusi dalam melakukan riset dan hilirisasi bersama dengan perguruan tinggi.

Hambatan/kendala/permasalahan/faktor penghambat yang dihadapi dalam upaya pencapaian target antara lain:

1. Terdapat perubahan baik dalam format maupun isi dari juknis *matching fund* dibandingkan dengan tahun sebelumnya sehingga membutuhkan waktu untuk memfinalisasi juknis.
2. Perubahan dalam mekanisme proses seleksi dan beberapa hal teknis *matching fund* dari mekanisme proses seleksi dan teknis program dari tahun sebelumnya.
3. Terkendala sistem dalam identifikasi usulan dari PT vokasi yang berasal dari Unista, sehingga tidak dapat dinilai.
4. Kesulitan dalam melakukan penugasan evaluasi proposal kepada reviewer yang jumlahnya terbatas, pada bidang keahlian yang sesuai dengan usulan proposal, sehingga berdampak pada pergeseran jadwal seleksi.
5. Target pertemuan bimbingan teknis penyusunan dokumen permohonan paten secara luring adalah peserta yang mendaftarkan draf patennya ke Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI). Namun, sebagian besar peserta tidak dapat mendaftarkan patennya saat bimtek karena perlu koordinasi terlebih dahulu dengan LPPM dan anggota peneliti.



6. Beberapa penerima insentif paten/paten sederhana granted terlambat menerima informasi pengumuman penerima insentif sehingga terlambat menyampaikan data pencairan dana.
7. Terdapat perubahan standar biaya keluaran (SBK) penelitian dari yang sebelumnya berbasis bidang fokus diubah menjadi berbasis keluaran.
8. Form penilaian monitoring dan evaluasi keberlanjutan pada program penelitian dan pengabdian masyarakat di laman BIMA tidak muncul.

Langkah antisipasi yang diambil untuk mengatasi permasalahan/hambatan yang dihadapi agar target indikator kinerja dapat tercapai antara lain:

1. Melakukan pertemuan dengan semua tim matching fund bersama pihak *reviewer* dari PT untuk merevisi juknis disesuaikan dengan perubahan yang ada.
2. Melaksanakan komunikasi dan koordinasi secara intensif dengan tim kedaireka, baik tim *Front Office* (FO) maupun *Back Office* (BO), untuk penyesuaian tampilan pada aplikasi di menu seleksi.
3. Melaksanakan koordinasi dan monitoring dalam sistem secara intensif dan berkala kedalam sistem *backoffice.kedaireka.com* serta melakukan penandaan ulang proposal yang salah dan melakukan pemberitahuan atau notifikasi kepada pengusul bersangkutan. Dimana, dalam hal ini, pengusul yang belum bisa melengkapi dokumen administrasi dapat diarahkan pada tahap selanjutnya.
4. Melakukan koordinasi dan komunikasi dengan *reviewer* dan pengusul serta mempersiapkan skema penjadwalan yang dinamis dan tepat sasaran.
5. Terkait dengan kendala selama pelaksanaan bimbingan teknis penyusunan dokumen permohonan paten, memberikan tambahan waktu selama 10 hari untuk para peserta melakukan pendaftaran patennya ke DJKI.
6. Menghubungi langsung penerima insentif untuk menyampaikan informasi bahwa yang bersangkutan lolos sebagai penerima insentif paten, dan memberi tahu bahwa penerima harus mempersiapkan dokumen yang diperlukan untuk pencairan dana.
7. Penyesuaian perubahan SBK pada draf panduan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat tahun 2024.
8. *Reviewer* mengisi formulir penilaian monitoring dan evaluasi keberlanjutan pada program penelitian dan pengabdian masyarakat secara manual.



Strategi yang dilakukan agar target indikator kinerja dapat tercapai antara lain:

1. Melaksanakan kemitraan dengan perusahaan dan industri terkait, serta melibatkan industri dalam tahap awal riset untuk memastikan relevansi dan keberlanjutan hasil riset yang sudah dilaksanakan di tahun berjalan.
2. Melaksanakan pelatihan dan workshop kepada industri atau Perguruan Tinggi terkait hasil riset.
3. Melaksanakan publikasi hasil riset secara reguler dalam jurnal ilmiah, buku, atau *platform online* yang diakui, misalkan pada Sinta, Scopus, ataupun Bima.
4. Melaksanakan seleksi awal untuk penerima bantuan *matching fund*, penelitian dan pengabdian masyarakat, dan kekayaan intelektual untuk tahun 2024.

Sasaran Program 4. Meningkatnya akuntabilitas layanan dan pengelolaan anggaran pendidikan, kebudayaan, riset, dan teknologi

Sampai dengan tahun 2023, akuntabilitas layanan dan pengelolaan anggaran pendidikan, kebudayaan, riset, dan teknologi mendapatkan predikat SAKIP yang sama dengan tahun 2022, namun mengalami peningkatan nilai dibandingkan dengan tahun 2022.



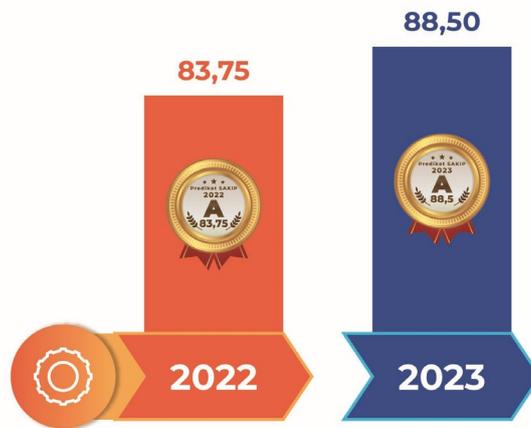
Gambar 3.44 Perbandingan capaian SAKIP tahun 2022 dan 2023

Strategi yang dilakukan untuk peningkatan capaian ini diantaranya berkoordinasi dengan biro perencanaan terkait kelengkapan dokumen SAKIP dan penilaian SAKIP yang sesuai dengan Permenpan RB Nomor 88 Tahun 2021.



IKP 4.1 Predikat SAKIP Ditjen Pendidikan Vokasi

Sasaran Program 4



Gambar 3.45 Grafik Perbandingan nilai SAKIP Ditjen Vokasi tahun 2022 dan 2023

Akuntabilitas kinerja merupakan salah satu dari delapan program yang wajib dijalankan dalam Reformasi Birokrasi Internal (RBI). Penerapan akuntabilitas kinerja pada seluruh instansi pemerintah didasarkan pada Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Akuntabilitas kinerja diterapkan secara berjenjang mulai dari tingkat Kementerian, unit kerja, dan satuan kerja (unit kerja mandiri). Penerapan akuntabilitas dilakukan mulai dari perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja dan evaluasi kinerja.

Evaluasi atas penerapan SAKIP pada seluruh instansi pemerintah dilakukan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN RB). Tujuan dari evaluasi ini adalah untuk menilai tingkat akuntabilitas atau pertanggungjawaban atas hasil (*outcome*) terhadap penggunaan anggaran dalam rangka terwujudnya pemerintahan yang berorientasi kepada hasil (*result oriented government*).

Evaluasi SAKIP pada tahun 2022 dilakukan dengan evaluasi mandiri didampingi Biro Perencanaan yang kemudian direviu oleh evaluator dari Inspektorat Jenderal, Kemendikbudristek. Evaluasi dilakukan dengan memanfaatkan aplikasi Spasikita dengan menggunakan Lembar Hasil Evaluasi (LHE) yang berpedoman pada Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Formula perhitungan pada IKP 4.1 ini dengan menjumlahkan nilai pada masing-masing komponen SAKIP yaitu nilai perencanaan kinerja, nilai pengukuran kinerja, nilai pelaporan kinerja, dan nilai evaluasi kinerja. Lembar Hasil Evaluasi (LHE) dapat diunduh pada aplikasi Spasikita setelah dilakukan

revisi dan ditandatangani oleh Inspektur Jenderal, Kemendikbudristek. Satuan dari IKP ini adalah predikat dengan klasifikasi sebagai berikut

Tabel 3.3 Klasifikasi Predikat SAKIP

Nilai	Predikat	Interpretasi
>90-100	AA	Sangat Memuaskan
>80-90	A	Memuaskan
>70-80	BB	Sangat Baik
>60-70	B	Baik
>50-60	CC	Cukup (memadai)
>30-50	C	Kurang
0-30	D	Sangat Kurang

$$\text{Realisasi IKP} = [\text{Perencanaan Kinerja}] + [\text{Pengukuran Kinerja}] + [\text{Pelaporan Kinerja}] + [\text{Evaluasi Kinerja}]$$

Indikator Kinerja Program	Capaian 2022	Tahun 2023			Target Akhir Renstra 2024	% Realisasi terhadap Target Akhir Renstra 2024
		Target	Realisasi	%		
Predikat SAKIP Ditjen Pendidikan Vokasi	A	A	A	100	A	100

Capaian IKP 4.1 pada tahun 2023 yaitu predikat A dengan nilai 88,5. Berikut rincian nilai pada masing-masing komponen SAKIP;

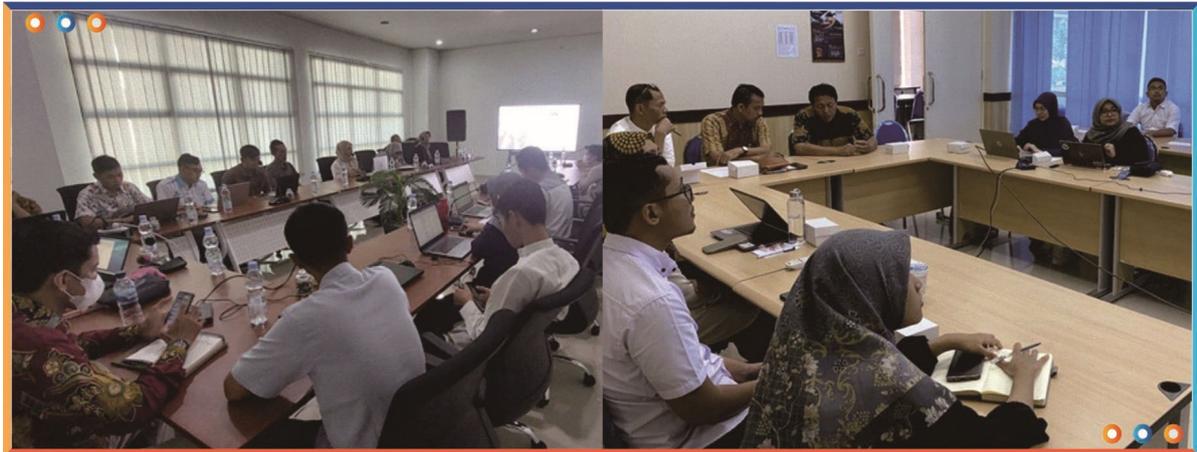
Tabel 3.4 Rincian nilai pada masing-masing komponen SAKIP

Komponen	Bobot	Nilai Akuntabilitas Kinerja 2022
Perencanaan Kinerja	30%	25,5
Pengukuran Kinerja	30%	27
Pelaporan Kinerja	15%	13,5
Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	25%	22,5
Nilai Akuntabilitas Kinerja	A	88,50

Secara predikat capaian ini masih sama dengan capaian tahun 2022, namun secara nilai mengalami peningkatan sebesar 4,75 dimana nilai tahun

2022 sebesar 83,75 sedangkan nilai pada tahun 2023 adalah 88,50. Jika dibandingkan dengan target akhir renstra 2024, capaian IKP ini sudah memenuhi target, namun tentunya masih perlu banyak perbaikan untuk mendapatkan nilai yang lebih maksimal lagi sebagai bentuk perbaikan yang berkesinambungan.

Dokumentasi kegiatan



Gambar 3.46 Asistensi SAKIP bersama Politeknik Negeri Lhokseumawe dan AKN Aceh Barat dan Asistensi SAKIP di AKN Pacitan



Gambar 3.47 Pertemuan bersama Itjen untuk Tindak Lanjut Hasil Evaluasi Sakip



Gambar 3.48 Pertemuan bersama Direktorat dalam penyusunan Pengukuran Kinerja dan Reviu Renstra

Program/kegiatan yang dilaksanakan dalam upaya pencapaian target indikator kinerja yang ditetapkan antara lain:

1. Melakukan evaluasi terhadap perolehan predikat SAKIP tahun 2022 Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi, dengan melakukan pertemuan untuk menyusun tindak lanjut sesuai dengan rekomendasi pada LHE 2022.
2. Menyusun Perjanjian Kinerja Dirjen Pendidikan Vokasi dengan Mendikbudristek TA 2023 melalui aplikasi Spasikita dengan mengacu pada Renstra Kemendikbud Tahun 2020-2024 sesuai dengan Permendikbudristek Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 22 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2020-2024, dan RKAKL Tahun 2023.
3. Menyusun Laporan Kinerja Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi sesuai dengan PermenPAN-RB Nomor 88 Tahun 2021 dan Permendikbudristek Nomor 40 Tahun 2022 serta berkoordinasi dengan seluruh satker untuk memperoleh data dukung untuk penyusunan lakin.
4. Melakukan rapat evaluasi capaian program dan anggaran untuk penyusunan laporan kinerja setiap triwulan.
5. Mempersiapkan dan mendokumentasikan dokumen-dokumen SAKIP yang diperlukan dalam rangka persiapan evaluasi penilaian SAKIP tahun 2023.
6. Melakukan asistensi dan pendampingan SAKIP ke satuan kerja yang mendapatkan nilai BB ke bawah.
7. Mengikuti sosialisasi evaluasi AKIP, serta pemanfaatan aplikasi spasikita untuk evaluasi mandiri.



8. Mengikutsertakan tim evaluasi pada Diklat Sakip yang dilaksanakan oleh Pusdiklat bekerja sama dengan Biro Perencanaan Kemendikbudristek.
9. Melakukan reviu renstra Ditjen Pendidikan Vokasi tahun 2020-2024 untuk target 2023 yang diikuti oleh perwakilan Biro Perencanaan, Direktorat dan BB/BPMPV.
10. Melakukan evaluasi mandiri Sakip pada aplikasi Spasikita didampingi oleh Biro Perencanaan.

Faktor keberhasilan dalam pencapaian target indikator kinerja antara lain:

1. Komitmen Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi dalam memenuhi dokumen terkait sakip.
2. Ketepatan waktu dalam menyusun perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, serta pelaporan kinerja.
3. Pelibatan Satker Pusat, Balai, maupun UPT untuk meningkatkan kualitas Sakip Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi.
4. Pendampingan kepada Satker Pusat, Balai, maupun Politeknik/AKN dalam menyusun dokumen terkait dengan sakip.

Hambatan/kendala/permasalahan/faktor penghambat yang dihadapi dalam upaya pencapaian target antara lain:

1. Terdapat beberapa satker yang belum paham dengan Kertas Kerja Evaluasi Penilaian SAKIP berdasarkan PermenPAN-RB Nomor 88 Tahun 2021, sehingga diperlukan perhatian lebih.
2. Masih terdapat satker yang belum memiliki komitmen untuk melaksanakan penilaian SAKIP.
3. Terdapat batas waktu penyusunan pengukuran kinerja bersamaan dengan batas waktu data capaian kinerja pada tanggal 31 Desember 2023, sehingga banyak satker yang masih membutuhkan tambahan waktu untuk melakukan pengukuran kinerja.
4. Terdapat kendala pada aplikasi Spasikita dalam proses penyusunan revisi perjanjian kinerja tahun 2023 terkait pemutakhiran data anggaran yang belum sesuai.
5. Perhitungan capaian IKP terkait kebermanfaatan baru bisa dilakukan pada akhir Desember 2023 karena menunggu diseminasi data Sakernas oleh Badan Pusat Statistik.



Langkah antisipasi yang diambil untuk mengatasi permasalahan/hambatan yang dihadapi agar target indikator kinerja dapat tercapai antara lain:

1. Melakukan sosialisasi dan asistensi kepada semua satker, baik secara daring maupun dengan mengunjungi satuan kerja.
2. Memfasilitasi penyusunan komitmen bersama antara satker dengan Itjen dalam bentuk Berita Acara setelah dilakukan tindak lanjut hasil evaluasi SAKIP.
3. Mengajukan surat permohonan kepada Kepala Biro Perencanaan untuk perpanjangan batas waktu pengukuran kinerja triwulan IV bagi satker di lingkungan Ditjen Pendidikan Vokasi sampai dengan 10 Januari 2024.
4. Mengajukan surat permohonan kepada Kepala Biro Perencanaan untuk perpanjangan waktu penyusunan revisi perjanjian kinerja bagi satker di lingkungan Ditjen Pendidikan Vokasi sampai dengan 31 Desember 2023.
5. Berkoordinasi dengan Badan Pusat Statistik untuk menghitung capaian Indikator Kinerja Program terkait dengan kebermanfaatan lulusan pendidikan vokasi.

Strategi yang dilakukan agar target indikator kinerja dapat tercapai antara lain:

1. Koordinasi dan melakukan pendampingan kepada satker yang belum melengkapi dokumen SAKIP dan yang mendapatkan predikat di bawah BB.
2. Melakukan evaluasi terhadap hasil kinerja dan mengimplementasikan hasil evaluasi tersebut dalam pelaksanaan program dan anggaran.
3. Menyelesaikan semua dokumen SAKIP dengan tepat waktu dan sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan dalam pedoman penyusunan.
4. Menindaklanjuti hasil evaluasi SAKIP untuk perbaikan kinerja di tahun berikutnya.

Sasaran Program 5. Meningkatnya pelaksanaan reformasi birokrasi Kemendikbudristek

Sampai dengan tahun 2023, pelaksanaan reformasi birokrasi di lingkungan Ditjen Pendidikan Vokasi mengalami peningkatan dibandingkan dengan tahun 2022, sebagaimana terlihat pada grafik berikut,

Sasaran Program 5



Gambar 3.49 Grafik Perbandingan capaian IKP antara realisasi 2022, target 2023 dan capaian 2023

Peningkatan capaian ini dipengaruhi oleh strategi yang dilakukan diantaranya dengan melakukan pendampingan penilaian ZIWBK dan WBBM kepada satuan kerja di Lingkungan Ditjen Pendidikan Vokasi.

IKP 5.1 Jumlah Satker di Ditjen Pendidikan vokasi mendapatkann predikat ZIWBK/WBBM

Berdasarkan PermenPANRB Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah. Persyaratan penetapan Unit Kerja/Satuan Kerja menuju ZIWBK/WBBM sebagai berikut:

Tabel 3.5 Persyaratan penetapan Unit Kerja/Satuan Kerja menuju ZIWBK/WBBM

Syarat	Menuju WBK	Menuju WBBM
Nilai Total	75	85 Telah mendapat predikat menuju WBK
Nilai Minimal Pengungkit	40	48
Bobot Nilai Minimal per area pengungkit	60%	75%
Nilai Komponen Hasil "Pemerintah yang Bersih dan Akuntabel" minimal	18,25	19,50
👉 Nilai Sub Komponen "Survei Persepsi Anti Korupsi" minimal	15,75 (survei 3,60)	15,75 (survei 3,60)
👉 Nilai Sub komponen "Kinerja Lebih Baik" minimal	2,50	3,75
Nilai Komponen Hasil "Pemerintah yang Bersih dan Akuntabel" minimal	14,00 (survei 3,20)	15,75 (survei 3,60)



Syarat satuan kerja yang dapat ditetapkan sebagai Zona Integritas WBK adalah:

1. Semua Unit Kerja/ satuan kerja yang berada di kawasan tersebut memenuhi kriteria unit berpredikat Menuju WBK.
2. Sudah terdapat keterpaduan/integrasi ketatalaksanaan (proses bisnis) antar unit kerja/satuan kerja yang ada di kawasan tersebut. Skor integrasi proses bisnis minimal 6,5 untuk predikat WBK.

Syarat satuan kerja yang dapat ditetapkan sebagai Zona Integritas WBBM adalah:

1. Satuan kerja tersebut telah mendapat predikat Kawasan Menuju WBK.
2. Semua Unit Kerja/ satuan kerja yang memenuhi kriteria unit berpredikat Menuju WBBM.
3. Sudah terdapat keterpaduan/integrasi ketatalaksanaan (proses bisnis) antar unit kerja/satuan kerja. Skor integrasi proses bisnis minimal 7,5 untuk predikat Menuju WBBM.
4. Memiliki inovasi layanan yang menyentuh masyarakat dan telah direplikasi oleh satuan kerja lain.

Penilaian dilakukan oleh Kemenpan RB dan hasil akan diumumkan pada bulan Desember setiap tahun. Formula perhitungan pada IKP ini adalah dengan menghitung jumlah satker yang ditetapkan oleh KemenPAN sebagai satker berpredikat ZIWBK/WBBM dengan metode perhitungan kumulatif.

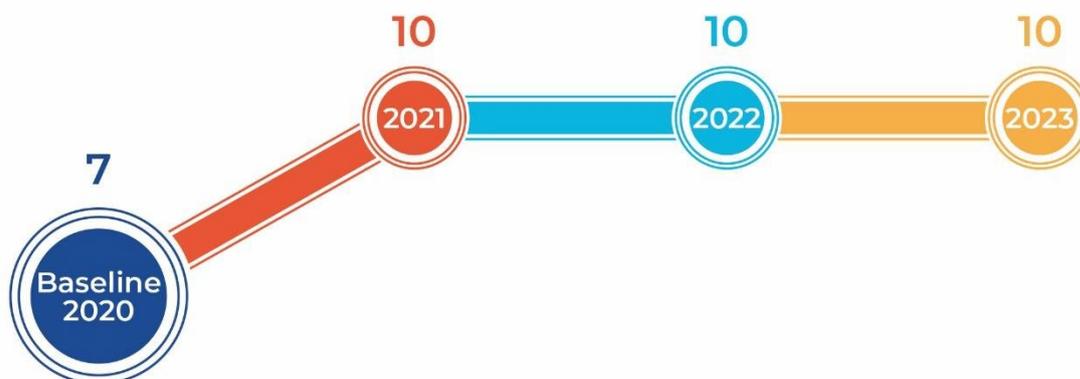
Indikator Kinerja Program	Capaian 2022	Tahun 2023			Target Akhir Renstra 2024	% Realisasi terhadap Target Akhir Renstra 2024
		Target	Realisasi	%		
Jumlah Satker di Ditjen Pendidikan vokasi mendapatkann predikat ZI-WBK/WBBM	10	26	10	38,46	46	21,74

Capaian IKP 5.1 sampai dengan tahun 2023 yaitu sebanyak 9 satker menjadi WBK dan 1 satker menjadi WBBM. Satker yang mendapatkan predikat WBK adalah BBPPMPV Bidang Mesin dan Teknologi Industri, BBPPMPV Bidang Bangunan dan Listrik, BBPPMPV Bisnis dan Pariwisata, BBPPMPV Pertanian, BBPPMPV Seni dan Budaya, BBPPMPV Bidang Otomotif dan Elektronika, Politeknik Negeri Bandung, Politeknik Manufaktur Negeri Bandung, dan Politeknik Negeri Batam, sedangkan yang mendapatkan predikat WBBM adalah BBPPMPV Bidang Otomotif dan Elektronika. Capaian tahun 2023 masih sama dengan tahun 2022 dan belum memenuhi target tahun 2023 sebanyak 26 satker atau baru mencapai 38,46%. Ketidaktercapaian ini salah satunya disebabkan perubahan sistem penilaian KemenPAN RB dalam pelaksanaan ZIWBK/WBBM.

Jika dibandingkan dengan target akhir renstra tahun 2024 sebanyak 46 satker, maka untuk IKP ini baru mencapai 21,74%. Salah satu upaya strategi yang dilakukan untuk mencapai strategi tersebut adalah dengan



memberikan pelatihan kepada asesor yang akan melakukan pendampingan kepada satuan kerja yang diusulkan menjadi satker WBK/WBBM dan memetakan kondisi real satuan kerja, sehingga mempermudah penilaian.



Gambar 3.50 Grafik Trend Capaian IKP 5.1



Gambar 3.51 Grafik Trend capaian dan perbandingan capaian 2022, target 2023, capaian 2023 dan target akhir renstra

Dokumentasi kegiatan



Gambar 3.52 Pendampingan menuju ZI WBK di Politeknik Negeri Tanah Laut, BPPMPV KPTK dan Politeknik Negeri Ujung Pandang

Program/kegiatan yang dilaksanakan dalam upaya pencapaian target indikator kinerja yang ditetapkan antara lain:

1. Sosialisasi kewajiban pelaksanaan ZIWBK/WBBM kepada seluruh satker di lingkungan Ditjen Pendidikan Vokasi.
2. Memastikan satker telah melakukan pencaangan ZIWBK/WBBM.
3. Melakukan pendampingan kepada satker untuk melakukan pengisian LKE Mandiri ZIWBK/WBBM pada aplikasi SIAZIK.
4. Pendampingan kepada satker yang dinilai layak dan potensial untuk proses persiapan penilaian ZIWBK/WBBM untuk tahun 2024.
5. Pendampingan lanjutan persiapan penilaian TPN oleh KemenPAN RB.



Faktor penyebab kegagalan dalam pencapaian target indikator kinerja antara lain:

1. Pelaksanaan RBI dan ZI masih dianggap sebagai tugas tambahan disamping tugas jabatan yang melekat pengampu suatu jabatan. Jika hal ini menjadi sudut pandang pimpinan dalam suatu unit kerja maka berdampak pada kurangnya perhatian (kebijakan dan anggaran) pimpinan pada program kerja dan agenda reformasi birokrasi dan zona integritas.
2. Perubahan sistem penilaian KemenPAN RB dalam pelaksanaan ZI WBK/WBBM.
3. Tugas assesor merupakan tugas tambahan, sehingga tim assesor tidak dapat fokus dalam assessment pelaksanaan ZI satuan kerja.

Hambatan/kendala/permasalahan/faktor penghambat yang dihadapi dalam upaya pencapaian target antara lain:

1. Keterbatasan sumber daya untuk melaksanakan pendampingan pada 18 satker yang diusulkan, karena dengan sumber daya yang ada pada tahun 2023 hanya mampu mendampingi 7-8 satker.
2. Satker harus dibimbing secara rutin dalam pengisian LKE dan memastikan dokumen-dokumen yang dipersyaratkan dapat dipenuhi.
3. Motivasi satker untuk melaksanakan ZIWBK/WBBM masih rendah karena seringkali satker mempertanyakan manfaat bagi satker apabila telah memperoleh predikat ZIWBK/WBBM.
4. Terdapat kecenderungan pada satker, merasa pencaangan ZIWBK/WBBM hanya akan menambah beban kerja.
5. Tim TPI Itjen tidak memberikan umpan balik atas penilaian yang telah dilaksanakan, sehingga sulit melakukan koreksi perbaikan terhadap kesalahan pada dokumen maupun pengisian LKE.
6. Sering terjadi benturan pada jadwal kegiatan tim Asesor dalam koordinasi maupun pendampingan sehingga pelaksanaannya belum bisa dimaksimalkan.
7. Terdapat informasi akan terjadi perubahan pada LKE tahun 2024.

Langkah antisipasi yang diambil untuk mengatasi permasalahan/hambatan yang dihadapi agar target indikator kinerja dapat tercapai antara lain:

1. Memulai proses pendampingan satker lebih cepat dengan mengirimkan surat edaran yang ditandatangani oleh Direktur Jenderal Pendidikan Vokasi supaya satker dapat melaksanakan pengisian LKE sejak bulan November 2023 dari yang sebelumnya dilaksanakan mulai awal tahun berjalan.



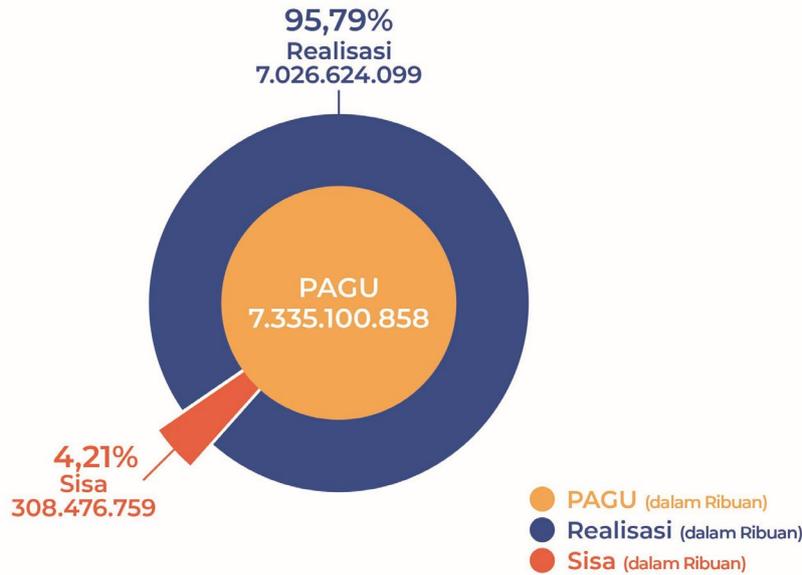
2. Melakukan penambahan asesor untuk pelaksanaan pendampingan pada satker.
3. Mengusulkan penambahan Indikator terkait ZI WBK/WBBM pada Perjanjian Kinerja Direktur Politeknik Negeri/Akademi Komunitas Negeri untuk meningkatkan motivasi satker untuk menerapkan ZI WBK/WBBM.
4. Perlu dibahas kemungkinan mewajibkan satker untuk pencaanangan ZIWBK/WBBM sebagai bentuk komitmen satker dalam melaksanakan ZIWBK/WBBM.
5. Perlu dipertimbangkan untuk menyusun petunjuk pengisian LKE bagi satker supaya mempermudah satker mengisi LKE dan melengkapi kesesuaian dokumen yang diperlukan.

Strategi yang dilakukan agar target indikator kinerja dapat tercapai antara lain:

1. Melaksanakan sosialisasi LKE SIAZIK Desember 2023 sehingga memberikan waktu yang cukup panjang kepada satker dalam pengisian LKE sekaligus memudahkan tim asesor dalam penilaian, memperkuat Tim Asesor unit utama dengan mengadakan pertemuan para asesor setiap bulan, dan Asesor dapat memaksimalkan komunikasi dengan satuan kerja terpilih untuk mempersiapkan diri dalam penilaian TPI.
2. Penetapan penghargaan kepada satker yang telah mendapatkan predikat ZI WBK/WBBM, dan sanksi bagi yang tidak melaksanakan.
3. Menerbitkan surat edaran Dirjen Pendidikan Vokasi perihal kewajiban pelaksanaan ZI WBK/WBBM oleh satuan kerja di lingkungan Ditjen Pendidikan Vokasi sesuai dengan Kepmendikbud Nomor 1176/P/2020 tentang Pedoman Pembangunan ZI WBK/WBBM Kemendikbud.

Realisasi Anggaran

Pagu Anggaran Ditjen Pendidikan Vokasi tahun 2023 sesuai dengan perjanjian kinerja revisi adalah sebesar Rp7.335.100.858.000 dan terealisasi sebesar Rp7.026.624.098.913 dengan persentase 95,79% Pagu tersebut digunakan untuk membiayai pencapaian 5 (lima) SP dengan 8 (delapan) IKP yang terdistribusi ke 62 (enam puluh dua) satker, yaitu 6 (enam) satker Pusat, 49 (empat puluh sembilan) Politeknik dan AKN, dan 7 (tujuh) Balai/Balai Besar.



Gambar 3.53 Grafik Capaian Realisasi Anggaran Tahun 2023

Tabel 3.6 Realisasi Anggaran per IKP

No	Sasaran Program	Indikator Kinerja Program	Target Perjanjian Kinerja Tahun 2022	Target Perjanjian Kinerja Tahun 2022	%
1	Meningkatnya partisipasi pendidikan tinggi	1.1 Persentase peningkatan mahasiswa perguruan tinggi vokasi	353.758.676.000	338.795.309.958	96%
2	Meningkatnya mutu dan relevansi lulusan pendidikan dan pelatihan vokasi sesuai dengan kebutuhan dunia kerja	2.1 Persentase lulusan SMK yang bekerja / berwirausaha dalam satu tahun setelah kelulusan dengan gaji/pendapatan minimum sebesar 1x UMP	1.202.906.976.000	1.186.634.076.324	99%
		2.2 Persentase lulusan Perguruan Tinggi Penyelenggara Pendidikan Vokasi yang bekerja/berwirausaha dalam satu tahun setelah kelulusan dengan gaji/pendapatan minimum sebesar 1,2x UMP	2.255.495.462.000	2.069.097.701.811	92%
		2.3 Persentase lulusan kursus dan pelatihan yang memiliki pekerjaan atau berwirausaha	317.039.268.000	316.912.550.296	100%
		2.4 Persentase satuan pendidikan yang menerapkan pembelajaran berkualitas, penjaminan mutu, dan kerja sama dengan Dunia Kerja	314.843.718.000	312.723.934.022	99%
3	Meningkatnya riset, inovasi dan ilmu pengetahuan dari PT Vokasi	3.1 Jumlah keluaran penelitian PT Vokasi yang diterapkan oleh masyarakat	275.358.566.000	253.473.949.770	92%
4	Meningkatnya akuntabilitas layanan dan pengelolaan anggaran pendidikan, kebudayaan, riset, dan teknologi	4.1 Predikat SAKIP Ditjen Pendidikan Vokasi	104.500.000.000	103.314.326.465	99%
5	Meningkatnya pelaksanaan reformasi birokrasi Kemendikbudristek	5.1 Jumlah Satker di Ditjen Pendidikan vokasi mendapatkann predikat ZI-WBK/WBBM)	2.511.198.192.000	2.444.907.679.176	97%
Jumlah			7.335.100.858.000	7.025.859.527.822	96%

Efisiensi Anggaran

Pada tahun 2023, Ditjen Pendidikan Vokasi telah melakukan efisiensi anggaran sebesar Rp149.555.186.000. Hasil efisiensi tersebut diperoleh dari sisa anggaran yang dilakukan dari setiap kode kegiatan. Anggaran hasil efisiensi tidak digunakan untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan namun dikembalikan ke kas negara, dengan rincian sebagai berikut,

1. Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen Pendidikan Vokasi efisiensi sebanyak Rp31.831.834.000.



2. Pembinaan Sekolah Menengah Kejuruan efisiensi sebanyak Rp57.671.379.000.
3. Pembinaan Kemitraan dan Penyelarasan Dunia Usaha dan Dunia Industri efisiensi sebanyak Rp6.241.108.000.
4. Pembinaan Kursus dan Pelatihan efisiensi sebanyak Rp1.239.429.000.
5. Pendidikan dan Pelatihan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Vokasi efisiensi sebanyak Rp5.177.349.000.
6. Pembinaan Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Pendidikan Tinggi Vokasi efisiensi sebanyak Rp46.390.136.000.
7. Pengembangan Kelembagaan dan Peningkatan Kualitas Sumber Daya Pendidikan Tinggi Vokasi efisiensi sebanyak Rp1.003.951.000.

***Cross Cutting*/Kolaborasi Program Ditjen Pendidikan Vokasi**

Dalam rangka pelaksanaan program *link and match 8+i*, Ditjen Pendidikan Vokasi melakukan kolaborasi dengan unit kerja lain di lingkungan Kemendikbudristek, hal ini tentunya dilakukan untuk mendorong ketercapaian program-program Ditjen Pendidikan Vokasi. Adapun kolaborasi yang dilakukan diantaranya adalah:

1. Kolaborasi dengan Badan Pusat Statistik (BPS) dalam menyusun buku Profil Pendidikan Vokasi berbasis Dapodik, Susenas, Sakernas. Kolaborasi ini menghasilkan buku Profil Pendidikan Vokasi yang digunakan sebagai sumber data kebijakan.
2. Kolaborasi program peningkatan kompetensi dosen dengan Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP) Kementerian Keuangan sebagai upaya yang dilakukan Direktorat Kelembagaan dan Sumber Daya Pendidikan Tinggi Vokasi untuk memberikan kesempatan sebanyak-banyaknya kepada dosen vokasi untuk mengikuti program peningkatan kompetensi dosen vokasi baik melalui sertifikasi kompetensi, sertifikasi profesi maupun pelatihan atau magang industri dan perguruan tinggi. Peningkatan kompetensi dosen ini memberikan dampak kepada sumber daya Pendidikan Tinggi Vokasi untuk meningkatkan kompetensi yang dimiliki yang dilaksanakan dalam 3 (tiga) skema yaitu sertifikasi kompetensi, sertifikasi profesi, dan pelatihan atau magang industri dan perguruan tinggi.
3. Kolaborasi dengan Kementerian Perdagangan pada program *Tread Expo Indonesia* (TEI) dan *Jakarta Moeslim Fashion Week* (JMFW). Satuan pendidikan vokasi yang berpotensi untuk terlibat pada program tersebut berpartisipasi dalam menyiapkan hasil karya inovasi. Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi berperan sebagai pemegang kebijakan, menyusun persiapan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi, sedangkan



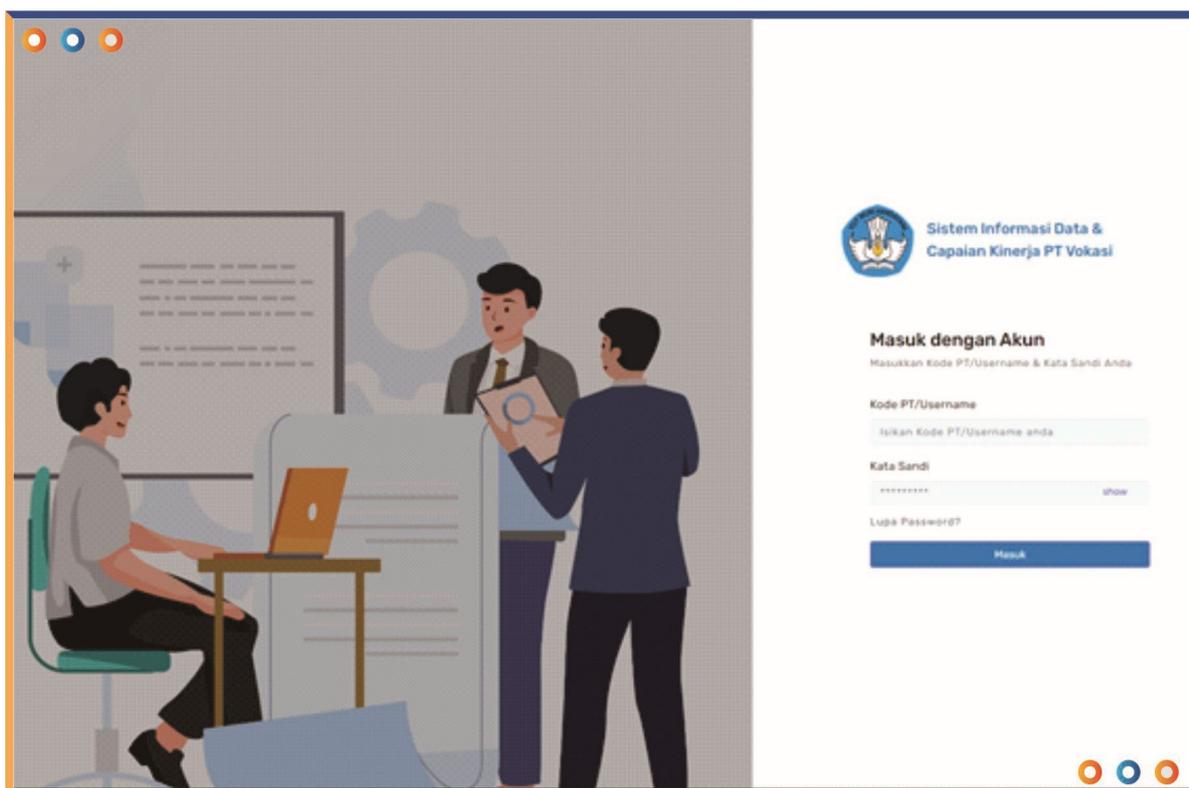
- Kementerian Perdagangan berperan sebagai koordinator dan penanggung jawab program.
4. Kolaborasi dengan Ditjen Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi salah satunya yaitu program *Matching Fund*. Kolaborasi yang dilakukan untuk program *Matching Fund* adalah Panduan Pelaksanaan *Matching Fund* bersama, yaitu untuk Satu Perguruan Tinggi dengan satu mitra DUDI, Satu Perguruan Tinggi dengan beberapa mitra DUDI, Beberapa Perguruan Tinggi dengan satu mitra DUDI, dan Beberapa Perguruan Tinggi dengan beberapa mitra DUDI. Selain itu, *Platform* bersama yang digunakan yaitu aplikasi Kedaireka. *Platform* ini bertujuan untuk membuka wadah kolaborasi agar proses inovasi, invensi, dan dapat bergerak lebih cepat ke sebuah produk yang dapat dirasakan langsung oleh masyarakat luas.
 5. Kolaborasi dengan Ditjen Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi adalah penggunaan aplikasi PD Dikti, *Tracer Study* dan *Sister* untuk penghitungan capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Perguruan Tinggi Vokasi yang akan bermuara ke aplikasi Sidakin sebagai *Dashboard* IKU Perguruan Tinggi Vokasi.
 6. Kolaborasi dengan Ditjen Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi dalam pelaksanaan Program Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) untuk memberikan kesempatan belajar di luar kampus kepada 850.000 mahasiswa. Kampus merdeka memberikan hak belajar di luar kampus selama 2 semester dalam kegiatan magang, proyek di desa, asistensi mengajar, pertukaran pelajar, penelitian/riset, kewirausahaan, proyek mandiri dan proyek kemahasiswaan.
 7. Kolaborasi dengan Ditjen Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah diantaranya pelaksanaan Biaya Operasional Sekolah (BOS). Kolaborasi yang dilakukan untuk pelaksanaan BOS adalah penyusunan juknis, penetapan sasaran dan pelaksanaan pemantauan.
 8. Kolaborasi dengan Badan Standar Kurikulum dan Asesmen Pendidikan diantaranya penyusunan bersama instrumen evaluasi SMK PK, pengolahan dan analisis hasil SMK PK, raport pendidikan, adaptasi kurikulum merdeka di SMK, perencanaan berbasis data di SMK, digitalisasi sekolah di SMK, dan kemitraan di industri dengan SMK.
 9. Kolaborasi dengan Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan diantaranya penggunaan aplikasi Sistem Informasi Manajemen untuk Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan (SIM PKB) yang dikembangkan oleh Ditjen GTK dan dimanfaatkan untuk penjangkaran peserta pelatihan di BBPPMPV/BPPMPV.
 10. Kolaborasi dengan Sekretariat Jenderal diantaranya kolaborasi dengan Pusdatin terkait Dapodik SMK, PDDIKTI, SPBE, dan *tracer study*.

11. Kolaborasi dengan Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa diantaranya kolaborasi pembinaan terkait Tata Naskah Dinas.

Inovasi yang Dilakukan

1. Aplikasi SIDAKIN

Pengembangan Aplikasi Sistem Informasi Data & Capaian Kinerja PT Vokasi (SIDAKIN) melalui aplikasi sidakin.vokasi.kemdikbud.go.id yang digunakan untuk mengumpulkan, menyimpan, menghitung, dan menyajikan data capaian kinerja dari 8 Indikator Kinerja Utama (IKU) Perguruan Tinggi Vokasi. Tujuan dibuat aplikasi ini adalah untuk memudahkan pengelolaan dan pemantauan capaian IKU secara efisien dan terintegrasi. SIDAKIN menyediakan kemampuan untuk mengakses data dari berbagai sumber dan menyajikan dalam bentuk laporan yang mudah dipahami.



Gambar 3.54 Halaman *Log-In* Aplikasi Sidakin

2. Aplikasi Sikerma

Sistem Informasi Manajemen Kerjasama (SIKERMA) DUDI Dengan Satuan Pendidikan Vokasi, merupakan aplikasi pendataan terkait kerja sama antara Satuan Pendidikan Vokasi dengan Mitra Kerja sama baik dari Dunia Usaha maupun Dunia Industri. *Outcome* dari aplikasi Sikerma menyajikan data terkait kerjasama antara Satuan Pendidikan Vokasi dengan Mitra Kerjasama



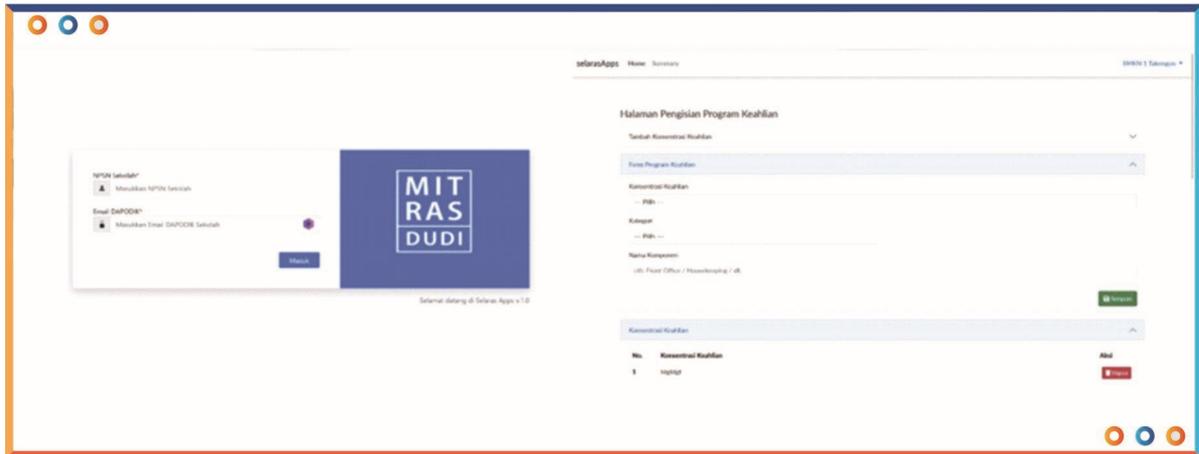
baik dari Dunia Usaha maupun Dunia Industri dan digunakan untuk dasar pengambilan kebijakan. Aplikasi ini dapat diakses melalui sikerma.vokasi.kemdikbud.go.id.



Gambar 3.55 Halaman Log-In Aplikasi Sikerma

3. Aplikasi Sistem Penyelarasan Berbasis Web (Si-Laras)

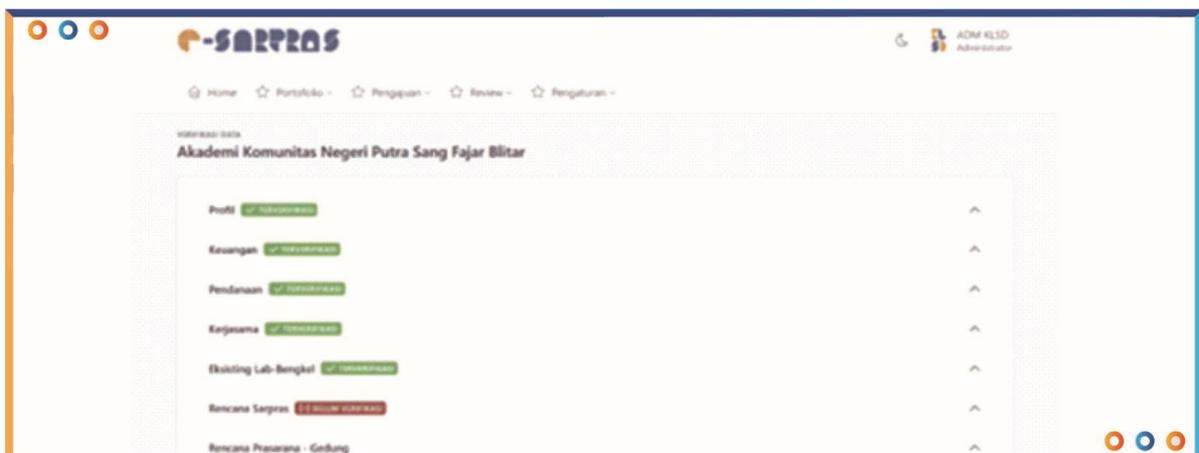
Tingkat keselarasan satuan pendidikan vokasi saat ini masih berdasarkan perspektif individu yang menyebabkan kebijakan yang dikeluarkan tidak tepat sasaran. Hal ini cukup menghambat indikator suksesnya penyelenggaraan pendidikan vokasi di Indonesia, yaitu terbentuknya keselarasan antara satuan pendidikan vokasi dengan industri. Oleh sebab itu, perlu adanya analisis mengenai tingkat keselarasan satuan pendidikan vokasi dengan industri. Sistem informasi berbasis web yang diberi nama "Si-Laras", diharapkan dapat menjadi model dan alat ukur tingkat penyelarasan di satuan pendidikan vokasi. Si-Laras merupakan sistem berbasis web sebagai *decision support system* terkait tingkat penyelarasan. Alamat *website* relevansi.mitrasdudi.id. *Outcome* yang akan dirasakan di kemudian hari adalah pemangku kebijakan akan memiliki standar yang tepat dalam mengukur keselarasan sehingga kebijakan yang dikeluarkan lebih fokus kepada penyelesaian masalah, penciptaan nilai dan peningkatan kualitas penyelarasan antara satuan pendidikan vokasi dengan industri.



Gambar 3.56 Aplikasi Sistem Penyelarasan Berbasis Web (Si-Laras)

4. Aplikasi Sarpras Surat Berharga Syariah Negara (SBSN)

Dalam rangka melakukan proses efisiensi terkait proses administrasi pendaftaran yang dilakukan oleh satker yang akan mengajukan proposal program Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) maka dibuatlah aplikasi e-Sarpras untuk penerima bantuan SBSN. Pada aplikasi yang berbasis website ini dapat melihat persyaratan yang diajukan oleh satker yang mengajukan proposal bantuan program Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) dan melakukan verifikasi data tersebut. Seluruh proses verifikasi persyaratan yang menjadi bagian dari syarat administrasi, substansi, dan kelayakan untuk program Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) dilakukan melalui aplikasi ini. Dengan tujuan untuk mempermudah satker melihat perkembangan data dukung yang sudah diupload dan mengetahui sejauh mana proses verifikasi data yang dilakukan. Selain itu satker juga dapat segera melakukan perbaikan apabila terdapat data dukung yang belum memadai dan perlu diperbaiki selama batas waktu dalam proses pendaftaran dan verifikasi masih dibuka.

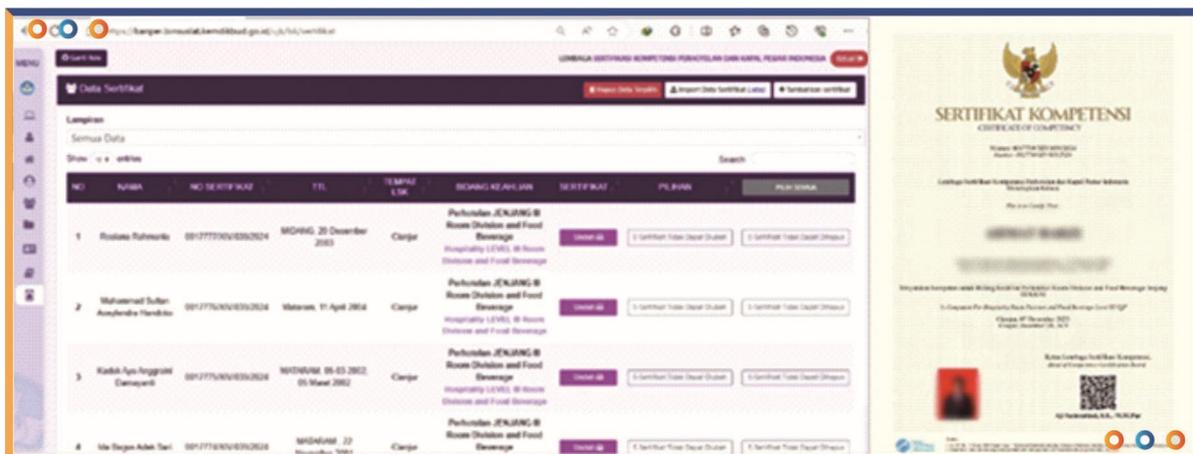


Gambar 3.57 Aplikasi Sistem Penyelarasan Berbasis Web (Si-Laras)



5. Aplikasi Sertifikat Kompetensi Elektronik

Sesuai dengan amanat Permendiknas Nomor 70 Tahun 2008 tentang Uji Kompetensi, bahwa penyediaan blanko sertifikat dilakukan oleh pemerintah dalam hal ini Direktorat Kursus dan Pelatihan. Sejalan dengan perkembangan digital yang semakin maju, blanko fisik sertifikat beralih menjadi berbasis elektronik. Hal ini juga berdampak pada penyediaan sertifikasi kompetensi oleh LSK yang sekarang mulai diberlakukan tanda tangan elektronik pada Sertifikat Uji Kompetensi. Pada kondisi sebelumnya, LSK harus mengambil blanko sertifikat ke Kantor Direktorat Kursus dan Pelatihan. Tetapi setelah adanya inovasi Sertifikat Kompetensi Elektronik, pengadaan untuk pembelian blanko sertifikat dapat dikurangi sehingga penggunaan anggaran menjadi lebih efektif dan efisien. Selain itu, lewat adanya sertifikat kompetensi elektronik ini proses sertifikasi dapat berjalan dengan lebih cepat.



Gambar 3.58 Aplikasi Sertifikat Kompetensi Elektronik dan contoh E-Sertifikat

6. Program Transformasi LKP menjadi Akademi Komunitas

Direktorat Kursus dan Pelatihan diberi mandat untuk menyelenggarakan fasilitasi pada program Transformasi LKP Menjadi Akademi Komunitas. Menurut Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2013 bahwa Akademi Komunitas adalah perguruan tinggi yang menyelenggarakan pendidikan vokasi setingkat diploma satu dan/atau diploma dua dalam satu atau beberapa cabang ilmu pengetahuan dan/atau teknologi tertentu yang berbasis keunggulan lokal atau untuk memenuhi kebutuhan khusus.

Konsep Akademi Komunitas menyelenggarakan program studi yang sesuai dengan potensi yang ada di suatu daerah. Selain itu, Akademi



Komunitas bekerja sama dengan industri lokal yang ada di daerah untuk menghasilkan lulusan yang dapat bekerja di industri lokal. Akademi komunitas berperan aktif dalam menanggapi dan menerima setiap aspirasi yang bersifat saling membangun antara pemerintah daerah, masyarakat dan industri lokal dalam memajukan suatu daerah.

Pada tahun 2023, terdapat sebanyak lima LKP telah dinyatakan siap untuk bertransformasi menjadi Akademi Komunitas/PTV, satu diantaranya sudah ditetapkan melalui Surat Keputusan (SK) dan empat diantaranya sudah sampai ke proses verifikasi pada aplikasi Silemkerma. Adapun kelima Lembaga dimaksud dapat dilihat melalui tabel di bawah ini.

Tabel 3.7 List LKP yang siap bertransformasi menjadi Akademi Komunitas/PTV

No	Nama LKP	Jenis Keterampilan
1	LKP Puspita Martha	Tata Rias
2	LKP <i>Overseas Training Center</i>	Perhotelan & Kapal Pesiar
3	LKP Widyagama	TIK & Administrasi Perkantoran
4	LKP <i>Cyber Media College</i>	Animasi
5	LKP LPP STKOM Sapta Computer	Komputer & Bisnis

Penghargaan yang Dicapai

Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi mendapatkan beberapa penghargaan selama tahun 2023 antara lain sebagai berikut:

1. SPS Awards 2023 – Indonesia *Digital Media Awards (IDMA) 2023*

Direktorat Jenderal (Ditjen) Pendidikan Vokasi meraih *The Best of Government Social Media, Silver Winner* dalam ajang SPS Awards 2023 yang digelar di Jakarta. Penghargaan tersebut diberikan atas kreativitas Ditjen Pendidikan Vokasi dalam mengelola media sosial.

Mengusung tema besar "Kolaborasi dan Inovasi untuk Kemandirian Pers Indonesia," Serikat Perusahaan Pers (SPS) kembali menggelar SPS Award 2023. Acara ini merupakan apresiasi bagi seluruh pengelola media daerah maupun nasional yang mendedikasikan dirinya untuk senantiasa menjaga semangat dari para pejuang industri pers dalam mengarungi dinamika perkembangan zaman yang penuh ketidakpastian.

2. *The 1st Indonesia GPR Awards (IGA) 2023*

The 1st Indonesia GPR Awards (IGA) merupakan ajang kompetisi kinerja kehumasan pemerintah (*Government Public Relations/GPR*). Inilah momentum untuk mengukur kinerja kehumasan pemerintah sepanjang tahun



2022. IGA diselenggarakan oleh Humas Indonesia, media berbasis komunitas dan ekosistem humas pemerintah atau *Government Public Relations di Indonesia, member of PR INDONESIA Group*.

3. Nilai Kinerja Anggaran

Pada tahun 2023 Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi meraih prestasi posisi II pada kategori Unit Organisasi Eselon I dengan raihan skor Nilai Kinerja Anggaran (NKA) sebesar 94,87% dengan predikat Sangat Baik untuk pelaksanaan program dan anggaran tahun 2022. Nilai Kinerja Anggaran merupakan gabungan dari nilai Evaluasi Kinerja Anggaran (EKA) dan Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA).

4. Penghargaan dari Dewan Kerajinan Nasional (Dekranas) atas kerjasama dalam pelaksanaan program PKW

Di tahun 2023, Direktorat Kursus dan Pelatihan mendapatkan apresiasi dan penghargaan dari Dewan Kerajinan Nasional Indonesia atas kerja sama pada program Pendidikan Kecakapan Wirausaha. Pemberian penghargaan ini merupakan bentuk apresiasi terhadap upaya Direktorat Kursus dan Pelatihan dalam melakukan kolaborasi program PKW khususnya pada jenis keterampilan Tekun Tenun dan Kriya Indonesia. Kolaborasi yang telah berjalan selama 3 tahun sejak 2020 ini telah mendidik lebih dari 3.000 anak usia 15-25 tahun yang tidak sekolah, lulus tetapi tidak melanjutkan, atau putus sekolah yang masih belum bekerja, untuk memiliki kompetensi kerajinan tangan sekaligus sebagai upaya pelestarian budaya nusantara anak di seluruh Indonesia.



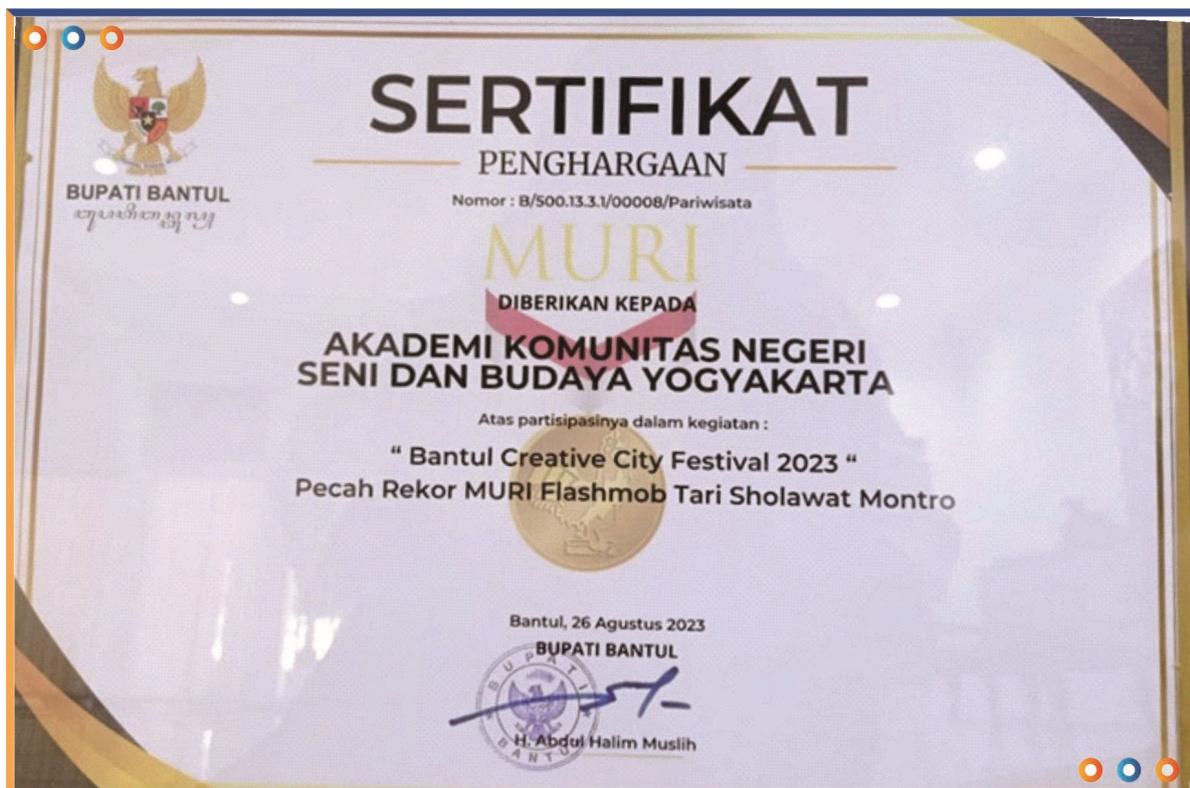
Gambar 3.59 Penghargaan Kehumasan untuk Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi



Gambar 3.60 Penghargaan Nilai Kinerja Anggaran Terbaik



Gambar 3.61 Penghargaan dari Dewan Kerajinan Nasional (Dekranas) atas kerjasama dalam pelaksanaan program PKW dan Juara I Nasional Kontes Robot Indonesia oleh PENS



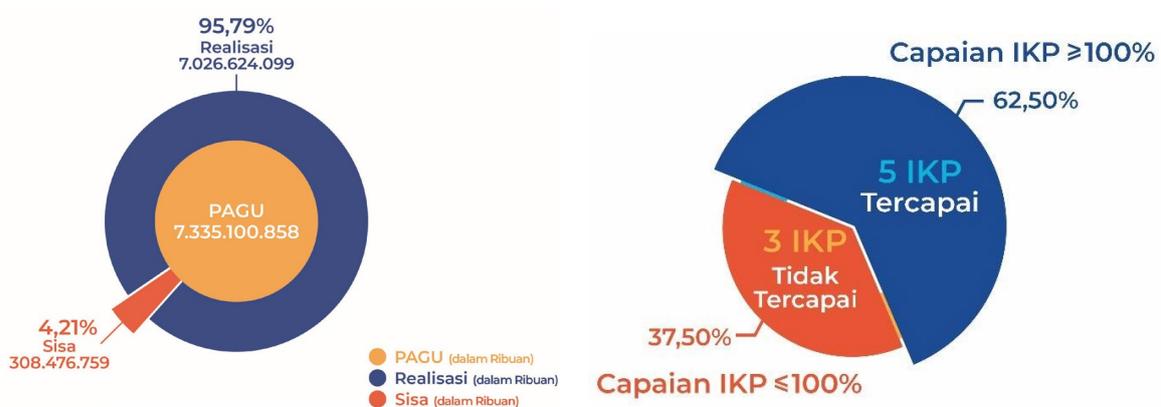
Gambar 3.62 Rekor Muri Flashmob Tari Sholawat Montro



Gambar 3.63 Unit Penyelenggara Pelayanan Publik Terbaik BBPPMPV BBL dan Penghargaan Mitra Kampus Terbaik dalam Penyelenggaraan Vocational *School Graduate Academy Offline*

BAB IV PENUTUP

Sesuai target yang ditetapkan dalam perjanjian kinerja tahun 2023, terdapat 5 Sasaran Program yang didukung dengan 8 Indikator Kinerja Program. Dari 8 Indikator Kinerja Program, sebanyak 5 Indikator Kinerja Program telah tercapai melebihi target yang ditetapkan, sedangkan 3 Indikator Kinerja Program lainnya belum mencapai target yang telah ditetapkan.



Gambar 4.1 Grafik Realisasi Anggaran dan Capaian IKP

Langkah-langkah dan Strategi :

1. Meningkatkan sarana dan prasarana serta aktivitas pada perguruan tinggi vokasi, dengan penyediaan dana Bantuan Operasional Perguruan Tinggi Negeri (BOPTN) Vokasi.
2. Meningkatkan pemerataan kesempatan belajar pada perguruan tinggi vokasi, dengan meningkatkan jumlah mahasiswa DI-DIV/Sarjana Terapan di PTN Vokasi pada kelompok UKT I dan II.
3. Memperluas informasi/melakukan sosialisasi terkait pendidikan tinggi vokasi kepada masyarakat terutama pada kalangan insan pendidikan tingkat menengah, untuk meningkatkan minat terhadap pendidikan tinggi vokasi.
4. Menambah kuota pemberian beasiswa untuk mahasiswa Perguruan Tinggi Vokasi.
5. Memfasilitasi SMK untuk menjalin kerjasama saling menguntungkan dengan dunia usaha, dunia industri dan dunia kerja.



6. Penguatan pembelajaran yang berbasis pada pengembangan minat *entrepreneurship* pada peserta didik, salah satunya dengan model *teaching factory* yang didampingi langsung oleh industri.
7. Pemberdayaan dan pendampingan kepada peserta didik yang berkomitmen untuk mencoba membuka peluang usaha melalui pengembangan produk kreatif dan kewirausahaan dengan memberikan modal bergulir didampingi oleh sekolah.
8. Mengakomodir keterbatasan penerima manfaat program peningkatan kompetensi dosen vokasi, pada pelaksanaan program tahun selanjutnya akan ditambahkan skema bagi dosen dan kuota untuk tenaga kependidikan.
9. Menyesuaikan konten dan format pelaporan data pelaksanaan model pembelajaran *Project Based Learning* (PBL) pada sistem PDDikti untuk mengakomodir kebutuhan yang sesuai Perdirjen Nomor 27 Tahun 2022, dan diperlukan strategi penghitungan data pelaksanaan model pembelajaran PBL.
10. Penyusunan Peta Jalan Implementasi Permendikbudristek Nomor 53 Tahun 2023 agar mendukung penyelarasan Kurikulum Pendidikan Tinggi Vokasi.
11. Melakukan koordinasi dengan pihak dinas pendidikan kabupaten kota melalui skema padanan anggaran, agar dapat memberikan perhatian lebih kepada lembaga kursus dan pelatihan di wilayah kerjanya untuk pengembangan potensi lembaga-lembaga tersebut di level kabupaten kota melalui program PKK dan PKW.
12. Mendorong lembaga kursus dan pelatihan untuk dapat lebih meningkatkan kualitas lembaga sebagai *training provider* agar dapat memberikan hasil yang maksimal yakni lulusan program PKK dan PKW yang sesuai dengan kebutuhan DUDIKA melalui peningkatan pengelolaan *teaching factory* yang lebih terukur dan peningkatan kualitas pelaksanaan uji kompetensi di TUK melalui program-program pengimbasan bimbingan teknis dan peningkatan kompetensi bagi para penguji dan instruktur.
13. Meningkatkan kerjasama dengan perguruan tinggi melalui program MSIB yakni memberikan kesempatan kepada para mahasiswa untuk melaksanakan magang di lembaga kursus dan pelatihan.
14. Memperdalam peta *demand-supply* pendidikan vokasi, serta mengimplementasikan penyelarasan pendidikan vokasi dengan dunia kerja.
15. Program Penguatan Ekosistem Kemitraan untuk Pengembangan Inovasi Berbasis Potensi Daerah pada tahun 2024 fokus pada implementasi *innovation planning* melalui jejaring kemitraan daerah.



16. Pelaksanaan pelatihan *upskilling* dan *reskilling* dengan menggunakan sistem blended (daring dan luring), SMK PK yang dijadikan sebagai pusat belajar, membentuk e-klinik pembelajaran, melakukan magang di industri, dan pelaksanaan uji kompetensi keahlian oleh LSP/Dudika.
17. Melaksanakan kemitraan dengan perusahaan dan industri terkait, serta melibatkan industri dalam tahap awal riset untuk memastikan relevansi dan keberlanjutan hasil riset yang sudah dilaksanakan di tahun berjalan.
18. Melaksanakan pelatihan dan workshop kepada industri atau Perguruan Tinggi terkait hasil riset.
19. Koordinasi dan melakukan pendampingan kepada satker yang belum melengkapi dokumen SAKIP dan yang mendapatkan predikat di bawah BB.
20. Melakukan evaluasi terhadap hasil kinerja dan mengimplementasikan hasil evaluasi tersebut dalam pelaksanaan program dan anggaran.
21. Melaksanakan sosialisasi LKE SIAZIK Desember 2023 sehingga memberikan waktu yang cukup panjang kepada satker dalam pengisian LKE sekaligus memudahkan tim asesor dalam penilaian, memperkuat Tim Asesor unit utama dengan mengadakan pertemuan para asesor setiap bulan, dan Asesor dapat memaksimalkan komunikasi dengan satuan kerja terpilih untuk mempersiapkan diri dalam penilaian TPI.
22. Penetapan penghargaan kepada satker yang telah mendapatkan predikat ZIWBK/WBBM, dan sanksi bagi yang tidak melaksanakan.



LAMPIRAN

1. Perjanjian Kinerja Awal
2. Perjanjian Kinerja Akhir
3. Pengukuran Kinerja
4. Surat Keterangan Telah Reviu



**Perjanjian Kinerja Tahun 2023
Direktur Jenderal Pendidikan Vokasi
Dengan
Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi**

Dalam rangka mewujudkan kinerja pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Kiki Yuliati

Jabatan : Direktur Jenderal Pendidikan Vokasi

untuk selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama : Nadiem Anwar Makarim

Jabatan : Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian kinerja ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian kinerja ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka optimalisasi pencapaian target Perjanjian Kinerja tersebut, baik dalam bentuk penghargaan maupun teguran.

Jakarta, 30 Januari 2023

**Menteri Pendidikan, Kebudayaan,
Riset, dan Teknologi,**

Direktur Jenderal Pendidikan Vokasi,



Nadiem Anwar Makarim



Kiki Yuliati

Target Kinerja

#	Sasaran Program	Indikator Kinerja Program	Target Perjanjian Kinerja 2023
1	[SP 1] Meningkatnya partisipasi pendidikan tinggi	[IKP 1.1] Persentase peningkatan mahasiswa perguruan tinggi vokasi	15.47
2	[SP 2] Meningkatnya mutu dan relevansi lulusan pendidikan dan pelatihan vokasi sesuai dengan kebutuhan dunia kerja	[IKP 2.1] Persentase lulusan SMK yang bekerja/berwirausaha dalam satu tahun setelah kelulusan dengan gaji/pendapatan minimum sebesar 1x UMP	42.18
		[IKP 2.2] Persentase lulusan Perguruan Tinggi Penyelenggara Pendidikan Vokasi yang bekerja/berwirausaha dalam satu tahun setelah kelulusan dengan gaji/pendapatan minimum sebesar 1,2x UMP	47.37
		[IKP 2.3] Persentase lulusan kursus dan pelatihan yang memiliki pekerjaan atau berwirausaha	56.69
		[IKP 2.4] Persentase satuan pendidikan yang menerapkan pembelajaran berkualitas, penjaminan mutu, dan kerja sama dengan Dunia Kerja	55
3	[SP 3] Meningkatnya riset, inovasi dan ilmu pengetahuan dari PT Vokasi	[IKP 3.1] Jumlah keluaran penelitian PT Vokasi yang diterapkan oleh masyarakat	2611
4	[SP 4] Meningkatnya akuntabilitas layanan dan pengelolaan anggaran pendidikan, kebudayaan, riset, dan teknologi	[IKP 4.1] Predikat SAKIP Ditjen Pendidikan Vokasi	A
5	[SP 5] Meningkatnya pelaksanaan reformasi birokrasi Kemendikbudristek	[IKP 5.1] Jumlah Satker di Ditjen Pendidikan vokasi mendapatkann predikat ZI-WBK/WBBM	26

No	Kode	Nama Kegiatan	Alokasi
1	4261	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen Pendidikan Vokasi	Rp. 2.600.978.155.000
2	4262	Pembinaan Sekolah Menengah Kejuruan	Rp. 899.078.355.000
3	4264	Pembinaan Kemitraan dan Penyelarasan Dunia Usaha dan Dunia Industri	Rp. 30.924.750.000
4	4278	Pembinaan Kursus dan Pelatihan	Rp. 127.996.698.000
5	4466	Penyediaan Dana Bantuan Operasional Perguruan Tinggi Negeri Vokasi	Rp. 353.758.676.000
6	4467	Peningkatan Kualitas dan Kapasitas Perguruan Tinggi Vokasi	Rp. 2.016.366.133.000
7	4468	Pendidikan dan Pelatihan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Vokasi	Rp. 291.109.877.000
8	6700	Pembinaan Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Pendidikan Tinggi Vokasi	Rp. 218.840.552.000
9	6701	Pengembangan Kelembagaan dan Peningkatan Kualitas Sumber Daya Pendidikan Tinggi Vokasi	Rp. 107.956.616.000
		TOTAL	Rp. 6.647.009.812.000

Jakarta,30 Januari 2023

**Menteri Pendidikan, Kebudayaan,
Riset, dan Teknologi,**

Direktur Jenderal Pendidikan Vokasi,



Nadiem Anwar Makarim



Kiki Yulianti



**Revisi Perjanjian Kinerja Tahun 2023
Direktur Jenderal Pendidikan Vokasi
Dengan
Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi**

Dalam rangka mewujudkan kinerja pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Kiki Yuliati

Jabatan : Direktur Jenderal Pendidikan Vokasi

untuk selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama : Nadiem Anwar Makarim

Jabatan : Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian kinerja ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian kinerja ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka optimalisasi pencapaian target Perjanjian Kinerja tersebut, baik dalam bentuk penghargaan maupun teguran.

Jakarta, 28 Desember 2023

**Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan
Teknologi,**

Direktur Jenderal Pendidikan Vokasi,



Nadiem Anwar Makarim



Kiki Yuliati

Target Kinerja

#	Sasaran Program	Indikator Kinerja Program	Target Perjanjian Kinerja 2023
1	[SP 1.0] Meningkatnya partisipasi pendidikan tinggi	[IKP 1.1] Persentase peningkatan mahasiswa perguruan tinggi vokasi	15.47
2	[SP 2.0] Meningkatnya mutu dan relevansi lulusan pendidikan dan pelatihan vokasi sesuai dengan kebutuhan dunia kerja	[IKP 2.1] Persentase lulusan SMK yang bekerja/berwirausaha dalam satu tahun setelah kelulusan dengan gaji/pendapatan minimum sebesar 1x UMP	42.18
		[IKP 2.2] Persentase lulusan Perguruan Tinggi Penyelenggara Pendidikan Vokasi yang bekerja/berwirausaha dalam satu tahun setelah kelulusan dengan gaji/pendapatan minimum sebesar 1,2x UMP	47.37
		[IKP 2.3] Persentase lulusan kursus dan pelatihan yang memiliki pekerjaan atau berwirausaha	56.69
		[IKP 2.4] Persentase satuan pendidikan yang menerapkan pembelajaran berkualitas, penjaminan mutu, dan kerja sama dengan Dunia Kerja	55
3	[SP 3.0] Meningkatnya riset, inovasi dan ilmu pengetahuan dari PT Vokasi	[IKP 3.1] Jumlah keluaran penelitian PT Vokasi yang diterapkan oleh masyarakat	2611
4	[SP 4.0] Meningkatnya akuntabilitas layanan dan pengelolaan anggaran pendidikan, kebudayaan, riset, dan teknologi	[IKP 4.1] Predikat SAKIP Ditjen Pendidikan Vokasi	A
5	[SP 5.0] Meningkatnya pelaksanaan reformasi birokrasi Kemendikbudristek	[IKP 5.1] Jumlah Satker di Ditjen Pendidikan vokasi mendapatkann predikat ZI-WBK/WBBM	26

No	Kode	Nama Kegiatan	Alokasi
1	4261	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen Pendidikan Vokasi	Rp. 2.615.698.192.000
2	4262	Pembinaan Sekolah Menengah Kejuruan	Rp. 1.202.906.976.000
3	4264	Pembinaan Kemitraan dan Penyelarasan Dunia Usaha dan Dunia Industri	Rp. 24.683.642.000
4	4278	Pembinaan Kursus dan Pelatihan	Rp. 317.039.268.000
5	4466	Penyediaan Dana Bantuan Operasional Perguruan Tinggi Negeri Vokasi	Rp. 353.758.676.000
6	4467	Peningkatan Kualitas dan Kapasitas Perguruan Tinggi Vokasi	Rp. 2.243.525.947.000
7	4468	Pendidikan dan Pelatihan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Vokasi	Rp. 290.160.076.000
8	6700	Pembinaan Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Pendidikan Tinggi Vokasi	Rp. 172.075.416.000
9	6701	Pengembangan Kelembagaan dan Peningkatan Kualitas Sumber Daya Pendidikan Tinggi Vokasi	Rp. 115.252.665.000
		TOTAL	Rp. 7.335.100.858.000

Jakarta, 28 Desember 2023

Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi,

Direktur Jenderal Pendidikan Vokasi,



Nadiem Anwar Makarim



Kiki Yuliati

**Tabel Pengukuran Kinerja
Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi
Tahun 2023**

No	Sasaran Program	Indikator Kinerja Program	Satuan	Target Perjanjian Kinerja Tahun 2023	Realisasi 2023	%
1	Meningkatnya partisipasi pendidikan tinggi	1.1 Persentase peningkatan mahasiswa perguruan tinggi vokasi	%	15.47	14.46	93.47
2	Meningkatnya mutu dan relevansi lulusan pendidikan dan pelatihan vokasi sesuai dengan kebutuhan dunia kerja	2.1 Persentase lulusan SMK yang bekerja / berwirausaha dalam satu tahun setelah kelulusan dengan gaji/pendapatan minimum sebesar 1x UMP	%	42.18	46.28	109.72
		2.2 Persentase lulusan Perguruan Tinggi Penyelenggara Pendidikan Vokasi yang bekerja/berwirausaha dalam satu tahun setelah kelulusan dengan gaji/pendapatan minimum sebesar 1,2x UMP	%	47.37	42.63	89.99
		2.3 Persentase lulusan kursus dan pelatihan yang memiliki pekerjaan atau berwirausaha	%	56.69	66.61	117.50
		2.4 Persentase satuan pendidikan yang menerapkan pembelajaran berkualitas, penjaminan mutu, dan kerja sama dengan Dunia Kerja	%	55	62.34	113.34
3	Meningkatnya riset, inovasi dan ilmu pengetahuan dari PT Vokasi	3.1 Jumlah keluaran penelitian PT Vokasi yang diterapkan oleh masyarakat	Karya	2.611	3.157	120.9
4	Meningkatnya akuntabilitas layanan dan pengelolaan anggaran pendidikan, kebudayaan, riset, dan teknologi	4.1 Predikat SAKIP Ditjen Pendidikan Vokasi	Predikat	A	A	100
5	Meningkatnya pelaksanaan reformasi birokrasi Kemendikbudristek	5.1 Jumlah Satker di Ditjen Pendidikan vokasi mendapatkann predikat ZI-WBK/WBBM)	Satker	26	10	38.46



**LAPORAN KINERJA
TRIWULAN 4
DITJEN PENDIDIKAN VOKASI
TAHUN 2023**

Berikut ini kami sampaikan hasil Capaian Kinerja pada DITJEN PENDIDIKAN VOKASI s.d Bulan Desember Tahun 2023 dengan uraian sebagai berikut :

1. PROGRES CAPAIAN KINERJA TRIWULAN 4

No	Sasaran Program	Indikator Kinerja Program	Satuan	Target Perjanjian Kinerja	Target Renaksi Triwulanan	Capaian Triwulanan
1	[SP 1] Meningkatnya partisipasi pendidikan tinggi	[IKP 1.1] Persentase peningkatan mahasiswa perguruan tinggi vokasi	%	15.47	TW4 : 15.47	TW4 : 14.46
1	[SP 2] Meningkatnya mutu dan relevansi lulusan pendidikan dan pelatihan vokasi sesuai dengan kebutuhan dunia kerja	[IKP 2.1] Persentase lulusan SMK yang bekerja/berwirausaha dalam satu tahun setelah kelulusan dengan gaji/pendapatan minimum sebesar 1x UMP	%	42.18	TW4 : 42.18	TW4 : 46.28
1	[SP 2] Meningkatnya mutu dan relevansi lulusan pendidikan dan pelatihan vokasi sesuai dengan kebutuhan dunia kerja	[IKP 2.2] Persentase lulusan Perguruan Tinggi Penyelenggara Pendidikan Vokasi yang bekerja/berwirausaha dalam satu tahun setelah kelulusan dengan gaji/pendapatan minimum sebesar 1,2x UMP	%	47.37	TW4 : 47.37	TW4 : 42.63
1	[SP 2] Meningkatnya mutu dan relevansi lulusan pendidikan dan pelatihan vokasi sesuai dengan kebutuhan dunia kerja	[IKP 2.3] Persentase lulusan kursus dan pelatihan yang memiliki pekerjaan atau berwirausaha	%	56.69	TW4 : 56.69	TW4 : 66.61
1	[SP 2] Meningkatnya mutu dan relevansi lulusan pendidikan dan pelatihan vokasi sesuai dengan kebutuhan dunia kerja	[IKP 2.4] Persentase satuan pendidikan yang menerapkan pembelajaran berkualitas, penjaminan mutu, dan kerja sama dengan Dunia Kerja	%	55	TW4 : 40	TW4 : 62.34
1	[SP 3] Meningkatnya riset, inovasi dan ilmu pengetahuan dari PT Vokasi	[IKP 3.1] Jumlah keluaran penelitian PT Vokasi yang diterapkan oleh masyarakat	Karya	2611	TW4 : 1811	TW4 : 2507
1	[SP 4] Meningkatnya akuntabilitas layanan dan pengelolaan anggaran pendidikan, kebudayaan, riset, dan teknologi	[IKP 4.1] Predikat SAKIP Ditjen Pendidikan Vokasi	Predikat	A	TW4 : A	TW4 : A
1	[SP 5] Meningkatnya pelaksanaan reformasi birokrasi Kemendikbudristek	[IKP 5.1] Jumlah Satker di Ditjen Pendidikan vokasi mendapatkann predikat ZI-WBK/WBBM	satker	26	TW4 : 26	TW4 : 10

2. HASIL ANALISIS CAPAIAN KINERJA TRIWULAN 4

a). PENYERAPAN ANGGARAN

Pagu Anggaran sebesar **Rp.7.333.950.199.000** dan Realisasi Anggaran s.d. 17 Januari 2024 sebesar **Rp. 7.030.203.014.792** atau **95,86%** maka sisa realisasi penyerapan anggaran s.d. 17 Januari 2024 **Rp. 303.747.184.208**

b). ANALISIS TERKAIT PROGRES CAPAIAN KINERJA, PERMASALAHAN, DAN STRATEGI YANG DILAKUKAN

A . SP 1 Meningkatnya partisipasi pendidikan tinggi

- IKP 1.1 Persentase peningkatan mahasiswa perguruan tinggi vokasi

Progress / Kegiatan :

Pada IKP 1.1 Persentase peningkatan mahasiswa perguruan tinggi vokasi di triwulan IV didapat sebesar 14,46% dari target 15,47%. Sumber data yang digunakan berasal dari PD Dikti, dengan formula perhitungan total mahasiswa perguruan tinggi vokasi dibagi total mahasiswa pendidikan tinggi dikalikan 100%. IKP 1.1 ini pencapaian didukung oleh program Matching Fund yang telah selesai dilaksanakan, program ini diberikan bantuan untuk mendorong kerjasama/kolaborasi yang saling menguntungkan antara perguruan tinggi dan mitra berbasis riset dan/atau kepakaran perguruan tinggi untuk menyelesaikan masalah DUDI atau pemberdayaan masyarakat. Selain itu ada beberapa kegiatan yang mendukung peningkatan mahasiswa perguruan tinggi vokasi baik secara langsung ataupun tidak. Program tersebut diantaranya:

1. Dalam rangka mendukung peningkatan sarana dan prasarana perguruan tinggi vokasi diberikan bantuan SBSN di tahun 2023 sebanyak 8 perguruan tinggi vokasi, yaitu Politeknik Negeri Semarang, Politeknik Negeri Banyuwangi, PENS, Politeknik Manufaktur Negeri Bangka Belitung, Politeknik Negeri Ujung Pandang, Politeknik Negeri Samarinda, Politeknik Maritim Negeri Indonesia, dan Politeknik Negeri Balikpapan.
2. Melakukan analisis terhadap kelompok UKT mahasiswa yang didapat kelompok UKT I dan II sebesar 7,15%, dan pemberian KIP

Catatan:

1. UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah."
2. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR

kepada mahasiswa vokasi sebesar 21,16%.

3. Ditjen Pendidikan Vokasi mempublikasikan hasil produk dan prestasi yang diraih oleh insan vokasi di website resmi dan media sosial untuk menarik perhatian siswa agar memilih melanjutkan pendidikannya ke vokasi.

Kendala / Permasalahan :

1. Adanya peraturan terkait penggunaan TKDN, sehingga membutuhkan waktu untuk melakukan identifikasi PDN dan TKDN sesuai dengan spesifikasi yang sudah ditetapkan, dan dibutuhkan waktu untuk memproses kembali.
2. Pada Permendikbud Nomor 25 tahun 2020 tidak terdapat ketentuan yang menyebutkan proporsi pembagian untuk kelompok mahasiswa UKT I dan II serta KIPK dari ketentuan minimal 20% untuk mahasiswa kelompok UKT I dan II serta KIPK.
3. Pada renstra Setditjen Pendidikan Vokasi disebutkan bahwa Politeknik dan AKN memberikan kuota minimal 10% untuk kelompok UKT I dan II, namun kuota tersebut belum terpenuhi.

Strategi / Tindak Lanjut :

1. Mempercepat penyelesaian dokumen-dokumen yang dibutuhkan untuk pengadaan barang import serta melakukan identifikasi TKDN yang sesuai dengan spesifikasi.
2. Akan dibentuk tim gabungan dari Bidang Penganggaran dan Bidang Keuangan yang salah satu tugasnya adalah untuk mendukung ketercapaian pemenuhan persentase mahasiswa kelompokn UKT I dan II.

B . SP 2 Meningkatnya mutu dan relevansi lulusan pendidikan dan pelatihan vokasi sesuai dengan kebutuhan dunia kerja

- IKP 2.1 Persentase lulusan SMK yang bekerja/berwirausaha dalam satu tahun setelah kelulusan dengan gaji/pendapatan minimum sebesar 1x UMP

Progress / Kegiatan :

Pada IKP 2.1 Persentase lulusan SMK yang bekerja/berwirausaha dalam satu tahun setelah kelulusan dengan gaji/pendapatan minimum sebesar 1x UMP, didapat capaian sebesar 46,28%. Sumber data yang digunakan berasal dari Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) yang dilaksanakan oleh Badan Pusat Statistik (BPS). Data yang digunakan adalah Sakernas Agustus 2023 yang dirilis pada bulan Desember dengan formula perhitungan total lulusan SMK yang bekerja/berwirausaha dengan gaji 1x UMP dibagi total lulusan SMK keseluruhan dikalikan 100%.

Untuk meningkatkan lulusan SMK yang bekerja/berwirausaha dengan gaji minimum 1x UMP, didukung oleh program yang dilaksanakan oleh Direktorat SMK, yaitu:

1. Program SMK Pusat Keunggulan, dimana telah dilakukan penetapan dan penyaluran bantuan kepada 1.851 SMK penerima. Sekolah yang telah berturut-turut selama 3 tahun diberikan intervensi lanjutan didorong untuk memberikan imbas praktik baiknya kepada SMK di sekitarnya. Dengan adanya pengimbasan praktik baik ini diharapkan SMK lainnya mampu menerapkannya di ekosistem tata kelola institusinya. SMK yang memberikan pengimbasan yaitu sebanyak 1.401 SMK PK lanjutan. Terdapat juga SMK Pusat Keunggulan dengan skema pemadanan dukungan dari industri mitra, dimana harapannya mampu memberikan intervensi yang komprehensif dari sisi fisik maupun non fisik sehingga pendidikan SMK akan mampu mencetak lulusan yang sesuai dengan kebutuhan dunia kerja.
2. Pelaksanaan sertifikasi kepada peserta didik SMK, baik untuk sertifikasi kompetensi maupun bahasa asing diharapkan mampu memberikan jaminan terstandar kepada lulusan SMK sehingga mampu mendapatkan kepercayaan dari dunia kerja. Pada tahun 2023 ini telah dilakukan sertifikasi kompetensi sebanyak 30.000 siswa.
3. Program pengembangan SMK dalam mendukung industri 4.0 bertujuan untuk menciptakan lulusan dengan kompetensi keahlian sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan teknologi terkini. Pada tahun 2023 program pengembangan SMK dalam mendukung industri 4.0 diberikan kepada 80 SMK, yang digunakan untuk workshop peningkatan pembelajaran, penguatan SDM, penyelarasan kompetensi serta beberapa peningkatan kualitas standar sarpras agar menjadi SMK yang dapat mendukung industri 4.0. Semua kegiatan sudah terlaksana dengan baik di 80 SMK tersebut.
4. Program SMK mendukung produk kreatif dan kewirausahaan. Program ini dilaksanakan untuk menciptakan lulusan SMK dengan kemampuan entrepreneurship. Lulusan ditargetkan untuk memiliki peluang mendapatkan penghasilan sesuai dengan standar upah minimal yang ditentukan. Saat ini sebanyak 240 sekolah diberikan bantuan untuk mengembangkan Proyek Kreatif dan Kewirausahaan serta 52 sekolah diberikan bantuan untuk melaksanakan pembelajaran teaching factory. Program ini bertujuan untuk meningkatkan lulusan SMK yang bekerja/berwirausaha.

Kendala / Permasalahan :

1. Industri yang masuk dalam kategori industri 4.0 belum tersebar secara merata sehingga sebagian besar SMK yang didorong untuk melakukan penyelarasan dengan industri kategori 4.0 mengalami kesulitan dalam mencari mitranya.
2. Persepsi masyarakat terhadap siswa yang berwirausaha dianggap bukan menjadi indikator keamanan sehingga kurangnya dukungan dari pihak keluarga bagi siswa untuk berwirausaha.
3. Tidak semua SMK mendapatkan mitra industri dengan skala besar, beberapa melakukan kerjasama dengan industri UMKM sebagai mitra yang sebagian besar mempunyai keterbatasan SDM dalam pelaksanaan programnya.

Strategi / Tindak Lanjut :

1. Mendorong SMK untuk berkolaborasi dengan dunia kerja baik dalam pembelajaran maupun pengembangan unit usaha dengan membentuk inkubator bisnis sehingga peserta didik dapat merasakan betul atmosfer budaya kerja di dunia kerja. Sehingga dengan adanya hal semacam ini akan membantu lulusan SMK agar lebih siap ketika terjun ke dunia kerja. Disamping itu, inkubator bisnis yang dibentuk bersama diharapkan akan mendorong lulusan SMK agar lebih kreatif untuk berwirausaha.
2. Sekolah diarahkan untuk melakukan pembinaan kepada peserta didik yang telah mempunyai usaha/ berwirausaha sehingga setelah lulus di kemudian hari akan lebih siap dengan usaha yang telah dirintis sebelumnya.
3. Bentuk kerjasama dengan mitra industri skala UMKM disesuaikan melalui pengembangan kewirausahaan dengan harapan mampu memberikan pembelajaran bagi peserta didik dengan potensi untuk usaha mandiri.

C . SP 2 Meningkatnya mutu dan relevansi lulusan pendidikan dan pelatihan vokasi sesuai dengan kebutuhan dunia kerja

- IKP 2.2 Persentase lulusan Perguruan Tinggi Penyelenggara Pendidikan Vokasi yang bekerja/berwirausaha dalam satu tahun setelah kelulusan dengan gaji/pendapatan minimum sebesar 1,2x UMP

Progress / Kegiatan :

Pada IKP 2.2 Persentase lulusan Perguruan Tinggi Penyelenggara Pendidikan Vokasi yang bekerja/berwirausaha dalam satu tahun setelah kelulusan dengan gaji/pendapatan minimum sebesar 1,2x UMP, di triwulan 4 ini didapat capaian sebesar 42,63%. Sumber data yang digunakan berasal dari Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) yang dilaksanakan oleh Badan Pusat Statistik (BPS). Data yang digunakan adalah Sakernas Agustus 2023 yang dirilis pada bulan Desember dengan formula perhitungan total lulusan Pendidikan Tinggi Vokasi yang bekerja/berwirausaha dengan gaji minimum 1,2x UMP dibagi total lulusan keseluruhan dikalikan 100%.

Untuk meningkatkan lulusan Perguruan Tinggi Vokasi yang bekerja/berwirausaha dalam satu tahun setelah kelulusan dengan gaji/pendapatan minimum sebesar 1,2x UMP, didukung oleh program-program yang dilaksanakan oleh Direktorat Akademi Pendidikan Tinggi Vokasi (APTV) dan Direktorat Kelembagaan dan Sumber Daya Pendidikan Tinggi Vokasi (KLSD), dengan rincian sebagai berikut:

Direktorat KLSD PTV :

1. Pendidikan Tinggi Vokasi yang menerapkan Penguatan Mutu Berstandar Industri

Ketercapaian Program Pendidikan Tinggi Vokasi yang Menerapkan Penguatan Mutu Berstandar Industri Tahun 2023 di dukung oleh 2 kegiatan, yaitu Program Competitive Fund Vokasi pada tahun 2023 dilaksanakan dalam 2 batch. Pada Batch 1 ditetapkan penerima bantuan sebanyak 73 program studi. Sedangkan pada Batch 2 penerima bantuan Competitive Fund Vokasi adalah sebanyak 46 program studi. Sedangkan untuk Program Penguatan Perguruan Tinggi Vokasi Perguruan Tinggi Swasta (P3TV-PTS) jumlah penerima bantuannya adalah sebanyak 52 lembaga.

2. SDM Pendidikan Tinggi Vokasi yang mengikuti Peningkatan Kompetensi

Ketercapaian Program SDM Pendidikan Tinggi Vokasi Yang Mengikuti Kompetensi Tahun 2023 di dukung oleh 3 Skema, yaitu Pelatihan (Magang) sebanyak 106 orang, Sertifikasi Kompetensi sebanyak 447 orang, dan Sertifikasi Profesi sebanyak 231 orang. Jadi di tahun 2023 SDM Pendidikan Tinggi Vokasi yang mengikuti peningkatan kompetensi sebanyak 784 orang dosen vokasi yang tersebar di seluruh perguruan tinggi penyelenggara pendidikan vokasi.

Direktorat APTV :

1. Kurikulum Berbasis Industri

a. Pelaksanaan Bimtek Penyusunan Kurikulum PTV Tahap II: a) Sesi 4 (5-8 Oktober) sebanyak 38 peserta dari 24 PT, b) Sesi 5 (19-22 Oktober) sebanyak 61 peserta dari 27 PT, c) Sesi 6 (2-5 November) sebanyak 54 peserta dari 27 PT.

b. Evaluasi Pelaksanaan Bimtek Penyusunan Kurikulum PTV dan Pembahasan Pengembangan Kurikulum 2024, yang dihadiri oleh perwakilan seluruh perguruan tinggi negeri vokasi dan LLDIKTI seluruh Indonesia.

c. Penyusunan bahan rekomendasi terhadap instrumen akreditasi BAN-PT dan LAM bidang Pendidikan Vokasi.

d. Finalisasi Penyusunan Materi Permendikbudristek Nomor 53 Tahun 2023 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi, untuk pelaksanaan kurikulum Pendidikan Tinggi Vokasi.

e. Publikasi Buku Saku Tanya Jawab Rekognisi Pembelajaran Lampau (RPL) Tipe A Perguruan Tinggi Penyelenggara Program Pendidikan Vokasi (PTPPPV).

f. Pembahasan Pelaksanaan dan Pelaporan RPL D2 fast track dan transformasi D3 ke D4.

g. Penyusunan draf Rancangan Permendikbudristek tentang Magang Mahasiswa.

h. Penyusunan Rancangan Penguatan RPL Pendidikan Tinggi Vokasi Tahun 2024.

i. Pengusulan revisi konten aplikasi PDDikti terkait Definisi Operasional IKU 2 dan IKU 7 agar berkesesuaian dengan pencapaian PTV.

j. Penyusunan dan penyebaran form pengukuran untuk mengetahui sebaran program studi yang menerapkan kurikulum link and match dengan dunia kerja.

k. Pengukuran mata kuliah yang menerapkan model pembelajaran PBL pada perguruan tinggi vokasi dengan hasil 25% mata kuliah telah menerapkan model pembelajaran PBL. Pengukuran dilakukan menggunakan metode survey melalui google form, untuk mengetahui mata kuliah yang menerapkan model pembelajaran PBL di perguruan tinggi vokasi.

2. Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi Vokasi

a. Onsite Visit Evaluation pada Program Studi Pilot Project Akreditasi International Sydney Accord (Prodi Teknik Keselamatan dan Kesehatan Kerja - PPNS, Prodi Teknik Elektronika - PENS, Prodi Teknik Perancangan Jalan dan Jembatan - PNJ).

b. Evaluasi Pelaksanaan Program Akademik pada Perguruan Tinggi Swasta Penyelenggara Program Pendidikan Vokasi yang berada di bawah Binaan LLDIKTI Wilayah VIII.

c. Penyamaan Persepsi Verifikasi Pelaporan SPMI dengan LLDIKTI, melalui pertemuan yang dilakukan bersama tim ahli.

e. Penyusunan Pedoman Penerapan SPMI di Perguruan Tinggi Vokasi sesuai Permendikbudristek Nomor 53 Tahun 2023.

f. Penyusunan dan Validasi Kriteria Penerima Apresiasi Program Direktorat APTV Bidang Penjaminan Mutu.

g. Pelaksanaan Program APTV kolaborasi dengan PT dalam Pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi dengan memberikan apresiasi dalam bidang Pembelajaran dan Kemahasiswaan untuk 14 katagori dan bidang Penelitian dan Pengabdian dengan 12 Kategori, dan Apresiasi Khusus diberikan kepada AKN Jogjakarta dalam melestarikan budaya daerah.

h. Telaah Instrumen BAN-PT dan LAM serta Penyusunan Usulan Instrumen Akreditasi untuk Pendidikan Vokasi.

Kendala / Permasalahan :

1. Proses Realokasi dana bantuan CF bagi Politeknik Negeri dan Akademi Komunitas Negeri memakan waktu hingga 3 bulan sehingga pelaksanaan program terlambat.

2. Pada program sertifikasi di luar negeri, proses pembuatan visa peserta tujuan luar negeri yang terhambat akibat terlambatnya penerbitan LoA oleh penyelenggara. LoA dari penyelenggara terhambat karena mayoritas penyelenggara meminta nomor paspor peserta yang masih berlaku.

3. Anggaran biaya seleksi dan monitoring evaluasi yang tidak memadai, dikarenakan LPDP mewajibkan semua program untuk melaksanakan monitoring dan evaluasi.

4. Keterbatasan skema program untuk dosen dan tenaga kependidikan.

5. Banyak Peserta Bimtek kurikulum berbasis industri belum dapat merumuskan Capaian Pembelajaran sesuai program studi berdasar Panduan Penyusunan Kurikulum PTV dan Permendikbudristek Nomor 53 Tahun 2023.

6. Terdapat kendala pelaporan RPL Tipe A pada program D2FT dan Tranformasi D3 ke D4.

Catatan:

1. UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah."
2. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR

7. Berdasarkan data pelaporan pada sistem PDDikti masih cukup banyak PTPPPV yang belum melaporkan data pelaksanaan model pembelajaran PBL secara riil karena terkendala pada format baku yang ada pada sistem PDDikti yang tidak dapat mengakomodir semua kebutuhan data model pembelajaran PBL sesuai Perdirjen No. 27 tahun 2022.

8. Mayoritas Perguruan Tinggi Swasta di LLDIKTI VIII sudah melaporkan implementasi SPMI nya ke aplikasi namun dokumen belum lengkap dikarenakan kurangnya pemahaman terkait penyusunan dokumen SPMI dan teknis pelaporan SPMI ke aplikasi.

9. LLDIKTI tidak terlalu paham terkait substansi penjaminan mutu (SPMI) dan Fasilitator Wilayah dari Vokasi.

Strategi / Tindak Lanjut :

1. Proses Seleksi T.A. 2024 dimulai lebih awal (T-1) untuk mengantisipasi proses realokasi dana bantuan yang kemungkinan masih akan memakan waktu lama.
2. Meminta seluruh peserta tujuan luar negeri untuk segera memiliki paspor yang masih berlaku.
3. Melakukan penyusunan juknis pelaksanaan monitoring dan evaluasi program peningkatan kompetensi sumber daya pada awal tahun.
4. Penambahan skema untuk dosen dan penambahan kuota untuk tenaga kependidikan.
5. Melakukan reviu dan perbaikan capaian pembelajaran untuk menjadi acuan minimal bagi program studi vokasi.
6. Koordinasi dengan PDDikti untuk memfasilitasi pelaporan RPL Tipe A program D2FT dan Transformasi D3 ke D4 dan meminta data PT penyelenggara D2FT dan Transformasi D3 ke D4 guna memudahkan filter fasilitas pelaporan RPL di PDDikti.
7. Penyesuaian konten dan format pelaporan data pelaksanaan model pembelajaran PBL pada sistem PDDikti untuk mengakomodir kebutuhan yang sesuai Perdirjen No. 27 tahun 2022, dan diperlukan strategi penghitungan data pelaksanaan model pembelajaran PBL oleh bagian akademik di masing-masing perguruan tinggi.
8. Bimtek Penyusunan Dokumen SPMI bagi Pengelola SPMI LLDIKTI.
9. Koordinasi lanjutan dengan LLDIKTI perihal verifikasi SPMI.

D . SP 2 Meningkatnya mutu dan relevansi lulusan pendidikan dan pelatihan vokasi sesuai dengan kebutuhan dunia kerja

- IKP 2.3 Persentase lulusan kursus dan pelatihan yang memiliki pekerjaan atau berwirausaha

Progress / Kegiatan :

Pada IKP 2.3 Persentase lulusan kursus dan pelatihan yang memiliki pekerjaan atau berwirausaha, didapat capaian sebesar 66,61. Capaian merupakan peserta didik yang mengikuti program telah menyelesaikan uji kompetensi dan bekerja ataupun merintis usaha, dengan sumber data yang digunakan berasal dari laporan internal kursus dan pelatihan dan tracer study. Formula perhitungan untuk IKP 2.3 ini adalah total lulusan PKK atau PKW yang memiliki pekerjaan atau berwirausaha dibagi total lulusan PKK dan PKW dikalikan 100%.

Untuk memperoleh capaian persentase lulusan kursus dan pelatihan yang memiliki pekerjaan atau berwirausaha, perealisasiannya didukung oleh pelaksanaan program-program Prioritas Nasional yang ada di Direktorat Kursus dan Pelatihan, yaitu:

1. Program Pendidikan Kecakapan Kerja (PKK), untuk lulusan program PKK di tahun 2023, hingga bulan Desember sebanyak 21.074 peserta didik atau 54,26% telah bekerja dari total 38.842 peserta didik program PKK.
2. Program Pendidikan Kecakapan Wirausaha (PKW), untuk lulusan program PKW di tahun 2023, hingga bulan Desember sebanyak 21.728 peserta didik atau 83.14% telah memulai rintisan usaha dari total 26.135 peserta didik program PKW.

Kendala / Permasalahan :

1. Masih terdapat lembaga kursus dan pelatihan yang menyelenggarakan program PKK tapi belum melaporkan jumlah peserta didik yang sudah bekerja, dan program PKW belum melaporkan jumlah peserta didik yang sudah merintis usaha pada aplikasi tracer study.
2. Pada program PKK, adanya perubahan penempatan kerja peserta didik sehubungan dengan kebutuhan tenaga kerja pada DUDIKA.
3. Pada program PKW proses pendampingan rintisan usaha belum dilaksanakan secara terukur dan terencana, sebagian besar masih dilakukan secara informal dengan menggunakan whatsapp.

Strategi / Tindak Lanjut :

1. Melakukan monitoring secara berkala untuk pelaporan data peserta didik yang telah bekerja atau berwirausaha di aplikasi tracer study.
2. Melakukan pembaharuan data penempatan kerja sehingga peserta didik dapat bekerja sesuai dengan kebutuhan DUDIKA.
3. Mempersiapkan format pendampingan rintisan usaha agar proses pendampingan dapat dilakukan secara terukur dan terencana dengan memanfaatkan best practice penyelenggaraan program PKW serta hasil evaluasi dampak program PKW.

E . SP 2 Meningkatnya mutu dan relevansi lulusan pendidikan dan pelatihan vokasi sesuai dengan kebutuhan dunia kerja

- IKP 2.4 Persentase satuan pendidikan yang menerapkan pembelajaran berkualitas, penjaminan mutu, dan kerja sama dengan Dunia Kerja

Progress / Kegiatan :

Pada IKP 2.4 Persentase satuan pendidikan yang menerapkan pembelajaran berkualitas, penjaminan mutu, dan kerjasama dengan Dunia Kerja, di triwulan IV didapatkan capaian sebesar 55,66% dari target 40% , dengan sumber data yang digunakan berasal dari dapodik, tracer study dan laporan internal. Formula perhitungan untuk IKP 2.4 ini adalah jumlah satuan pendidikan vokasi dengan pembelajaran berkualitas, ditambahkan dengan jumlah satuan pendidikan vokasi yang mengimplementasikan standar mutu pendidikan vokasi (8+i), ditambahkan dengan jumlah satuan pendidikan voaksi yang memiliki kerjasama dengan dunia kerja, dibagi dengan total jumlah satuan pendidikan vokasi dikalikan 100%.

Untuk meningkatkan satuan pendidikan yang menerapkan pembelajaran berkualitas, penjaminan mutu, dan kerjasama dengan dunia kerja, didukung oleh program-program yang dilaksanakan oleh Direktorat Kemitraan dan Penyelarasan DUDI, serta program-program yang dilaksanakan di BB/BPPMPV, yaitu:

Direktorat Mitras DUDI :

Catatan:

1. UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau hasil cetakannya merupakan alat bukti yang sah."
2. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR

1. Telah ditandatangani Perjanjian Kerjasama sebanyak 127 PKS yang diperoleh dari Program Ekosistem Kemitraan Daerah dan Kerjasama dengan PT Scheneider. Total kesepakatan yang telah ditanda tangani sebanyak 218 Kesepakatan.
2. Telah dilakukan Kick Off Program Penguatan Ekosistem Kemitraan untuk Pengembangan Inovasi Berbasis Potensi Daerah di 16 lokasi Kick Off, meliputi, Kepri, Kalteng-Kalsel, Jateng, Sultanbatara, Sumbar, Aceh, Riau, Kalbar, NTT, Jatim, Sumsel-Babel, Sumut, Sultara, Papua Barat, Lampung dan Maluku.
3. Finalisasi laporan Social Return On Investment (SROI) untuk Program SMK PK SPD tahun 2022.
4. Validasi dan Finalisasi Hasil Penyeragaman Skema Sertifikasi pada LSP P1 SMK. Kegiatan ini melibatkan Pusat Pengembangan dan Pembinaan Bahasa (Pustanda) serta 40 Asesor dari LSP P1 SMK untuk melakukan reviu terhadap 2.053 judul unit kompetensi yang sebelumnya telah diterjemahkan oleh Tim Pustanda. Hasil reviu tersebut selanjutnya akan dituangkan dalam surat edaran Direktur Mitras DUDI yang akan digunakan oleh SMK ketika menerbitkan sertifikat kompetensi secara bilingual.
5. Mahakarya Vokasi Adibusana di Jakarta Muslim Fashion Week pada 21 Oktober 2023 dan Trade Expo Indonesia (TEI) selama lima hari pada 18-22 Oktober 2023. Pada kegiatan JFW, 12 Satuan Pendidikan Vokasi berkontribusi menampilkan 72 karya busana. Sedangkan pada kegiatan TEI sebanyak 6 Satuan Pendidikan Vokasi memamerkan hasil karya inovasi dari masing-masing SPV.
6. Analisis Konsentrasi Keahlian (KK) SMK dengan Potensi Pertumbuhan Perekonomian Daerah, untuk menganalisis potensi perekonomian daerah dengan menggunakan data BPS dibandingkan dengan keberadaan konsentrasi keahlian (KK) SMK di daerah tersebut. Analisis ini melibatkan tim pakar perekonomian/pembangunan daerah dari FEB Universitas Brawijaya Malang.
7. Telah dilaksanakannya workshop ke-6 Penyusunan Proses Bisnis Pengembangan Kurikulum Operasional Sekolah berbasis Standar Kompetensi Kerja, dilanjutkan dengan melaksanakan Pelatihan untuk Pengembangan Skillset, Desain Instruksional, dan Kredensial Mikro Berbasis pada Standar Kompetensi Kerja dan pada Bulan Desember telah dilaksanakannya Monitoring Implementasi Pelaksanaan Kredensial Mikro pada 4 SMK sebagai Pilot Project.
8. Menyusun Laporan Hasil Pengolahan Data Tracer Study SMK Tahun 2023.
9. Sinkronisasi Aplikasi Mitreka dengan Sikerma.

BBPPMPV/BPPMPV :

1. Pada BBPPMPV Bidang Bangunan dan Listrik, Peningkatan Kompetensi Guru Kejuruan Upskilling dan Reskilling Berbasis Industri angkatan 5 periode 18 September s.d. 03 Oktober 2023 diselenggarakan di Balai Besar Pengembangan Penjaminan Mutu Pendidikan Vokasi Bidang Bangunan dan Listrik (BBPPMPV-BBL), dengan jumlah peserta 61 Orang. Angkatan 6 dilaksanakan di 5 Provinsi yang bertempat di Kota Padang, Pekanbaru, Palembang, Banda Aceh dan Jambi dengan jumlah peserta 100 orang. Finalisasi MUK Diklat Upskilling Reskilling dilaksanakan pada tanggal 18 s.d. 20 Oktober 2023 yang diikuti oleh 42 orang peserta dimana 1 orang adalah narasumber dari BNSP dan 41 orang adalah staf BBPPMPV BBL Medan sebagai tim penyusun dan tim sekertariat. Kegiatan Diklat Peningkatan Kapabilitas Manajerial Kepala Sekolah yang dilaksanakan di BBPPMPV BBL Medan diikuti oleh 45 orang kepala sekolah yang berasal dari 6 provinsi yaitu Provinsi Aceh, Sumut, Sumbar, Riau, Jambi dan Sumsel. Kegiatan Lokakarya Diklat Upskilling Guru Kejuruan dan Tenaga Kependidikan Vokasi dan Monitoring dan Evaluasi Diklat Upskilling Guru Kejuruan dilaksanakan pada tanggal 08 s.d. 10 November 2023 dihadiri oleh 155 orang. Pendampingan Pelaksanaan Model Pembelajaran di 6 SMK sebagai Implementasi pengembangan model ke SMK yang dilakukan oleh tim pengembangan model dengan DUDI.
2. Pada BBPPMPV Pertanian, Pelaksanaan Peningkatan Kompetensi Guru Kejuruan yang mengikuti Upskilling dan Reskilling Berbasis Industri (di BBPPMPV Pertanian dan di Industri), untuk angkatan ke-9 yang dilaksanakan tanggal 10 Oktober s.d. 3 November 2023, dengan jumlah peserta 38 orang, pada bidang Agribisnis Tanaman dan bidang Agribisnis Pengolahan Hasil Pertanian Agribisnis Pengolahan Hasil Pertanian. Pelaksanaan Peningkatan Kompetensi Pengawas SMK, diikuti oleh 50 peserta yang berasal dari Dinas Pendidikan Propinsi Banten 39 peserta, Dinas Pendidikan Propinsi Kepulauan Bangka Belitung 6 peserta, dan Dinas Pendidikan Propinsi Kepulauan Riau 5 peserta. Kegiatan tersebut berlangsung selama 6 (enam) hari mulai tanggal 6 hingga 11 November 2023 di BBPPMPV Pertanian. Pelaksanaan Pelatihan Kecakapan Hidup Bidang Pertanian Bagi Instruktur Kursus, diikuti 55 orang Instruktur LKP pada 31 Oktober hingga 5 November 2023. Workshop Sinkronisasi Data Pada Satuan Pendidikan Vokasi, dilaksanakan di BBPPMPV Pertanian pada tanggal 27-28 Nopember 2023.
3. Pada BBPPMPV Bisnis dan Pariwisata, Program Upskilling dan Reskilling Manajerial bagi Kepala SMK Berstandar Industri Tahun 2023 periode 29 Oktober s.d 4 November 2023 Sebanyak 136 Orang. Pendampingan Implementasi Pembelajaran pada SMK Pusat Keunggulan di wilayah Provinsi DKI Jakarta dan seluruh Provinsi di Kalimantan Tahun 2023 pada 25 September s.d. 15 November 2023. Pendampingan PBD secara luring ke 150 SMK di 6 provinsi wilayah binaan BBPPMPV Bispar.
4. Pada BBPPMPV Bidang Mesin dan Teknologi Industri, Pelatihan upskilling dan reskilling berstandar industri untuk guru SMK yang dilaksanakan ke sebanyak 203 orang yang terbagi dalam 13 bidang kompetensi yang dilaksanakan pada rentang Oktober-November 2023. Pelatihan manajerial dan peningkatan kompetensi kepala sekolah ke sebanyak 150 orang yang terbagi dalam 2 angkatan yang dilaksanakan pada bulan Oktober.
5. Pada BBPPMPV Seni dan Budaya, Pelatihan Pendampingan Implementasi Pembelajaran di SMK PK tanggal 16 Okt s.d. 4 Nov 2023 sebanyak 49 SMK di Wilayah DIY, Jateng, Bali. Monev Tindak lanjut Pelaksanaan Upskilling dan Reskilling Guru Vokasi pada 23 s.d. 31 Oktober 2023 di 39 SMK, 13 s.d. 25 Nov 2023 di 59 SMK, 6 s.d. 14 November 2023 di 8 SMK dan 6 s.d. 24 Desember 2023 di 21 SMK. Monev RTL Peningkatan Kompetensi Instruktur Kursus tgl 18 s.d. 24 Desember 2023 di 16 Lembaga Kursus. Pendampingan Kepala SMK PK di Wilayah Jateng, tgl 7 s.d. 21 Nov 2023 sebanyak 50 Kepala SMK PK. Monev Penjaminan Mutu Pendidikan melalui PBD pd tgl 2 s.d. 14 Oktober 2023 di 40 SMK sasaran. Pendampingan PBD secara luring di satuan pendidikan wilayah Jateng dan Bali pd tgl 1 s.d. 11 November 2023 di 30 SMK sasaran. Pengembangan Produk Kreatif Seni dan Budaya tahun 2023 tgl 4 September s.d. 17 November 2023, sasaran peserta adalah Widyaiswara, PTP, dan Pelaksana di BBPPMPV Seni dan Budaya yang terbagi dalam 7 tim pengembang, dengan menghasilkan, Pengembangan Karya Program Acara TV Signal Budaya, pendekatan Sota, Research Gap, dan Novelty dengan model 4D (Devine, Design, Develope, dan Disseminate) untuk mengembangkan produk kreatif, pengembangan metaverse gedung dan ruang pameran di BBPPMPV Seni dan Budaya, penciptaan gerak dan lagu bernuansa seni dan budaya, sinkronisasi data untuk layanan pelanggan yang lebih baik, produk kreatif kriya berdasarkan konsep eco-design, implementasi prinsip animasi melalui gerakan dasar.
6. Pada BBPPMPV Bidang Otomotif dan Elektronika, Pelatihan upskilling dan reskilling berstandar industri untuk guru SMK yang dilaksanakan ke sebanyak 781 orang pada beberapa bidang dalam rentang Oktober-Desember. Peningkatan kompetensi dan manajerial kepala sekolah yang dilaksanakan ke sebanyak 147 orang. Pelatihan dan peningkatan untuk pengawas sebanyak 99 orang. Pelaksanaan Pelatihan Komite Pembelajaran dilaksanakan pada tanggal 22 September sampai dengan 6 Oktober 2023 diikuti oleh 389 peserta.
7. Pada BPPMPV Kelautan, Perikanan, Teknologi Informasi dan Komunikasi, Pelatihan peningkatan kompetensi dan manajerial kepala sekolah yang dilaksanakan ke sebanyak 127 orang pada bulan November. Training of Examiner (TOE) Imo Model Course yang dilaksanakan ke sebanyak 54 orang pada bulan November. Terintegrasi Penerapan IoT pada SMKN 1 Maros, BRPBAP3 pada tanggal 11

Catatan:

1. UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah."
2. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR

September s.d. 02 Oktober 2023 dengan jumlah peserta 28 orang. Pelatihan Layanan Data Center tanggal 04 September s.d 01 Oktober 2023 di SMK Telkom Makassar sebanyak 24 orang. Pelatihan Manajemen LKP tanggal 16 s.d 22 November 2023 dengan jumlah peserta sebanyak 30 orang.

Kendala / Permasalahan :

1. Sebagian wilayah belum bisa melakukan kick off karena masih menunggu pendanaan dari LPDP, selain itu ada wilayah yang belum siap melaksanakan kick off dikarenakan sulitnya koordinasi antar anggota konsorsium PTV.
2. Penyeragaman Skema Sertifikasi pada LSP P1 SMK, dimana terdapat perbedaan versi penerjemahan dari tim pusat pengembangan dan pembinaan bahasa (Pustanda) dan asesor, yaitu tim Pustanda berdasarkan tekstual, sedangkan dari sisi asesor menerjemahkan secara kontekstual di lapangan, sehingga penyeragaman skema sertifikasi pada LSP P1 SMK lebih lama dari waktu yang ditentukan.
3. Belum adanya saluran komunikasi yang efektif untuk mengerahkan industri dalam jumlah yang cukup banyak agar mengikuti sosialisasi program pepadanan dukungan pada Ditjen Pendidikan Vokasi tahun 2024.
4. Aplikasi Mitreka akan bersinergi dengan aplikasi Sikerma, maka tim membutuhkan waktu lebih lama untuk menyinkronisasikan kedua aplikasi tersebut.

Balai:

1. Pada saat pelatihan berlangsung sering ada keluhan-keluhan dari peserta kegiatan terkait kondisi fisik maupun kondisi fasilitas lokasi pelatihan.
2. Peningkatan Kompetensi Penggunaan peralatan praktik terkendala dengan terbatasnya peralatan praktek tersebut, yang seharusnya untuk 1 peserta menggunakan 1 alat dan dilakukan diklat yang berjenjang mulai dari tingkat dasar sampai dengan tingkat advance.
3. Keterbatasan biaya/anggaran (khususnya untuk mendampingi SMK PK di wilayah Papua, Papua Tengah, Papua Selatan, Papua Pegunungan), dan ada satu SMK PK yang sulit dijangkau secara geografis (SMK Kemaam) sehingga tidak dilakukan pendampingan.
4. Satuan Pendidikan yang didampingi secara luring masih perlu pendampingan berkelanjutan mengenai PBD.
5. Distribusi untuk materi tambahan terlalu banyak dibanding kan dengan materi inti, serta terjadi di beberapa pelatihan tidak adanya keselarasan antara materi dengan skema sertifikasi.

Strategi / Tindak Lanjut :

1. Berkoordinasi secara intensif dengan PTV pengampu dan LPDP untuk mempercepat pencairan dana dan terlaksananya kick off di daerah. untuk wilayah lainnya yang belum siap melaksanakan kick off, serta melakukan pendampingan secara lebih intensif kepada PTV pengampu di wilayah tersebut.
2. Penyeragaman Skema Sertifikasi pada LSP P1 SMK dilakukan penyepakatan antara tim asesor dengan tim Pustanda. Kesepakatanannya telah tertuang dalam Berita Acara yang ditandatangani oleh seluruh audiens.
3. Membuat grup whatsapp komunitas industri mitra pendidikan vokasi untuk mempermudah penyampaian informasi terkait program.
4. Melakukan pertemuan antar tim pengembang kedua aplikasi tersebut untuk sinkronisasi dan tindak lanjut.

Balai:

1. Perbaiki dan evaluasi bagi pelaksana pelatihan terkait fasilitas, sarana dan prasarana.
2. Pengadaan peralatan praktek yang dibutuhkan sehingga setiap peserta mendapat 1 alat praktek dan melakukan desain diklat dimulai dari tingkat dasar sampai dengan tingkat advance.
3. Memberikan penawaran ke pihak SMK Kemaam untuk dilakukan pendampingan di Merauke, akan tetapi pihak satuan pendidikan pun terkendala biaya transportasi dan akomodasi dari Kemaam ke Merauke.
4. Perlu adanya pendampingan luring yang berkelanjutan, tidak hanya sekali pertemuan saja.
5. Melakukan proses penjadwalan kegiatan sehingga peserta diklat tidak terganggu dengan proses pelatihan, serta melakukan analisis terkait durasi pelatihan untuk upskilling dan reskilling.
6. Melakukan pengkajian ulang terhadap materi pelatihan.

F . SP 3 Meningkatkan riset, inovasi dan ilmu pengetahuan dari PT Vokasi

- IKP 3.1 Jumlah keluaran penelitian PT Vokasi yang diterapkan oleh masyarakat

Progress / Kegiatan :

Pada IKP 3.1 Jumlah keluaran penelitian PT Vokasi yang diterapkan oleh masyarakat, telah diterbitkan sebanyak 2.507 judul, dengan sumber data yang digunakan berasal dari PDDIKTI dan Dashboard IKU Diksi. Formula perhitungan untuk IKP 2.3 ini adalah angka riil dari total keluaran penelitian PT vokasi yang diterapkan oleh masyarakat.

Untuk meningkatkan jumlah keluaran penelitian PT vokasi yang diterapkan oleh masyarakat didukung oleh program-program yang dilaksanakan oleh Direktorat Akademik Pendidikan Tinggi Vokasi, yaitu:

1. Matching Fund

- a. Melaksanakan monitoring dan evaluasi baik secara desk evaluation maupun visitasi terhadap laporan kemajuan yang disusun oleh pelaksana program.
- b. Pencairan tahap 2 untuk PTV menggunakan pencairan dengan mekanisme kontrak.
- c. Melaksanakan bimtek laporan akhir Program Matching Fund Vokasi 2023.
- d. Penerima MF Vokasi menyusun laporan akhir pelaksanaan kegiatan Program Matching Fund Vokasi 2023.
- e. Melaksanakan workshop pencatatan asset pelaksana matching fund dengan mekanisme kontrak (Unista dan PTN-BH).

2. Program Insentif Sentra Kekayaan Intelektual (KI)

- a. Pelaksanaan Bimbingan Teknis Penyusunan Dokumen Permohonan Paten Periode II di Jakarta secara Daring pada hari Rabu, 4 Oktober 2023 yang dihadiri oleh 46 peserta.
- b. Pelaksanaan Rapat Finalisasi Borang Monev Sentra KI dan Persiapan Penyampaian Laporan Kemajuan Sentra KI pada tanggal 6 Oktober 2023.
- c. Pelaksanaan Bimbingan Teknis Penyusunan Dokumen Permohonan Paten Periode II di Jakarta secara luring pada 9-10 Oktober 2023 yang dihadiri oleh 44 peserta.

Catatan:

1. UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau hasil cetakannya merupakan alat bukti yang sah."
2. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR

- d. Pelaksanaan Rapat Penyamaan Persepsi dan Persiapan Aplikasi Penilaian Monev Internal Program Bantuan Sentra KI pada tanggal 17 Oktober 2023.
- e. Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Bantuan Sentra KI Tahun Anggaran 2023 pada tanggal 23 Oktober 2023 yang diikuti oleh 5 Politeknik Negeri untuk Skema Penguatan Sentra KI dan tanggal 1 November 2023 yang diikuti oleh 6 Politeknik Negeri untuk Skema Pembentukan sentra KI.
- f. Penyampaian Pengumuman Penerima Bantuan Insentif Kekayaan Intelektual Dosen Vokasi Tahun Anggaran 2023 melalui aplikasi BIMA.
- g. Penyampaian Pengumuman Penerima Insentif Paten Terdaftar Tahun 2023 pada tanggal 23 November 2023.
- h. Pencairan insentif artikel ilmiah internasional bereputasi pada bulan Oktober 2023 untuk 57 penerima, insentif Paten/Paten Sederhana Granted dan Diimplementasikan di Masyarakat pada bulan November 2023 untuk 51 penerima, dan insentif paten terdaftar pada awal Desember 2023 untuk 62 penerima.
- i. Pelaporan insentif paten/paten sederhana granted dan diimplementasikan di masyarakat pada awal Desember 2023 dan insentif paten terdaftar pada bulan Desember 2023.

3. Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (PPM)

- a. Pelaksanaan Sosialisasi Monitoring dan Evaluasi Internal PPM PT Vokasi Tahun 2023 yang dihadiri oleh LPPM/LPM/P3M/UPPM dari 242 Perguruan Tinggi penerima dana Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Tahun 2023 pada tanggal 2 Oktober 2023.
- b. Penyamaan Persepsi untuk Reviewer Monev Internal Perguruan Tinggi Penyelenggaran Pendidikan Vokasi Tahun 2023 yang telah ditugaskan oleh Perguruan Tinggi penerima dana Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Tahun 2023 pada tanggal 12 Oktober 2023.
- c. Pelaksanaan Kegiatan Pendampingan Monitoring dan Evaluasi Internal Program Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Tahun 2023 terhadap 11 Perguruan Tinggi penerima dana pada tanggal 18-20 Oktober 2023.
- d. Pelaksanaan kegiatan pembahasan persiapan monev dan kunjungan lapangan kepada penerima bantuan BOPTN Pengabdian Kepada Masyarakat TA 2024 pada tanggal 26 Oktober 2023.
- e. Pelaksanaan Rapat Pembahasan Seleksi Reviewer Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat pada tanggal 27 Oktober 2023.
- f. Pelaksanaan rapat pembahasan pengembangan aplikasi monev keberlanjutan dan finalisasi panduan pengelolaan PPM pada tanggal 30 Oktober 2023.
- g. Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Eksternal Pengabdian kepada Masyarakat Hibah BOPTN Penelitian Dosen Vokasi Tahun 2023 pada tanggal 2-3 November 2023.
- h. Pelaksanaan Validasi Hasil Monitoring dan Evaluasi Internal pendanaan BOPTN Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Tahun 2023 pada tanggal 6-7 November 2023.
- i. Penyusunan borang penilaian proposal Penelitian Kerja Sama Luar Negeri (PHC-Nusantara) pada tanggal 20 November 2023.
- j. Penyusunan Panduan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Dosen Vokasi Edisi II Tahun 2023 pada bulan November 2023.
- k. Pengembangan sistem BIMA untuk persiapan pelaksanaan monev keberlanjutan dan pembukaan proposal penelitian dan pengabdian kepada masyarakat tahun anggaran 2024 pada bulan November - Desember 2023.
- l. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi keberlanjutan judul penelitian multitahun tahun 2023 pada tanggal 11-13 Desember 2023.

Kendala / Permasalahan :

1. Terdapat perubahan baik dalam format maupun isi dari juknis matching fund dibandingkan dengan tahun sebelumnya yang sehingga membutuhkan waktu untuk memfinalisasi juknis.
2. Perubahan dalam mekanisme proses seleksi dan beberapa hal teknis matching fund dari mekanisme proses seleksi dan teknis program dari tahun sebelumnya.
3. Terkendala sistem dalam identifikasi usulan dari PT vokasi yang berasal dari Unista, sehingga tidak dapat dinilai.
4. Kesulitan dalam melakukan penugasan evaluasi proposal kepada reviewer yang jumlahnya terbatas, pada bidang keahlian yang sesuai dengan usulan proposal, sehingga berdampak pada pergeseran jadwal seleksi.
5. Target pertemuan bimbingan teknis penyusunan dokumen permohonan paten secara luring adalah peserta yang mendaftarkan draft patennya ke Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI). Namun, sebagian besar peserta tidak dapat mendaftarkan patennya saat bimtek karena perlu koordinasi terlebih dahulu dengan LPPM dan anggota peneliti.
6. Beberapa penerima insentif paten/paten sederhana granted terlambat menerima informasi pengumuman penerima insentif sehingga terlambat menyampaikan data pencairan dana.
7. Terdapat perubahan standar biaya keluaran (SBK) penelitian dari yang sebelumnya berbasis bidang fokus diubah menjadi berbasis keluaran.
8. Form penilaian monitoring dan evaluasi keberlanjutan pada program penelitian dan pengabdian masyarakat di laman BIMA tidak muncul.

Strategi / Tindak Lanjut :

1. Melakukan pertemuan dengan semua tim matching fund bersama pihak reviewer dari PT untuk merevisi juknis disesuaikan dengan perubahan yang ada.
2. Melaksanakan komunikasi dan koordinasi secara intensif dengan tim kedaireka, baik tim Front Office (FO) maupun Back Office (BO), untuk penyesuaian tampilan pada aplikasi di menu seleksi.
3. Melaksanakan koordinasi dan monitoring dalam sistem secara intensif dan berkala kedalam sistem backoffice.kedaireka.com serta melakukan penandaan ulang proposal yang salah dan melakukan pemberitahuan atau notifikasi kepada pengusul bersangkutan. Dimana, dalam hal ini, pengusul yang belum bisa melengkapi dokumen administrasi dapat diarahkan pada batch selanjutnya.
4. Melakukan koordinasi dan komunikasi dengan reviewer dan pengusul serta mempersiapkan skema penjadwalan yang dinamis dan tepat sasaran.
5. Terkait dengan kendala selama pelaksanaan bimbingan teknis penyusunan dokumen permohonan paten, memberikan tambahan waktu selama 10 hari untuk para peserta melakukan pendaftaran patennya ke DJKI.
6. Menghubungi langsung penerima insentif untuk menyampaikan informasi bahwa yang bersangkutan lolos sebagai penerima insentif paten, dan memberi tahu bahwa penerima harus mempersiapkan dokumen yang diperlukan untuk pencairan dana.
7. Penyesuaian perubahan SBK pada draft panduan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat tahun 2024.
8. Reviewer mengisi form penilaian monitoring dan evaluasi keberlanjutan pada program penelitian dan pengabdian masyarakat secara manual.

G . SP 4 Meningkatnya akuntabilitas layanan dan pengelolaan anggaran pendidikan, kebudayaan, riset, dan teknologi

- IKP 4.1 Predikat SAKIP Ditjen Pendidikan Vokasi

Progress / Kegiatan :

Pada IKP 4.1 Predikat SAKIP Ditjen Pendidikan Vokasi, keluar pada triwulan 4 ini saat penilaian telah selesai dilaksanakan, dengan sumber data yang digunakan adalah Lembar Hasil Evaluasi (LHE) AKIP yang telah ditandatangani oleh Inspektur Jenderal. Predikat SAKIP Ditjen Pendidikan Vokasi adalah A dengan nilai 88,50, dengan rincian Perencanaan Kinerja (25,5), Pengukuran Kinerja (27), Pelaporan Kinerja (13,5) dan Evaluasi akuntabilitas (22,5).

Untuk meningkatkan predikat SAKIP Ditjen Pendidikan Vokasi didukung oleh program-program yang dilaksanakan oleh Sekretariat Ditjen Pendidikan Vokasi, yaitu:

1. Hasil evaluasi SAKIP sebanyak 60 dari 62 satker (96,77%) di Ditjen Vokasi telah meraih predikat minimal BB.
2. Memfasilitasi tindak lanjut hasil evaluasi SAKIP bagi satuan kerja di lingkungan Ditjen Pendidikan Vokasi bersama Inspektorat Jenderal.
3. Melakukan pendampingan kepada Politeknik dan AKN untuk revisi perjanjian kinerja 2023 sesuai Kepmendikbudristek Nomor 210 Tahun 2023.
4. Melakukan pendampingan kepada Politeknik dan AKN untuk menyusun rencana aksi atas PK sesuai Kepmendikbudristek Nomor 210 Tahun 2023.
5. Melakukan revisi PK Akhir eselon 1 Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi.
6. Melakukan pendampingan kepada satker untuk revisi perjanjian kinerja 2023 akhir untuk sesuai dengan pagu DIPA terakhir.
7. Pemuktahiran data capaian IKU pada aplikasi Sidakin untuk capaian kinerja Politeknik dan AKN.
8. Berkoordinasi dengan Badan Pusat Statistik untuk menghitung capaian IKP Kebekerjaan Lulusan Pendidikan Vokasi berdasarkan data Sakernas bulan Agustus tahun 2023.
9. Menyusun pengukuran kinerja triwulan IV untuk level eselon 1.
10. Melakukan pendampingan kepada satker untuk melakukan pengukuran kinerja triwulan 4.

Kendala / Permasalahan :

1. Masih ada satker yang belum melengkapi dokumen SAKIP sesuai Permenpan-RB Nomor 88 tahun 2022.
2. Masih terdapat satker yang belum memiliki komitmen untuk melaksanakan penilaian SAKIP.
3. Terdapat batas waktu penyusunan pengukuran kinerja bersamaan dengan cut off data capaian kinerja pada tanggal 31 Desember 2023, sehingga banyak satker yang masih membutuhkan tambahan waktu untuk melakukan pengukuran kinerja.
4. Terdapat kendala pada aplikasi Spasikita dalam proses penyusunan revisi perjanjian kinerja tahun 2023 terkait pemutakhiran data anggaran yang belum sesuai.
5. Perhitungan capaian IKP terkait kebeerjaan baru bisa dilakukan pada akhir Desember 2023 karena menunggu diseminasi data Sakernas oleh Badan Pusat Statistik.

Strategi / Tindak Lanjut :

1. Koordinasi dan melakukan pendampingan kepada satker yang belum melengkapi dokumen SAKIP.
2. Memfasilitasi penyusunan komitmen bersama antara satker dengan Itjen dalam bentuk Berita Acara setelah dilakukan tindak lanjut hasil evaluasi SAKIP.
3. Mengajukan surat permohonan kepada Kepala Biro Perencanaan untuk perpanjangan batas waktu pengukuran kinerja triwulan IV bagi satker di lingkungan Ditjen Pendidikan Vokasi sampai dengan 10 Januari 2024.
4. Mengajukan surat permohonan kepada Kepala Biro Perencanaan untuk perpanjangan waktu penyusunan revisi perjanjian kinerja bagi satker di lingkungan Ditjen Pendidikan Vokasi sampai dengan 31 Desember 2023.
5. Berkoordinasi dengan Badan Pusat Statistik.

H . SP 5 Meningkatnya pelaksanaan reformasi birokrasi Kemendikbudristek

- IKP 5.1 Jumlah Satker di Ditjen Pendidikan vokasi mendapatkann predikat ZI-WBK/WBBM

Progress / Kegiatan :

Pada IKP 5.1 Jumlah satker di Ditjen Pendidikan Vokasi mendapatkan predikat ZI WBK/WBBM, dihitung di triwulan 4 ini dengan total 1 satker WBBM dan 9 satker WBK, dengan sumber data yang digunakan adalah keputusan Menteri PAN RB dan sertifikat yang diperoleh satker. Berikut rincian satker yang mendapatkan WBBM dan WBK:

Satker yang sudah WBBM yaitu : BBPPMPV Bidang Otomotif dan Elektronika

Satker WBK :

1. BBPPMPV Bidang Mesin dan Teknologi Industri
2. BBPPMPV Bidang Bangunan dan Listrik
3. BBPPMPV Bidang Bisnis dan Pariwisata
4. BBPPMPV Pertanian
5. BBPPMPV Seni dan Budaya
6. BBPPMPV Bidang Otomotif dan Elektronika
7. Politeknik Negeri Bandung
8. Politeknik Manufaktur Bandung
9. Politeknik Negeri Batam

Untuk meningkatkan jumlah satker di Ditjen Pendidikan Vokasi mendapatkan predikat ZI WBK WBBM didukung oleh program-program yang dilaksanakan oleh Sekretariat Ditjen Pendidikan Vokasi, yaitu:

1. Pendampingan kepada satker yang dinilai layak dan potensial untuk proses persiapan penilaian ZIWBK/WBBM untuk tahun 2024.
2. Memastikan satker telah melakukan penganangan ZIWBK/WBBM.
3. Memastikan satker telah melakukan pengisian LKE Mandiri ZIWBK/WBBM pada aplikasi SIAZIK.

Kendala / Permasalahan :

1. Keterbatasan sumber daya untuk melaksanakan pendampingan pada 18 satker yang diusulkan, karena dengan sumber daya yang ada pada tahun 2023 hanya mampu mendampingi 7 s.d. 8 satker.
2. Satker harus dibimbing secara intens dalam pengisian LKE dan memastikan dokumen-dokumen yang dipersyaratkan dapat dipenuhi.
3. Motivasi satker untuk melaksanakan ZIWBK/WBBM masih rendah karena seringkali satker mempertanyakan manfaat bagi satker apabila telah memperoleh predikat ZIWBK/WBBM.
4. Terdapat kecenderungan pada satker, terutama pada Politeknik yang sudah "besar", merasa pencaangan ZIWBK/WBBM hanya akan menambah beban kerja.
5. Tim TPI Itjen tidak memberikan umpan balik atas penilaian yang telah dilaksanakan, sehingga sulit melakukan koreksi perbaikan terhadap kesalahan pada dokumen maupun pengisian LKE.
6. Acapkali terjadi benturan pada jadwal kegiatan tim Asesor dalam koordinasi maupun pendampingan sehingga pelaksanaannya belum bisa dimaksimalkan.
7. Terdapat informasi akan terjadi perubahan pada LKE tahun 2024.

Strategi / Tindak Lanjut :

1. Memulai proses pendampingan satker lebih cepat dengan mengirimkan surat edaran yang ditandatangani oleh Direktur Jenderal Pendidikan Vokasi supaya satker dapat melaksanakan pengisian LKE sejak bulan November 2023 dari yang sebelumnya dilaksanakan mulai awal tahun berjalan.
2. Melakukan penambahan 7 asesor untuk pelaksanaan pendampingan pada satker.
3. Diharapkan ada kebijakan yang mengatur sanksi bagi satker yang tidak melaksanakan ZIWBK/WBBM maupun penghargaan bagi satker yang melaksanakan ZIWBK/WBBM.
4. Perlu dibahas kemungkinan mewajibkan satker untuk pencaangan ZIWBK/WBBM sebagai bentuk komitmen satker dalam melaksanakan ZIWBK/WBBM.
5. Perlu dipertimbangkan untuk menyusun petunjuk pengisian LKE bagi satker supaya mempermudah satker mengisi LKE dan melengkapi kesesuaian dokumen yang diperlukan.

3. REKOMENDASI PIMPINAN

1. Melakukan identifikasi awal terkait belanja modal untuk memaksimalkan penggunaan PDN dan TKDN. Jika membutuhkan barang impor, segera menyelesaikan dokumen-dokumen yang dibutuhkan untuk pengadaan barang impor sedini mungkin.
2. Mendorong satuan pendidikan vokasi untuk melakukan kerjasama dengan UMKM melalui pengembangan kewirausahaan dengan harapan memberikan pembelajaran dan pengalaman untuk mengembangkan usaha mandiri.
3. Memastikan bahwa juknis terkait program bantuan sudah selesai di awal tahun, sehingga tidak menghambat proses penyaluran dana bantuan.
4. Melakukan pendampingan secara intensif dan berkelanjutan kepada satker untuk meningkatkan nilai SAKIP satker.
5. Melakukan pendampingan kepada satker untuk mendapatkan predikat ZI WBK/WBBM.
6. Mempertimbangkan data tracer study Kemendikbudristek dan laporan internal untuk menghitung capaian Indikator Kinerja Program (IKP) terkait kebermanfaatan.
7. Melakukan pendampingan secara intensif dan berkelanjutan kepada Satker Politeknik dan AKN untuk melakukan input data pada berbagai aplikasi yang menjadi sumber perhitungan capaian IKU, seperti PDDIKTI, Sister, Sikerma, Tracer Study dan Sidakin.

Demikian laporan pengukuran kinerja triwulan IV tahun 2023 untuk dimanfaatkan dalam rangka perbaikan kinerja periode selanjutnya.

Jakarta, 17 Januari 2024

Direktur Jenderal Pendidikan Vokasi



Kiki Yulianti

PERNYATAAN TELAH DIREVIU
DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN VOKASI
TAHUN ANGGARAN 2023

Kami telah mereviu laporan kinerja Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi untuk Tahun Anggaran 2023 sesuai pedoman reviu atas laporan kinerja. Substansi informasi yang dimuat dalam laporan kinerja menjadi tanggung jawab manajemen Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi.

Reviu bertujuan untuk memberikan keyakinan terbatas laporan kinerja telah disajikan secara akurat, andal, dan valid.

Berdasarkan reviu kami, tidak terdapat kondisi atau hal-hal yang menimbulkan perbedaan dalam meyakini keandalan informasi yang disajikan di dalam laporan kinerja ini.

Jakarta, Februari 2024
Ketua SPI Direktorat Jenderal
Pendidikan Vokasi,



Faiz Ayatullah, S.E., M.M.
NIP 197901142005011003

